

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN PERHIMPUNAN INDONESIA
DALAM PERGERAKAN KEMERDEKAAN
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

SUHARYANTO

NIM : 92214034

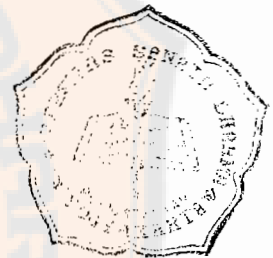
NIRM : 920052010604120033

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1998**

**PERANAN PERHIMPUNAN INDONESIA
DALAM PERGERAKAN KEMERDEKAAN
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Di Universitas Sanata Dharma



OLEH :

SUHARYANTO

NIM : 92214034

NIRM : 920052010604120033

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITA SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1998**

PERANAN PERHIMPUNAN INDONESIA DALAM
PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

SKRIPSI

OLEH :

SUHARYANTO

NIM : 92214034

NIRM : 920052010604120033

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. P. J. Suwarno, S.H.

Tanggal.....

Pembimbing II



Drs. A. K. Wiharyanto

Tanggal.....¹¹/₃.....1998

PERANAN PERHIMPUNAN INDONESIA DALAM
PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

SKRIPSI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

SUHARYANTO
NIM : 92214034
NIRM : 920052010604120033

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal Maret 1998

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

- Ketua : Drs. A. K. Wiharyanto
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M. Pd
Anggota : 1. Dr. P. J. Suwarno, S.H.
2. Drs. A. K. Wiharyanto
3. Drs. J. B. M. Mudjiharjo



Handwritten signatures of the examination committee members, including the Chairman and members.

Yogyakarta, 22 Mei 1998.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Dekan,



Dr. Paulus Suparno, S.J., M.S.T.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Motto : Tat Twam Asi

Persembahan

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu Pringgo Surono
2. Saudara-saudaraku tercinta,



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menvelesaikan skripsi ini. Adapun tujuan penvusunan skripsi ini antara lain untuk memenuhi salah satu svarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Ketua Progarm Studi Pendidikan Sejarah.
3. Bapak Dr. P.J. Suwarno, S.H. selaku Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini sampai selesai.
4. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan masukan hingga selesainya skripsi ini.
5. Teman-teman : Seno Kristianto, S.Pd., Fransiskus Xaverius Sutarno, S.Pd., Djarot Priyono, S.Pd., Yusup Adji Nugroho (P.Sejarah/92), Sutarno Herman Yosep (PAK.92), Tohap Hutaauruk (PBI/97).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan bagi penvusun skripsi berikutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peminat, pemerhati, dan pecinta sejarah.

Yogyakarta, Mei 1998

P e n u l i s



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Landasan Teori	6
F. Dugaan	13
G. Metode Penelitian	16
BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN PERHIMPUNAN INDONESIA DARI ORGANISASI SOSIAL MENJADI ORGANISASI POLITIK RADIKAL	20
A. Pengaruh Pemimpin <i>Indische Partij</i>	20
B. Kekecewaan Atas Kerjasama dengan Belanda ..	26
C. Generasi Baru Mahasiswa	28
BAB III KEGIATAN POLITIK PERHIMPUNAN INDONESIA DALAM MENYEBARKAN IDEOLOGINYA	43
A. Kegiatan Perhimpunan Indonesia di Eropa	43
1. Propaganda Perhimpunan Indonesia di Perancis	43
2. Perhimpunan Indonesia Dalam Kongres Demokrasi Internasional Di Bierville ...	45
3. Hubungan Dengan Komunis	50

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Perhimpunan Indonesia Dalam Kongres Anti Penindasan Kolonial	53
5. Pidato Mohammad Hatta Di Gland Swiss dan Utrech	60
B. Kegiatan politik Perhimpunan Indonesia Di Indonesia	63
1. Penvusupan Ke Partai-Partai Politik	63
2. Rencana Pembentukan Organisasi Nasionalis Baru	67
C. Reaksi Pemerintah Belanda	69
BAB IV HUBUNGAN PERHIMPUNAN INDONESIA DENGAN PARTAI NASIONAL INDONESIA	81
A. Kelompok Studi	81
B. Revolusi Komunis Dan sebuah Partai Nasional Baru	87
C. Pembentukan Partai Nasional Indonesia	92
BAB V HUBUNGAN PERHIMPUNAN INDONESIA DENGAN SUMPAH PEMUDA	101
A. Propaganda Perhimpunan Indonesia Terhadap Pemuda Indonesia	101
B. Berdirinya Organisasi Persatuan Pemuda	102
1. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ...	102
2. Kongres Pemuda I	105
3. Pemuda Indonesia	106
4. Kongres Pemuda II	109
BAB VI KESIMPULAN	117
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	126
1. <i>Als ik Eens Nederlander Was</i> (Seandainya Saya Orang Belanda)	127
2. Tabel tokoh-tokoh <i>Indische Vereeniging</i> 1908-	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1913	132
3. Tabel Penerbitan <i>Indische Vereeniging</i> , <i>Indo-nesische Vereeniging</i> , Perhimpunan Indonesia, dan <i>Indonisch Verbond van Studeerenden</i>	133
4. Tabel isi karangan dalam <i>Hindia Putera</i> seri pertama, 1916-1917	135
5. Konvensi antara Semaun dan Moh. Hatta	136
6. Semaun, <i>Rencana Organisasi Untuk Gerakan Kebangsaan Kita</i>	138
7. Moh. Hatta, <i>Penjelasan Penutup</i>	142
8. Pembelaan Moh. Hatta	146
9. Pembelaan Abdulmadjid Djojoadiningrat	149
10. Pembelaan Ali Sastroamidjojo	150
11. Pembelaan Nazir Sutan Pamuncak	151



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penulis memilih judul : Peranan Perhimpunan Indonesia Dalam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia, karena tertarik akan aktivitas para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia. Menarik karena perhimpunan yang pada awalnya bersifat non politik, kemudian berubah menjadi organisasi politik radikal.

Permasalahan pertama, mengapa Perhimpunan Indonesia yang pada awalnya merupakan organisasi sosial berubah menjadi organisasi politik yang radikal ? Permasalahan kedua, bagaimana kegiatan politik Perhimpunan Indonesia dalam menyebarkan ideologinya ? Permasalahan ketiga, bagaimana hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Partai Nasional Indonesia ? Permasalahan keempat, bagaimana hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Sumpah Pemuda ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yang terdiri dari studi pustaka, deskripsi, dan analisis.

Perhimpunan Indonesia yang pada awalnya merupakan organisasi sosial kemudian berubah menjadi organisasi politik radikal karena pengaruh pemimpin *Indische Partij* dan kedatangan generasi baru yang mereorganisasi organisasi tersebut. Kegiatan politik mereka diarahkan pada dua sasaran. Pertama, perjuangan diarahkan untuk propaganda ke luar negeri. Kedua, perjuangan diarahkan untuk tanah air. Program perjuangan yang diarahkan untuk tanah air, tidak saja mengilhami perjuangan kemerdekaan di Indonesia, tetapi juga mensponsori kelahiran kelompok-kelompok studi yang menjadi cikal bakal organisasi nasional seperti Partai Nasional Indonesia. Di samping itu, juga membangkitkan semangat persatuan pemuda sehingga mereka yang sudah bangkit secara politis dan semangat persatuannya kuat kemudian mendirikan organisasi-organisasi pemuda bersifat nasional yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACTS

The writer selects the role of Indonesian Association in the Independence of Indonesia Movement as the title because of interested by the activities of Indonesian students, which joined in Indonesian Federation in Netherland. It is interesting because of in the beginning the characteristic of the organization is non-politics, later it changes to be the radical politic organization.

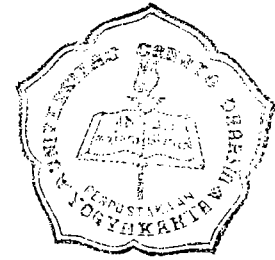
The first phenomenon why is Indonesian Federation changed from the social organization to the radical organization ? The second phenomenon, how is the activities of Indonesian Federation in proselytization their ideology ? The third phenomenon, how is the relationship between Indonesian Federation and Indonesian National Party ? The fourth phenomenon, how is the relationship between Indonesian Federation and Youth Pledge ?

The writer used the methodologies for writing consist of literature study, description and analyzes.

Indonesian Federation is social organization but it's changed to the politic radical organization because of influenced by the leader of *Indische Partij* and the coming of young generation reorganized this organization. The purpose of their politic activity has two objects. First, the struggle is aimed at the propazanda in abroad. The second, struggle is aimed at the fatherland, it is not only to give the inspiration to be the independence struggle in Indonesia but supported the new coming of students group which will be the pioneer of national organization such as Indonesia National Party. A part from that is rising the spirit of young association so they were rising in politics manner and strongly unions to form national young organization and motivated the rising of youth pledge.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Berbicara tentang sejarah, baik sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, maupun sejarah politik tidak dapat dipisahkan dari keadaan geografis pada waktu sejarah itu terjadi. Dalam hal ini Hatta mengatakan, bahwa geografi dapat dipakai untuk penelitian sejarah. Caranya dengan menelaah kondisi geografi dari wilayah yang bersangkutan di masa lampau (Mohammad Hatta, 1960 : 5).

Apabila memperhatikan letak geografisnya, Indonesia merupakan bagian dari benua Asia, secara kultur benua Asia dibagi menjadi : Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Indonesia merupakan bagian negara-negara Asia Tenggara yang mempunyai posisi sangat menguntungkan. Secara astronomis terletak pada $6^{\circ}\text{LU} - 11^{\circ}\text{LS}$ dan $95^{\circ}\text{BT} - 140^{\circ}\text{BT}$ sehingga Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa: Dipandang secara geografis terletak diantara dua benua dan dua samudera yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Pasifik. Berdasarkan keadaan yang demikian menjadikan Indonesia berada pada posisi silang jalan perdagangan internasional kuno dari Tiongkok ke India melalui Selat Malaka atau sebaliknya (Burger, 1957 : 15).

Melalui jalur perdagangan itulah pengaruh dari luar masuk ke Indonesia, baik dari India, Cina, Islam, maupun dari Barat (Soehardjo, 1983 : 4).

Bangsa Barat yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis, yang pada mulanya hanya berdagang untuk mendapatkan rempah-rempah. Tetapi pada tahap selanjutnya mereka menguasai daerah-daerah penghasil rempah-rempah itu. Kemudian datang bangsa Belanda yang awalnya juga hanya berdagang, namun lambat laun mereka mendapat kekuasaan dalam pemerintahan di negeri yang didatanginya. Ahmad Soebardjo, seorang anggota Perhimpunan Indonesia (PI) dalam pidato hari peringatan PI di Den Haag 22 Desember 1928 menyatakan bahwa :

.....maksud mereka itu datang ke tanah air kita bukan disebabkan oleh karena mereka itu merasa mempunyai cita-cita untuk membawa kultur Barat ke Timur, akan tetapi semata-mata untuk berdagang alias mencari uang dan isi perut. Kemauan apalagi kemampuan menjadi "Bapa" atau "Guru" dari bangsa kita, jauhlah dari mereka. Malah mereka itu jauh dari beradab, apalagi berbudi. Ia mempunyai maksud satu, yaitu mengeksploitasi bangsa dan tanah air kita, agar mereka dapat untung banyak (dikutip dalam Zainoel Ihsan-Pitut Soeharto, 1981 : 165).

Sedangkan Abdoellah Soekoer dalam pidato yang sama mengatakan :

.... bukan bangsa Belanda saja yang mengunjungi nusa kita, akan tetapi juga Portugis, Inggris, Perancis, Spanyol, dan terpaksa saudagar-saudagar Belanda itu memakai politik dan taktik yang jauh dari pantas. Segala sifat kemanusiaan dilempar, asal saja dapat untung banyak. Organisasi seperti VOC lain tidak perusahaan yang bercap tangan besi yang tidak jauh dari persekutuan bajak dan perampok, yang tidak ambil peduli tentang hak-hak orang. Tambo kolonialisme politik penuh dengan kejahatan dan kejaman yang didorongkan kepada

anak pribumi dari negeri jajahan (dikutip dalam Zainoel Ihsan-Pitut Soeharto 1981 : 176).

Dominasi sosio politik kolonialisme Belanda itu sudah tentu membangkitkan perlawanan. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda sebelum abad XX mengalami kegagalan karena perlawanan tidak diorganisasi secara teratur dan rasional tetapi perlawanan yang bersifat dan tergantung pada kekuatan seorang pemimpin yang berkharisma. Tetapi memasuki abad XX perlawanan Bangsa Indonesia berubah. Berdasarkan pengalaman perlawanan yang gagal tersebut bangsa Indonesia kemudian bersatu dalam bentuk organisasi pergerakan nasional. Pergerakan itu diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.

Munculnya pergerakan nasional tersebut disebabkan antara lain, makin diinsyafinya bahwa kehidupan rakyat Indonesia semakin sengsara dan semakin meluasnya rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Di samping itu juga pengaruh Barat yang masuk lewat pendidikan, kemenangan Jepang atas Russia pada tahun 1905, pergerakan dan perjuangan bangsa lain menentang penjajahan : India, Turki, Irlandia, dan lain-lain (Moedjanto, 1974 : 24).

Sejak berdirinya Budi Utomo, terus banyak muncul organisasi yang bersifat nasional. Organisasi massa Sarekat Islam didirikan sekitar 4 tahun kemudian setelah Budi Utomo, diikuti setahun kemudian oleh *Indische Partij*. Partai Komunis Indonesia didirikan pada tanggal

23 Mei 1920 sebagai bentuk baru dari *Indische Social Democratische Vereeniging* (Persatuan Sosial Demokrat India) yang didirikan tahun 1914 oleh Hendrik Sneevliet, bekas anggota Partai Sosial Demokrasi Belanda (Blumberger dalam Adnan Buyung Nasution, 1995 : 273). Kemudian muncul Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan Indonesia itu merupakan perkembangan dari *Indische Vereeniging* yang dibentuk pada tahun 1908 bersama dengan berdirinya Budi Utomo (Ingleson, 1993 : 1).

Indische Vereeniging pada awalnya merupakan organisasi sosial, bahkan masih merupakan perkumpulan untuk sekedar bertemu, bersenang-senang, berbincang-bincang dan bersuka ria. Namun dalam perkembangannya, IV berubah menjadi organisasi politik radikal dan menjadi pusat kemajuan bagi gerakan nasional Indonesia.

Kegiatan politiknya ditujukan untuk kebangkitan gerakan nasional di Indonesia seperti mensponsori kelahiran kelompok-kelompok studi yang menjadi cikal bakal organisasi nasional seperti Partai Nasional Indonesia. Di samping itu juga membangkitkan semangat persatuan para pemuda, sehingga mereka yang sudah bangkit semangat politiknya dan semangat persatuannya kuat kemudian mendirikan organisasi-organisasi persatuan pemuda bersifat nasional yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda.

B. Perumusan Masalah

Setelah melihat gambaran umum di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi obyek penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Mengapa Perhimpunan Indonesia yang pada awalnya merupakan organisasi sosial berubah menjadi organisasi politik radikal ?
2. Bagaimana kegiatan politik Perhimpunan Indonesia dalam menyebarkan ideologinya ?
3. Bagaimana hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Partai Nasional Indonesia ?
4. Bagaimana hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Sumpah Pemuda ?

Demikian permasalahan-permasalahan pokok yang akan dijawab dalam seluruh skripsi ini.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum :
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan Perhimpunan Indonesia dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.
2. Tujuan Khusus :
 - a. Untuk mendeskripsi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan Perhimpunan Indonesia dari organisasi sosial menjadi organisasi politik radikal.
 - b. Untuk mendeskripsi dan menganalisis kegiatan

politik Perhimpunan Indonesia dalam menyebarkan ideologinya.

- c. Untuk mendeskripsi dan menganalisis hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Partai Nasional Indonesia.
- d. Untuk mendeskripsi dan menganalisis hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Sumpah Pemuda.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Sanata Dharma :
Untuk melaksanakan salah satu butir Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu penelitian untuk ilmu pengetahuan sosial.
2. Bagi Dunia Keguruan dan Ilmu Pendidikan :
Penelitian ini akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan sejarah Indonesia khususnya sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia.
3. Bagi Peneliti :
Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang peranan Perhimpunan Indonesia dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.

E. Landasan Teori

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul *Peranan Perhimpunan Indonesia Dalam Pergerakan kemerdekaan Indonesia*. Untuk penulisan ini perlu dikemukakan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul dan tujuan

skripsi.

Pergerakan adalah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, untuk mengakhiri penjajahan, yang bersifat "pergerakan" artinya yang berbentuk "organisasi" yang teratur (Soesanto Tirtoprodjo, 1989 : 7). Kata "pergerakan" mencakup semua macam aksi yang dilakukan dengan organisasi modern ke arah kemerdekaan Indonesia. Aksi itu tidak terbatas pada aksi politik, tetapi juga menyangkut aksi-aksi lainnya. Secara spasial aksi itu tidak hanya terbatas di Jawa saja tetapi juga meliputi aksi-aksi yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan kepulauan Indonesia lainnya (Suhartono, 1994 : 4).

Dalam membahas mengenai pergerakan kemerdekaan Indonesia, kita tidak akan terlepas dari nasionalisme karena dasar dari pergerakan kemerdekaan adalah nasionalisme itu. Banyak para ahli yang telah membahas mengenai nasionalisme, karena itu nasionalisme mempunyai pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pengarang yang membatasinya. Pengertian-pengertian itu antara lain : nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Kohn, 1961 : 11) ; nasionalisme adalah suatu paham sekelompok orang yang mempunyai keinginan bersama untuk bersatu dan mempertahankan persatuan (Renan, 1994 : 53-54). Nasionalisme adalah suatu cara yang didalamnya indivi-

du-individu mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok (Sargent, 1986 : 26). Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa nasionalisme adalah cinta kepada tanah air, bahasa, ras, atau sejarah budaya bersama (Chafer, 1955 : 6). Lebih lanjut Chafer mengatakan, nasionalisme menjadi suatu konsep yang kompleks dan selalu berubah. Sekelompok masyarakat yang disatukan dalam perasaan, mempunyai pengalaman historis umum yang nyata. Penyatuan perasaan itu terungkap dalam kesetiaan terhadap negara maupun bentuk pemerintahannya. Semangat ditujukan untuk kemegahan dan ekspansi dan bukannya untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Dengan melihat batasan dari bermacam-macam ahli tersebut, jelas bahwa para ahli dari berbagai ahli telah mencoba mencurahkan pikirannya untuk membahas dan menjelaskan arti nasionalisme, meskipun demikian mereka ternyata belum berhasil dalam memperoleh penyesuaian untuk memberikan batasan nasionalisme secara pasti. Dengan demikian masing-masing ahli masih mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri, tetapi jika kita lihat masih mempunyai kemiripan satu sama lain : bangsa, bahasa, daerah, agama, kepentingan ekonomi atau persamaan tradisi (Friedmann, 1961 : 40).

Disamping itu, berdasarkan batasan diatas kelihatan bahwa nasionalisme pada dasarnya mengacu pada paham yang mementingkan perbaikan dan kesejahteraan nasio atau bangsanya.

Berkaitan dengan judul skripsi ini pengertian nasionalisme yang lebih tepat adalah menurut Renan. Tepat karena di Indonesia terdapat banyak suku atau etnik. Kelompok etnik yang bersifat sangat lokal perlu dikoordinasikan secara kolektif untuk menuju keinginan bersama. Keinginan bersama itu adalah terbentuknya bangsa Indonesia. Jadi klimaks dari perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah pembentukan nasio Indonesia.

Berkaitan dengan pembentukan nasio Indonesia tersebut Perhimpunan Indonesia mempunyai peranan yang besar. Seperti dinyatakan oleh mantan anggota Perhimpunan Indonesia bahwa :

Perkembangan politik di Indonesia mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan perhimpunan Indonesia di negeri Belanda (Ahmad Soebardjo, 1978 : 123).

Sedangkan mantan anggota PI lainnya menyatakan :

Pengaruh Perhimpunan Indonesia nyata di dalam seluruh pergerakan nasional Indonesia (Soenario, 1970 : 45).

Apa yang dinyatakan oleh bekas anggota PI di atas memang tidak berlebihan, karena PI inilah organisasi pergerakan pertama yang namanya menggunakan kata "Indonesia" dengan demikian mengutip pernyataan Benhard Dahm, " Konsep politik Indonesia dilahirkan" (dikutip dalam Adnan Buyung Nasution, 1995 : 277). Dengan demikian jelas bahwa PI memainkan peranan penting dalam perkembangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia.

Tentu semua itu bukan tanpa latar belakang, mengapa PI dapat menjadi organisasi politik yang berp-

eran besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Organisasi pergerakan mengalami perkembangan bentuk sejak dari embrio, lahir, dewasa, dan sampai pada puncak aktivitas sosial-politik (Suhartono, 1994 : 3). PI merupakan perkembangan dari *Indische Vereeniging* yang didirikan pada tahun 1908. *Indische Vereeniging* didirikan kira-kira enam bulan setelah berdirinya Budi Utomo (Mohammad Hatta, 1976 : 8). Dan pada awal berdirinya organisasi itu bersifat sosial, hanya bertujuan untuk memperhatikan kepentingan bersama dari mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Namun, semenjak pemimpin-pemimpin *Indische Partij* sebagai orang buangan dan menjadi anggota *Indische Vereeniging*, maka tidak dapat dihindarkan lagi untuk berbicara mengenai politik.

Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* berubah menjadi sebuah organisasi politik yang bersifat nonkooperasi dan menuntut Indonesia merdeka. Hal ini diawali oleh kedatangan generasi baru mahasiswa Indonesia yang datang ke Belanda, seperti Sartono, Hatta, Soetomo, Ali Sastroamidjojo, Iwa Koesoemasoemantri, dan lain-lain. Mereka masih muda-muda dan kebanyakan berumur 19 atau sekitar 20 tahun sewaktu tiba di Belanda. Tetapi generasi baru tersebut memiliki kesadaran politik yang jauh lebih tinggi dari pada generasi mahasiswa sebelumnya, karena mereka sebelumnya telah ikut aktif dalam organisasi pemuda ketika masih berada di Indonesia.

Para pendatang baru itu dengan cepat mendominasi *Indische Vereegiging* dan menyalurkan anggotanya ke dalam kegiatan aktif sehubungan dengan masalah masa depan politik Indonesia (Ingleson, 1993 : 5-6). Pada tahun 1922, nama *Indische Vereeniging* diganti dengan *Indonesische Vereeniging*. Nama baru itu pada saat bersamaan mengetengahkan nama politis yang ditujukan untuk ibu pertiwi. Dengan menerima konsekuensi ini, majalah *Hindia Putera* diubah namanya menjadi *Indonesia Merdeka*. Jadi nama majalah tersebut sekarang secara tetap mendukung tujuan "Indonesia merdeka" (Mohammad Hatta, 1976 : 9).

Lebih lanjut Mohammad Hatta menjelaskan bahwa kekecewaan pada janji November merupakan pengaruh yang besar sekali terhadap keputusan di atas. Dari pengingkaran akan janji November tersebut para mahasiswa di negeri Belanda sadar, bahwa tidak ada kata-kata yang tepat dalam politik kolonial praktis untuk suatu ide bahwa "Indonesia bebas dari Holland". Dengan pengingkaran janji November tersebut kepercayaan para mahasiswa Indonesia di Belanda kepada penguasa lenyap dan mereka yakin bahwa kemerdekaan hanya akan diperoleh bila mereka mampu melawan kekuatan. Kepercayaan tersebut membawa prinsip untuk menolak kerjasama (nonkooperasi). Dan pada tahun 1925 nama *Indonesische Vereeniging* diganti menjadi Perhimpunan Indonesia (Sartono Kartodirdjo dkk., 1977 : 200). Dengan demikian Perhimpunan

Indonesia semakin tegas bergerak di bidang politik.

Setelah berubah menjadi organisasi politik, PI tentu melakukan kegiatan-kegiatan politik untuk menyebarkan ideologinya. Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya diarahkan pada dua sasaran.

Pertama, program-program perjuangan diarahkan untuk propaganda ke luar negeri, dengan tujuan menarik perhatian dunia internasional pada masalah-masalah Indonesia. Untuk keperluan itu, perhatian para anggotanya dibangkitkan buat soal-soal internasional seperti mengadakan kerjasama dengan organisasi mahasiswa Asia, mengikuti Kongres demokrasi Internasional, mengikuti Kongres Anti Penindasan Kolonial, dan mengadakan ceramah-ceramah ke luar negeri.

Kedua, program-program perjuangan diarahkan untuk tanah air dengan melakukan penyusupan partai-partai politik yang sudah ada untuk mempropagandakan ideologinya

Bahkan John Ingleson menyatakan, bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) hampir seluruhnya adalah ciptaan PI, demikian pula organisasi penerusnya, Partindo (Partai Indonesia) dan PNI Baru. Ketiga partai itu bersama-sama mendominasi gerakan kebangsaan setelah tahun 1927 (Ingleson, 1993 : 103).

Di samping itu, juga membangkitkan semangat persatuan pemuda sehingga mereka yang sudah bangkit secara politis dan semangat persatuannya kuat kemudian men-

dirikan organisasi-organisasi pemuda bersifat nasional yang mendorong lahirnya sumpah pemuda. Dalam hal ini mantan anggota PI menyatakan bahwa lahirnya Sumpah Pemuda tidak lepas dari pengaruh PI (Soenario, 1970 : 58).

F. Dugaan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diduga bahwa :

1. Perubahan Perhimpunan Indonesia dari organisasi sosial menjadi organisasi politik radikal pada awalnya dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin *Indische Partij* yang diasingkan ke Belanda oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka dengan membawa ideologi *Indische Partij* menanamkan rasa patriotisme pada anggota *Indische Vereeniging* (IV). Pengaruh politik semakin terasa dengan diterbitkannya majalah *Hindia Putera* oleh Soewardi Suryaningrat. Kedatangan generasi baru mahasiswa Indonesia yang memiliki kesadaran politik lebih tinggi dari pada generasi mahasiswa sebelumnya semakin meningkatkan corak politik *Indische Vereeniging*, karena mereka sebelumnya telah ikut aktif dalam organisasi pemuda ketika masih berada di Indonesia. Generasi baru itulah yang selanjutnya mengarahkan IV menjadi organisasi politik yang radikal. Di samping itu kekecewaan atas kerjasama dengan Belanda merupakan

pengaruh yang besar terhadap keputusan untuk mengarahkan IV menjadi organisasi politik yang radikal.

2. Kegiatan politik PI dalam menyebarkan ideologinya diarahkan pada dua sasaran. Pertama, program-program perjuangan diarahkan untuk propaganda ke luar negeri, dengan tujuan menarik perhatian dunia internasional pada masalah-masalah Indonesia. Untuk keperluan itu, perhatian para anggotanya dibangkitkan buat soal-soal internasional dengan mengadakan ceramah-ceramah, mengikuti kegiatan-kegiatan internasional seperti ikut dalam kongres demokrasi internasional di Bierville Perancis, ikut kongres anti penindasan kolonial di Brussel Belgia. Kedua, program-program perjuangan diarahkan untuk tanah air dengan melakukan penyusupan ke partai-partai politik yang sudah ada, untuk mempropagandakan asas-asasnya dan mereka menyebarkan majalah Indonesia Merdeka sebagai alat propandanya.
3. Hubungan PI dengan PNI tercipta dari aktivitas anggota PI yang telah pulang ke tanah air. Mereka melakukan aktivitas politik dengan membawa ideologi PI dan untuk menyebarkan haluan ideologinya mereka ada yang menyusup ke partai politik yang sudah ada, ada yang mendirikan kelompok studi sebagai basis perjuangannya. Strategi tersebut ditambah oleh suatu usaha keras untuk mulai membentuk suatu partai

nasional baru menurut citra PI dan bertujuan mengambil alih kepemimpinan gerakan kebangsaan di Indonesia, karena pada waktu itu gerakan di Indonesia terpecah menjadi dua yaitu komunis dan Islam. Rencana untuk membentuk partai baru itu semakin kuat setelah gagalnya revolusi komunis Indonesia tahun 1926. Dan rencana itu sudah menjadi garis kebijakan PI. Jadi usaha untuk membentuk partai nasionalis baru (kelak menjadi PNI) tersebut adalah atas inisiatif PI. Bahkan PI tidak hanya sebagai pencetus ide saja tetapi anggota-anggotanya yang telah pulang ke tanah air bersama-sama dengan kelompok aktivis di Indonesia terlibat secara langsung dalam proses kelahiran PNI.

4. Hubungan PI dengan Sumpah Pemuda terjalin baik secara tidak langsung maupun langsung. Secara tidak langsung melalui majalah *Indonesia Merdeka* yang secara *klandestin* beredar di Indonesia. Ide-ide PI yang dibawa majalah tersebut sangat berpengaruh terhadap paradigma pemuda, sehingga mereka sedikit demi sedikit meninggalkan sifat kedaerahan dan mengarah ke persatuan. Semangat persatuan yang semakin menguat dikalangan pemuda, kemudian mereka tunaikan dengan mengikrarkan sumpah dalam Kongres Pemuda II yang terkenal dengan Sumpah Pemuda, yang mana sumpah itu merupakan wujud dari ide-ide PI (empat pokok pikiran PI). Hubungan secara langsung

terjalin dengan keikutsertaan para anggota PI yang telah pulang ke Indonesia dalam memikirkan pelaksanaan Kongres Pemuda II maupun ikut menghadiri secara langsung dalam acara kongres.

G. Metode Penelitian

Skripsi yang akan dibuat ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan penelitian kepustakaan ini penulis ingin menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah dikemukakan para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang akan dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi penelitian (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987 : 45).

Dalam mencari sumber-sumber tulisan, penulis menggunakan data historis. Data historis yang dimaksud adalah pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan proses perkembangan historis dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial dalam perurutan temporal yang mengandung dimensi waktu, yang memberikan stampel pembentuk sehingga terwujud keadaan sekarang (Kartini Kartono, 1980 : 225-226). Data historis akan didapatkan dari dokumen-dokumen berupa literatur yang ada di perpustakaan, baik yang berupa buku, majalah, atau publikasi lainnya yang tersedia.

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan tentunya banyak buku-buku yang akan dibaca dalam rangka mengumpulkan dan menafsirkan gejala-gejala untuk diinterpretasikan guna menemukan generalisasinya. Penganalisaan digunakan untuk meramu data-data yang telah didapat guna mencari kesimpulan yang muncul. Pada dasarnya penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari beberapa permasalahan yang telah ditegaskan dalam perumusan masalah.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemilihan subyek untuk diselidiki.
2. Menemukan sumber selengkap-lengkapnyanya.
3. Mengkritik sumber dengan tujuan menguji otentisitas dengan kritik ekstern maupun intern.
4. Menganalisis sumber keterangan.
5. Sintesa sumber keterangan dari berbagai sumber untuk diperbandingkan.
6. Membandingkan sumber lain yang otentik.
7. Interpretasi sejarah berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh.
8. Penulisan laporan sejarah (Gottchalk, 1975 : 34).

Penulisan skripsi ini meyangkut bidang studi sejarah, maka penulis menggunakan metode penulisan deskriptif analitik. Metode penulisan tersebut mempunyai pengertian sebagai suatu penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari perspektif

historis suatu masalah (Winarno & Surachman, 1982 : 132).

Melalui metode deskriptif analitik, peristiwa-peristiwa sejarah berusaha diuraikan berdasarkan kausalitas, faktor kondisional, determinan. Di samping menggunakan metode deskriptif analitik, penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan multi dimensional. Ini dimaksudkan agar penulisan peristiwa sejarah dapat lebih lengkap dalam mempelajari fenomena historis yang kompleks.

Ditinjau dari jenis aktivitasnya, penulisan skripsi ini merupakan hasil penelitian interpretasi kritis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran mengenai suatu masalah dalam bentuk uraian kritis dan logis. Kritis dan logis dalam arti sesuai dengan fakta yang ada, jelas dan rasional.

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I, Bab pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesa, dan metode penelitian.

BAB II, Menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan Perhimpunan Indonesia dari organisasi sosial menjadi organisasi politik.

BAB III, Menguraikan kegiatan politik Perhimpunan Indonesia dalam menyebarkan ideologinya.

BAB IV, Menguraikan hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Partai Nasional Indonesia.

BAB V, Menguraikan hubungan Perhimpunan Indonesia dengan Sumpah Pemuda.

BAB VI, Kesimpulan.



BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN
PERHIMPUNAN INDONESIA DARI ORGANISASI SOSIAL
MENJADI ORGANISASI POLITIK RADIKAL

A. Pengaruh Pemimpin Indische Partij

Proses perubahan Perhimpunan Indonesia (PI) dari organisasi sosial menjadi organisasi politik yang radikal tidak berlangsung cepat. Proses perubahan itu dipengaruhi oleh berbagai peristiwa penting di tanah air maupun di dunia internasional.

Pada tanggal 25 Oktober 1908, sekitar enam bulan setelah Budi Utomo berdiri di Jakarta (Mohammad Hatta, 1976: 8), di Belanda didirikan sebuah perkumpulan yang dikenal sebagai *Indische Vereeniging*, artinya perkumpulan orang-orang Hindia. Pada waktu itu kata Indonesia belum begitu dikenal, apalagi dalam arti politik. Tanah air Indonesia pada waktu itu masih dikenal sebagai *Nederlandsch Indie* atau Hindia Belanda. Jadi perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908 itu disebut *Indesche Vereeniging* (IV) tetapi baru pada tanggal 15 Nopember 1908 secara resmi diumumkan berdirinya IV, dengan ketua Sutan Kasayangan (Sagimun, 1992: 32).

Selain Sutan Kasayangan pemuka-pemuka IV antara lain adalah Noto Soeroto, Sosrokartono, Gondowinoto, Abdoel Rivai, Radjiman Widiodiningrat dan Brentel (Soenario dalam

Nagazumi, 1986 : 138).

Berdirinya IV adalah suatu reaksi atas berdirinya Budi Utomo, perkumpulan para pelajar pada sekolah keahlian untuk dokter bumi putera di Batavia (Ahmad Soebardjo, 1978: 109). Tetapi keanggotaan IV terbuka untuk semua mahasiswa dari Hindia Belanda, tidak seperti Budi Utomo yang sekalipun didirikan pada tahun yang sama, lambat laun menjadi suatu organisasi yang beranggotakan orang-orang Jawa.

Pada awalnya IV merupakan sebuah perkumpulan sosial biasa. Bahkan IV masih merupakan *gezelligheids vereeniging*, artinya sebuah perkumpulan untuk bertemu, bersenang-senang, berbincang-bincang dan bersuka ria, biasanya antara teman-teman atau anggota-anggota keluarganya. IV sering pula mengadakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah dan lain sebagainya (Soenario dalam Sagimun, 1992 : 32). Tujuan utama IV seperti yang tercantum di dalam pasal 2 anggaran dasarnya adalah :

"Het doel der vereeniging is het bevorderen der gemeenschappelijke belangen van de Indiers in Nederland, en voefing te houden met Nederlandsch Oost Indie. Onder Indiers verstaan we de inheemsche bewoners van Nederlansch Oost Indie."

Artinya:

"Tujuan perkumpulan adalah memajukan kepentingan bersama orang-orang (Indonesia) di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan (Indonesia). Yang dimaksud dengan orang-orang (Indonesia) adalah penduduk asli negeri (Indonesia)" (Harry A. Poeze dalam Sagimun, 1992 : 32).

Bedasarkan pasal 2 anggaran dasar tersebut Akira Nagazumi yang menganalisis tentang masa awal pembentukan

Perhimpunan Indonesia, menyatakan bahwa IV bukan sekedar "organisasi persahabatan" (Nagazumi, 1986: 136).

Namun demikian karena tokoh-tokoh penggeraknya bersikap pro Belanda, terutama Noto Soeroto, maka pada tahap awal IV tidak dapat bersikap revolusioner. Misalnya ketika pada tahun 1913 pemerintah Belanda merayakan peristiwa 100 tahun kemerdekaannya, reaksi IV sangat berlawanan dengan sikap *Indische Partij*. Pada tahun itu juga *Indische Partij* ditimpa musibah karena 3 orang dari para pemimpinnya yang paling cakap Tjipto Mangoenkoesoemo, E.F.E. Dauwes Dekker dan Soewardi Soeryaningrat, diharuskan untuk meninggalkan Hindia Belanda, dan pada waktu itu Soewardi menulis artikel bernada sarkastis yang berjudul "*Als ik eens Nederlander was*" (Andaikata aku seorang Belanda). Sementara itu IV bertindak sebaliknya: mereka mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan ikut serta dalam parade (Nagazumi, 1986: 137-138).

IV memasuki suatu periode baru dalam perkembangannya setelah pemimpin *Indische Partij*, Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soeryaningrat dan Dauwes Dekker dibuang dari Hindia Belanda pada tahun 1913, karena Gubernur Jenderal takut pada gagasan "Revalusioner" mereka (Niel, 1976: 8; Sartono Kartodirdjo, 1990: 150; Ahmad Soebardjo, 1978: 111). Seperti telah disebut diatas, tulisan yang paling dianggap membahayakan terhadap pemerintah dan juga dianggap sebagai pengganggu keamanan dan ketertiban adalah tulisan Soewardi Soeryaningrat pada bulan Juli 1913 dalam

sebuah brosur dengan judul: *als ik eens Nederlander was* (andaikan aku seorang Belanda) saya tidak akan merayakan hari ulang tahun pembebasan tanah air di tengah-tengah rakyat yang sedang dijajah. Brosur itu dikutip lengkap oleh harian *De Expres* dan dalam jumlah besar disebarakan ke segala tempat. Pers Belanda memberikan julukan brosur tersebut sebagai *Smaad en Schotschript* (tulisan penghinaan yang keji (Margono Djojohadikoesoemo, 1975: 37)).

Inti tulisan Soewardi Soeryaningrat di atas adalah, untuk membuka hati penjajah Belanda, agar pada kesempatan ini hari yang begitu besar untuk negeri Belanda, membuat penduduk negeri mengambil bagian dalam kegembiraan mereka dengan mengembalikan kemerdekaannya (Koch, 1955: 53).

Bersama dengan kedatangan ketiga pemimpin *Indische Partij* itu ke negeri Belanda, masuk pula konsep "Hindia bebas dari Belanda" dan pembentukan sebuah negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri. Pengaruh mereka itu makin terasa dengan diterbitkannya jurnal *IV Hindia Putera*, pada tahun 1916 oleh Soewardi Soeryaningrat (Ingleson, 1993 : 2).

Penerbitan *Hindia Putera* yang pertama dengan pimpinan redaksi Soewardi Soeryaningrat, dalam pengantar redaksi di halaman pertama nomor pertama menyatakan, bahwa ia menerima tugas sebagai pimpinan redaksi dengan harapan bahwa publikasi *Hindia Putera* akan menarik minat "tidak hanya dari para anggota kami yang hanya berjumlah 40 orang

tetapi juga dari kalangan luar" (dikutip dalam Nagazumi, 1986: 142).

Dengan diterbitkannya majalah *Hindia Putera* itu semakin tampak jelas pengaruh politik mereka terhadap IV karena pada dasarnya surat kabar adalah salah satu alat yang sangat penting di dalam perjuangan ideologi. Sebagai alat perjuangan ideologi, dengan sendirinya surat kabar pun tidak mungkin mengambil jalan tengah, tidak mungkin tidak berpihak. Dalam hal ini penerbitan *Hindia Putera* ditujukan untuk memperjuangkan rakyat bumi putera.

Disamping itu pengaruh pribadi pemimpin *Indische Partij* terhadap para anggota IV tercermin juga dalam keterlibatan IV, meski lambat dibidang politik. Beberapa anggota IV, misalnya ikut dalam pemilihan untuk Majelis Rendah Parlemen Belanda pada tahun 1916 mewakili golongan sosialis (*Gedenkboek IV, 1908-1923* seperti dikutip dalam Ingleson, 1993: 2).

Pengaruh politik pemimpin *Indische Partij* yang besar terhadap IV merupakan hal yang wajar, karena di manapun ketiga pemimpin *Indische Partij* tersebut selalu menyebarkan pengaruhnya tentang rasa patriotisme, seperti apa yang menjadi tujuan dari *Indische Partij*, yaitu "membangkitkan rasa patriotisme dari semua orang-orang Hindia untuk tanah yang memberinya kehidupan, yang mendorongnya untuk bekerja sama atas dasar persamaan hak politik nasional untuk mengembangkan tanah air Hindia ini dan untuk mempersiapkan sebuah kehidupan bangsa yang

merdeka "(Margono Djojohadikoesoemo, 1975: 299



Dengan demikian jelas bahwa kedatangan para pemimpin *Indische Partij* mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pola pikir mahasiswa Indonesia di Belanda. Mereka merasa terdorong rasa kenasionalannya, walaupun pada mulanya untuk berpikiran ke arah itu belum muncul. Dengan adanya pengaruh di atas tujuan organisasi tidak lagi hanya untuk kepentingan dalam menuntut ilmu, tetapi telah jauh berubah, yaitu mengarah terbentuknya nasionalisme Indonesia.

Tulisan Soewardi Soeryaningrat yang mengakibatkan dibuangnya, para tokoh pendiri *Indische Partij* itu benar-benar memberi kesan ada jurang pemisah antara orang-orang Hindia Belanda sebagai bangsa yang dijajah dengan orang-orang Belanda sebagai penjajah. Sulit rupanya untuk hidup bersama antara pihak penjajah dengan yang dijajah.

Dalam suasana kehidupan politik, dengan berkembangnya paham liberal tidak ada salah satu pihak yang harus dikalahkan. Tidak ada lagi penekanan hak-hak manusia, dalam kehidupan politik yang berdasarkan demokrasi. Oleh karena itu dalam suatu negara jajahan, masalah-masalah tersebut tidak dapat berjalan. Hal yang demikian berarti pihak Belanda sebagai pihak penjajah berusaha untuk menutup timbulnya rasa kesadaran nasional. Masalah demikian diketahui persis oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda (Sudiyo, 1986 : 36).

Dengan demikian kedatangan pemimpin *Indische Partij*

benar-benar menimbulkan rasa kebangsaan yang dalam, yang mana rasa kebangsaan itu merupakan motor penggerak untuk mengarahkan IV menuju organisasi politik sebagai basis perjuangan.

B. Kekecewaan Atas Kerjasama Dengan Belanda

Setelah pengaruh politik memasuki IV, pada tahun 1917 tokoh-tokoh dari IV dan dari organisasi-organisasi mahasiswa Belanda serta Tionghoa, bertemu untuk bersama-sama mempertimbangkan kemungkinan mendirikan suatu perhimpunan umum yang meliputi semua mahasiswa, yang mana mereka mempersiapkan dirinya untuk bidang-bidang kegiatan di Hindia Belanda (Mohammad Hatta, 1976: 8). Dalam pertemuan itu berhasil membentuk "Liga Indonesia".

Lebih lanjut Hatta menjelaskan bahwa Liga Indonesia merupakan suatu periode kerjasama, tetapi hal ini hanya berakhir dengan suatu hasil yang menyedihkan. Suatu konflik yang tajam antara orang-orang Belanda dan orang-orang Indonesia timbul, dan ini telah diperkirakan sebelumnya. Penumpahan pendapat-pendapat yang panas dari kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan lagi pada kongres pertama Liga Indonesia di Wageningen. Dan pada kongres kedua masalahnya makin bertambah panas, ketika antara lain diutarakan :

"Apa yang akan, dapat dan boleh diharapkan oleh Hindia Belanda dari Negeri Belanda?" Pertemuan itu begitu kacaunya sehingga ketua Liga ini tuan Jonkman, mengatakannya sebagai "Kemarahan Den Haag". Selanjut-

nya pada kongres yang ketiga pada tahun 1919, makin bertambah buruk keadaannya (Mohammad Hatta, 1976: 9).

J.E. Stokvis, seorang sosial demokrat mengenai kongres ketiga Liga Indonesia mengatakan :

"Mahasiswa Belanda kita mempunyai posisi yang menggembirakan dan baik. Mereka siap, sebagai anak-anak dari bangsa yang bebas, pergi ke Hindia Belanda sebagai penguasa-penguasa; disediakan lengkap dengan titel-titel yang sering muncul sebagai hak-hak istimewa jika mereka sampai pada daerah tujuannya."
"Mahasiswa Indonesia, di lain pihak, datang ke sini sesudah mendapat pengalaman sub-ordinasi nasional dan sosial yang pahit yang telah menjadi nasib mereka sejak masa kanak-kanak. Tepatnya, pergaulan mereka dengan anak-anak Belanda, yang terjamin kehidupan wajar dan intelek mereka pasti membuat mereka ini merasai sedalam-dalamnya tentang kekurangan mereka dan yang mereka alami di negeri mereka. Ini semua pasti membuat mereka merasa sakit hati dan bersikap menolak. Jika saya ada kesempatan yang memberi angin kepada perasaan mereka, kesempatan ini niscaya akan mereka gunakan dengan segala kesenangan. Mahasiswa Belanda dengan sendirinya pasti memberi jawaban atas tantangan ini sebaik-baiknya, di sanalah terwujud konflik kolonial itu, terang-terangan dan dalam segala ketajamannya." (dikutip dalam Mohammad Hatta, 1976: 9)

Kekecewaan atas kerjasama tersebut menjadikan percaya pada diri sendiri mulai muncul di dalam IV. Rasa percaya IV semakin kuat setelah pengingkaran janji November, yaitu janji Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum mengenai perubahan pemerintahan Hindia Belanda dengan memberikan hak politik yang besar kepada rakyat bumi putera. Janji yang dirumuskan Gubernur Jenderal dalam pidatonya pada 18 Nopember 1918 ternyata menimbulkan harapan-harapan yang besar bagi kaum pergerakan sehingga mereka melangkah ke depan dengan tuntutan-tuntutan mengenai status Hindia Belanda yang otonom terlepas dari ikatan kolonial dengan Belanda serta pembentukan perwakilan rakyat yang lebih

demokratis.

Janji tersebut ternyata hanya omongan politik saja tidak sampai pada praktek atau tindakan politik. Hal ini terlihat dari reaksi gubernemen Hindia Belanda atas tuntutan kaum pergerakan yang tergabung dalam *Radical Concentratie* (SI, ISDV, Insullinde dan Budi Utomo), yang mana gubernemen Hindia Belanda menunjukkan untuk menahan kecepatan perkembangan politik dengan menyatakan bahwa sebagian besar rakyat belum siap untuk melakukan hak politiknya.

Atas pengingkaran janji tersebut Hatta menyatakan :

Dari pengingkaran akan janji November itu kita belajar pengalaman yang bijaksana, bahwa tidak ada kata-kata yang dapat ditemui di dalam politik kolonial untuk suatu ide bahwa "Indonesia bebas dari Holland" (Mohammad Hatta, 1976: 10).

Dari seperangkat peristiwa-peristiwa tersebut IV menjadi yakin bahwa rakyat Indonesia dapat memperoleh keadilan jika mereka mampu melawan kekuatan.

C. Generasi Baru Mahasiswa

Seperti telah disebut di atas, bahwa perubahan Perhimpunan Indonesia dari organisasi sosial menjadi organisasi politik dipengaruhi oleh situasi dunia, dalam hal ini adalah berakhirnya Perang Dunia I. Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia I berakhir, generasi baru mahasiswa Indonesia yang datang ke negeri Belanda jumlahnya lebih banyak daripada jumlah semua mahasiswa Indonesia yang belajar di sana sampai saat itu (Ingleson ,

1993 : 3 ; Legge, 1985: 100). Dengan bernaung di bawah politik etis, pemerintah Hindia Belanda perlahan-lahan memperluas kesempatan bagi putera-putera Indonesia dari golongan atas untuk masuk sekolah dasar dan menengah berbahasa Belanda.

Lebih lanjut Ingleson menjelaskan bahwa sampai akhir Perang Dunia I, kebijakan pendidikan baru itu mulai menghasilkan lulusan yang hanya sedikit, tapi makin lama makin meningkat jumlahnya. Bagaimanapun juga, hanya ada sedikit fasilitas pendidikan akademis di Hindia Belanda dan belum ada yang memberi status profesional penuh.

Semakin bertambahnya jumlah mahasiswa yang datang ke Belanda, didorong oleh lancarnya hubungan Hindia Belanda dengan Belanda setelah Perang Dunia I. Lalu lintas menjadi lebih lancar setelah berakhirnya perang, yaitu dengan dibukanya kembali Terusan Suez.

Setelah puluhnya lalu lintas tersebut, maka dapat melalui terusan itu dan dalam waktu yang lebih cepat. Pertama-tama, yang menempuh melalui jalur itu adalah empat orang pelajar Indonesia untuk belajar di negeri Belanda, yaitu Nazir Datuk Pamuntjak, Alex Adris, Maramis, dan Ahmad Soebardjo (Sudiyo, 1989: 37).

Selain mahasiswa tersebut, generasi baru mahasiswa lain yang datang ke Belanda adalah Soetomo, Mohammad Hatta, Sartono, Ali Sastroamidjojo, Boediarto, Iwa Kusumasumantri, Iskaq yang kemudian menjadi tokoh-tokoh nasionalis Indonesia tahun 1920-an.

Generasi baru yang datang ke Belanda itu memiliki kesadaran politik yang jauh lebih tinggi daripada generasi mahasiswa sebelumnya. Banyak dari mereka telah aktif dalam organisasi pemuda ketika masih berada di Hindia Belanda dan dalam gerakan kebangsaan yang baru mulai. Misalnya Soetomo ikut mendirikan Budi Utomo dan Mohammad Hatta pernah menjadi ketua Jong Sumatramen, sementara yang lain sebelumnya aktif dalam Jong Java dan organisasi pemuda serupa.

Para mahasiswa itu kebanyakan berusia 19 atau 20 tahun sewaktu tiba di Belanda, dan kesepian serta suatu rasa keterasingan budaya merupakan masalah besar yang harus mereka tanggung. Mereka lalu menjalin persaudaraan satu sama lain serta saling membantu dan hanya sedikit bergaul dengan mahasiswa Belanda. Mahasiswa yang membawa serta istri dan keluarganya ke Belanda sering mengundang mahasiswa bujangan ke rumah mereka untuk makan-makan dan mempererat persahabatan (Ahmad Soebardjo, 1978: 119-120). Keadaan sama-sama terlempar ke dalam lingkungan yang asing membuat mereka lebih sadar untuk bangga kepada tanah air mereka. Perbedaan kedaerahan, kesukuan yang dulu dibesarkan demi kepentingan Belanda, kini ditempatkan dalam perspektif yang berbeda.

Generasi baru mahasiswa tersebut mengandalkan pengalaman mereka dalam organisasi pemuda ketika masih berada di Hindia Belanda untuk terjun ke dalam kancah politik di negeri Belanda. Antusiasme mereka untuk terjun

di bidang politik seperti telah di sebut di atas didorong oleh datangnya sejumlah tokoh politik Indonesia yang dibuang ke Belanda. Disamping itu pada awal tahun 1920 datang pula tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia yaitu Darsono, Semaun dan Abdul Muis, kehadiran mereka sangat mempengaruhi sesama teman seperjuangan yang lebih muda, apalagi Darsono dan Semaun mempunyai pengaruh yang istimewa kuat dalam IV (Ingleson, 1993: 5).

Kedatangan generasi baru mahasiswa dengan semangat baru tersebut semakin memperkuat IV memasuki bidang politik (Deliar Noer, 1991: 41). Mereka dengan cepat mendominasi IV dan menyalurkan anggotanya ke dalam kegiatan aktif sehubungan dengan masalah masa depan politik Indonesia.

Pada tanggal 19 Februari 1922, IV mengadakan rapat di Den Haag. Acara yang terpenting ialah memilih ketua baru, dan yang terpilih sebagai ketua adalah Hermen Kartawisastra (Mohammad Hatta, 1929: 126). Semua anggota pengurus baru terdiri atas mahasiswa yang belum lama tiba di Belanda (Ingleson, 1993 : 6).

Keputusan penting yang diambil dalam rapat itu adalah mengganti nama *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging* dan kelanjutannya mengganti nama *Nederlands Indie* dengan Indonesia. Dimasa itu baru dikenal dari buku Prof. Van Vollenhoven kata-kata *Indonesier* dan objektif *Indonesisch*, tetapi kata "Indonesia" sebagai nama tanah air adalah ciptaan *Indonesische Vereeniging* (Mohammad

Hatta, 1980: 9). Kemudian pada tahun 1927 baru diketahui dari karangan Dr. Kremer dalam *kolonial Weeblad*, bahwa perkataan itu dalam tahun 1850 sudah dipakai oleh seorang etnolog Inggris bernama Logan dalam karangannya yang berjudul *The ethnology of the Indian Archipelego* (Mohammad Hatta, 1979: 126).

Dalam rapat di atas juga dibicarakan tentang rencana mengeluarkan majalah sendiri. Persoalannya apakah *Indonesische Vereeniging* mengeluarkan majalah baru atau meneruskan menerbitkan majalah *Hindia Putera*, yang dahulu diterbitkan oleh *Indische Vereeniging*. Berhubung waktu sudah larut malam, diputuskan masalah itu akan dibicarakan pada rapat berikutnya (Mohammad Hatta, 1979 : 127).

Dengan demikian pada tahun 1922 pengurus yang baru terpilih mulai mereorganisasi perkumpulan dan mengubah sifat-sifat, tujuan dan kegiatannya. Mr. Soenario mantan anggota PI juga membenarkan hal ini, "setelah tahun 1922 organisasi mahasiswa itu berubah menjadi organisasi politik"(Soenario dalam Nagazumi . 1986 : 34).

Selanjutnya pada bulan Januari 1923 diadakan rapat umum anggota *Indonesische Vereeniging*. Tujuannya untuk mengganti pengurus. Pengurus lama, Hermen Kartawisastra meletakkan jabatan. Iwa Kusumasumantri dipilih sebagai ketua baru (Mohammad Hatta, 1979: 144).

Dalam pidato pengangkatannya ia menjelaskan bahwa

organisasi yang sudah dibenahi itu mempunyai tiga asas pokok yang harus diberi tekanan yang makin lama makin kuat. Pertama, Indonesia ingin menentukan nasib sendiri. Kedua, agar dapat menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Ketiga, dengan tujuan melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu. Selanjutnya ia menekankan agar para mahasiswa terus mengikuti perkembangan politik di Indonesia dan menyatakan bahwa cara tercepat untuk mencapai ketiga sasaran itu jika semua kelompok Indonesia bersatu dalam perjuangan bersama melawan Belanda :

Masa depan bangsa Indonesia semata-mata dan hanya terletak dalam kelembagaan dari bentuk pemerintahan yang bertanggungjawab kepada rakyat dalam artian yang sebenarnya, karena hanya bentuk pemerintahan semacam itu yang dapat diterima oleh rakyat. Untuk tujuan tersebut setiap orang Indonesia harus berjuang sekuat tenaga, dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri dan bebas dari "bantuan" asing. Setiap penyelewengan dari kekuatan Indonesia, dalam bentuk apapun, amat dicela, karena hanya kerjasama paling kuat dari putra-putri Indonesia yang dapat membawa kepada pencapaian tujuan bersama itu (dikutip dalam Ingleson, 1993: 7; Mohammad Hatta, 1979: 146).

Suatu artikel dalam *Hindia Putera* pada bulan November 1923 menyatakan bahwa perjuangan nasional seharusnya menjadi lebih bersemangat jika kaum intelektual muda memainkan peran penting di dalamnya. Hanya dengan percaya kepada kekuatan sendiri, cita-cita mereka akan tercapai :

Tetapi, kepada siapa tugas pembangunan itu harus diserahkan ? Hanya ada satu jawaban yang tepat : Pemuda Indonesia yang harus melaksanakannya. Pemuda Indonesia mengambil alih tugas tersebut dalam masa-masa pergolakan ini, dan bersedia menggantikan generasi lebih tua yang telah memenuhi tujuan hidupnya dan generasi muda itu berkeinginan untuk berhasil

dan dengan keyakinan memulai programnya untuk masa depan. Karena Pemuda Indonesia adalah penyangga masa depan, dan karenanya bertanggung jawab atas kondisi rakyat kita.

Artikel itu dilanjutkan dengan :

Gerakan kita tidak berdasarkan pada kebencian terhadap penguasa asing, tetapi pada cinta terhadap rakyat kita sendiri dan sesuatu yang dibangun atas dasar cinta tidak dapat dihancurkan. Cinta menentang kebencian dan kekejaman, dan memberi kekuatan untuk bekerja dengan tekun demi kebahagiaan mereka yang dicintai. Tetapi pada waktu itu, dari pemuda Indonesia tidak hanya dituntut cinta, tetapi juga dituntut untuk tetap menjaga tugas itu jelas tercermin dalam tindakan mereka dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Kita harus lebih dahulu terbiasa dengan pendidikan dalam suatu sekolah yang keras aturannya, agar dapat mengajukan tuntutan yang berat terhadap diri sendiri, karena perjuangan politik untuk membebaskan rakyat kita memerlukan banyak orang. Orang-orang itu adalah mereka yang bersedia memberikan dirinya sendiri dan rela mengorbankan segala sesuatu untuk kemerdekaan bangsanya. Seperti kata penyair patriot Hongaria, "Untuk dapat hidup orang membutuhkan cinta dan kebebasan. Demi cinta kuserahkan hidupku dan demi kebebasan kuserahkan cintaku." (dikutip dalam Ingleson, 1993: 24).

Kegiatan para mahasiswa yang secara radikal disalurkan dalam aktivitas politik itu lebih jauh tercermin dalam perubahan jurnalnya, pada bulan Maret 1924. Jurnalnya berganti nama menjadi Indonesia Merdeka dari *Hindia Putera*.

Kata pengantar edisi pertama mengemukakan kesamaan antara penjajahan Indonesia oleh Belanda dan pendudukan Belanda oleh Spanyol serta memberi argumentasi bahwa orang Indonesia juga tidak lagi bersedia menyebut negaranya Nederland-Spanyol. Sejarah Belanda dan cerita tentang keberanian orang Belanda menentang Spanyol, kemudian menyalakan semangat perlawanan mereka terhadap

pemerintahan asing. Kata pengantar itu menjelaskan :

Dalam kata "Merdeka" terkandung ungkapan tentang tujuan dan usaha keras kami, dan mulai sekarang dan seterusnya. "Indonesia Merdeka" akan menjadi semboyan perjuangan Pemuda Indonesia. "Merdeka" adalah cita-cita umum semua umat manusia; setiap bangsa mempunyai keinginan kuat untuk hidup merdeka. Gagasan tentang kemerdekaan tidak berbeda dari satu bagian dunia ke bagian dunia lainnya. "Kemerdekaan adalah cita-cita umat manusia dan bukan cita-cita Barat; seluruh bumi ini adalah kuil kemerdekaan." (dikutip dalam Ingleson, 1993: 8).

Analisis Ingleson tentang Perhimpunan Indonesia, dalam mengambil frasa "Indonesia Merdeka" sebagai slogannya, *Indonesische Vereeniging* mengemukakan bahwa itu merupakan cita-cita yang jauh lebih radikal daripada *Indie los van Nederland*, slogan dari *Indische Partij* dan PKI, yang sampai saat itu merupakan partai politik Indonesia yang paling radikal. Slogan yang disebut belakangan masih mengandung kemungkinan adanya beberapa hubungan dengan Belanda, tetapi cita-cita untuk merdeka itu sekarang berpadu dengan cita-cita untuk berbangsa Indonesia.

Indonesische Vereeniging adalah salah satu organisasi nasionalis Asia yang paling awal menuntut kemerdekaan yang segera dan tidak bersyarat (Ingleson, 1993: 9). Radikalisme para pemuda nasionalis itu terutama merupakan refleksi dari gerakan di Indonesia yang sampai saat itu masih terpecah-pecah dan belum berhasil mengadakan dialog dengan pemerintah Belanda, apalagi memperoleh tanggapan konstruktif dari pemerintah Hindia Belanda tentang tuntutan untuk secara bertahap menyiapkan pemerintahan sendiri. Para anggota *Indonesische Vereeniging* marah dan jengkel

menghadapi kerasnya pendirian Belanda dan mereka menghapus semua kebijakan sebelumnya, dan lebih mendukung tuntutan radikal untuk "Merdeka Sekarang" (Arnold Mononutu, 1980: 26). Hatta juga membenarkan hal ini :

Dengan tegas Perhimpunan Indonesia menyatakan keluar dan ke dalam dengan perantaraan majalahnya "Indonesia Merdeka", bahwa politik angkat tangan dan minta-minta kepada Pemerintah Belanda harus ditinggalkan. Perjuangan bangsa untuk mencapai Indonesia Merdeka harus didasarkan pada "*strijd op eigen kracht en kunnen*" - berjuang atas kekuatan dan kecakapan sendiri. Perhimpunan Indonesia menyatakan sebagai keyakinannya, bahwa hanya aksi yang berdasarkan non-cooperation - tidak bekerja sama dengan si penjajah, yang sanggup mengembalikan kepada rakyat kepercayaan atas dirinya sendiri dan menghidupkan dalam dada rakyat keinsafan politik. Politik cooperation, politik kerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda, disebut mengebiri diri sendiri dan tidak sesuai dengan pendirian bangsa yang tahu akan harga diri. Apabila bangsa kita mau mencapai kemerdekaan, hendaklah ia membangun disebelah Nederlandsch-Indie bangunan Belanda, perumahan nasional sendiri yang bernama Indonesia (Mohammad Hatta, 1966 : 9).

Untuk memberi tekanan pada perubahan dan untuk lebih keras dalam mempropagandakan tujuan ideologinya, pada bulan April 1924 *Indonesische Vereeniging* menerbitkan sebuah buklet untuk memperingati 15 tahun pertamanya organisasi itu. Sampul dari buklet tersebut menggambarkan apa yang bakal dijadikan simbol gerakan nasionalis, yaitu sebuah bendera merah putih yang berkibar dan kepala kerbau ditengahnya (Ingleson, 1993: 9).

Buku peringatan *Indonesische Vereeniging* 1908-1923 berisi 13 artikel, meliputi berbagai masalah mulai dari sejarah lengkap *Indische Vereeniging* dan reorganisasinya pada tahun 1922 sampai penjelasan tentang berbagai

aspek program kelompok tersebut.

Adapun isi buku peringatan *Indonesische Vereeniging* itu ialah : 1. *Terugblik* (meninjau ke belakang) ditulis oleh A.A. Maramis. 2. *Opgang* (maju naik) ditulis oleh Ahmad Soebardjo. 3. *Neuwe banen* (rintisan-rintisan baru) ditulis oleh Soekiman. 4. *Indo-Dunia* ditulis oleh Mohammad Hatta. 5. *Nationale geschiedenis* (sejarah nasional) ditulis oleh Nazif. 6. *Indonesia ditengah-tengah revolusi Asia* tulisan Mohammad Hatta. 7. *Het nationale recht* (hukum nasional) ditulis oleh Nazif. 8. *De gang des tijds* (jalannya waktu) ditulis oleh Soelaiman. 9. *Vertaling van Astabrata* (salinan astabrata) ditulis oleh Poerbatjaraka. 10. *Kerjakanlah sendiri pendidikan dan pengajaran anak-anak kita*. ditulis oleh Ismail. 11. *300 jaren overheersching* (300 tahun penjajahan) ditulis oleh Darmawan Mangoenkoesoemo. 12. *De vak vereeniging in Indonesia* (sarekat sekerja di Indonesia) ditulis oleh Gatot. 13. *Communistische invloeden in het Oosten* (pengaruh komunisme di Timur) ditulis oleh Koesoema Soemantri (Ahmad Soebardjo. 1975: 27-29).

Dua tulisan Mohammad Hatta, *Indonesia dalam persekutuan dunia dan Indonesia di tengah-tengah revolusi Asia* menunjukkan pemikiran yang turut memberi pengaruh bagi peletakan dasar-dasar Perhimpunan Indonesia dalam tahun 1924 dan 1925. Kemudian kedua karangan itu oleh Hatta dikembangkan untuk mengemudikan Perhimpunan Indonesia sebagai ketua, juga dalam memberikan arah perjuangan

di tanah air (Deliar Noer, 1990 : 47).

Tulisan-tulisan di atas mendapat reaksi dari Belanda, seperti dinyatakan Hatta, "Terbitnya Buku Peringatan *Indonesische Vereeniging* 1908-1923 dikritik dengan hebat oleh Pers Belanda. Ada yang mengatakan bahwa *de Inlandsche students* sudah dihinggapi oleh semangat revolusioner yang susah mengikisnya kembali (Mohammad Hatta, 1979: 159).

Indonesische Vereeniging resmi menjadi organisasi politik yang radikal pada tanggal 11 Januari 1925 (Mohammad Hatta, 1979: 168). Pada rapat umumnya bulan itu, salah seorang anggotanya, Hadi mengusulkan agar *Indonesische Vereeniging* dikembalikan pada ciri aslinya yaitu sebuah perkumpulan sosial yang netral bagi mahasiswa Indonesia dan agar diciptakan sebuah organisasi politik sebagai sub organisasi dari *Indonesische Vereeniging* sebagai wadah bagi mereka yang ingin terjun dibidang politik (Notulen Rapat Pengurus PI 1925-1926 seperti dikutip Ingleson, 1993: 9).

Usul tersebut hanya mendapat dukungan kecil. Para pengurus mendapat tantangan kuat dan dalam pidato mereka, anggota terkemuka seperti Nazir Pamuntjak, Sartono dan Semaun menentang usul tersebut. Mereka mengajukan argumentasi bahwa selama 15 tahun bersikap non politik, organisasi itu tidak mencapai apa-apa dan bahwa sikap netral atau mau bekerjasama dengan penguasa kolonial dalam kenyataannya adalah pengkhianatan, seperti dinyatakan Mohammad Hatta. "Politik kerjasama dengan Belanda, berarti

memperkuat Hindia Belanda. Sebaliknya, diperlukan aksi kuat untuk melawannya" (Mohammad Hatta, 1966: 9). Akhirnya usul untuk didirikannya sub organisasi yang bergerak di bidang politik itu ditolak karena itu hanya akan membawa perpecahan dalam organisasi.

Dalam rapat itu juga PI menetapkan empat pikiran pokok sebagai ideologinya. Dengan memperhatikan masalah sosial ekonomi, ideologi itu menempatkan kemerdekaan sebagai tujuan politik yang utama : *kesatuan nasional* - perlunya mengesampingkan perbedaan khas yang bersifat kedaerahan serta membentuk suatu front kesatuan melawan Belanda untuk menciptakan suatu negara kebangsaan Indonesia yang bersatu dan merdeka ; *solidaritas* - menghindarkan perbedaan antar orang Indonesia sendiri, menyadari besarnya pertentangan kepentingan antara penjajah dan yang dijajah, dan perlunya kaum nasionalis mempertajam konflik antar ras kulit sawo matang dan ras kulit putih : *non ko-operasi* - perlunya menyadari bahwa kemerdekaan tidak dapat diberikan secara cuma-cuma oleh Belanda tapi harus direbut oleh bangsa Indonesia dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri, dan karenanya tidak perlu mengindahkan dewan perwakilan yang didirikan oleh pihak kolonial, seperti *Volksraad* ; *swadaya*, menolong diri sendiri - dengan mengandalkan kekuatan sendiri mengembangkan suatu alternatif struktur nasional, sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang kuat berakar dalam masyarakat pribumi dan sejajar dengan pemerintah kolonial (Ingleson, 1993 : 16).

Dalam rapat berikutnya yang diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 1925 nama *Indonesische Vereeniging* diganti menjadi "Perhimpunan Indonesia" (Mohammad Hatta, 1979: 175). Nama baru itu adalah suatu kelanjutan dari memakai "Indonesia Merdeka" untuk majalahnya. Perubahan itu dimaksudkan untuk memurnikan organisasi tersebut dan mengajukan argumentasi bahwa prinsip-prinsip Perhimpunan Indonesia sejak dulu sudah jelas, maka tidak ada lagi tempat dalam organisasi tersebut bagi orang yang secara terang-terangan mengajukan prinsip-prinsip sebaliknya (Ingleson, 1993: 10-11).

Dengan demikian tidak ada tempat lagi bagi mereka yang bertempur di pihak kekuatan kolonial. Hal itu dibuktikan dengan pemecatan dua anggota Perhimpunan Indonesia yang dianggap terlalu akomodatif terhadap pihak Belanda, yaitu Noto Soeroto dan J.B. Sitanala. Noto Soeroto dianggap pengkhianat karena menulis sebuah artikel yang memuji Gubernur Jenderal Heutz, orang yang memimpin penguasaan Belanda terakhir di Aceh, demikian juga J.B. Sitanala, ia juga menulis artikel dalam surat kabar yang dianggap sangat akomodatif terhadap Belanda.

Sebuah artikel dalam *Indonesia Merdeka* terbitan Februari 1925 kedengarannya seperti bunyi terompet maju perang. Di bawah judul *Strijd aan Twee Front* ("Perjuangan di Dua Front"), artikel itu menyatakan bahwa perjuangan akan lebih berat dan lebih pahit, tetapi pemuda Indonesia tidak dapat menghindarinya (dikutip dalam Ingleson, 1993:

11). Pemuda Indonesia harus bersedia mengorbankan semua daya dan kependaiannya jika ingin mencapai kemerdekaan. Perjuangan itu tidak hanya melawan Belanda, tapi juga melawan sesama orang Indonesia yang menentang kaum nasionalis. Pemuda Indonesia tidak boleh ragu berhadapan dengan saudara-saudara sendiri :

Meskipun kita ingin sekali menghindari peperangan melawan saudara kita sendiri, jalannya sejarah dunia membuktikan bahwa ini tidak mungkin. Tampaknya inilah tragedi bangsa-bangsa tertindas, bahwa darah saudara kita sendiri harus dicurahkan untuk mencapai kemerdekaan. Kapal kita yang kecil ini akan harus mengarungi lautan darah dan air mata dengan berpedoman keinginan besar untuk merdeka sebagai kompasnya (dikutip dalam Ingleson, 1993: 11-12).

Jadi perubahan PI dari organisasi sosial menjadi organisasi politik radikal pada mulanya dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin *Indische Partij* yang dibuang ke Belanda dan kemudian menjadi anggota IV. Pengaruh politik mereka semakin kuat dengan diterbitkannya majalah *Hindia Putera* oleh Soewardi Suryaningrat.

Semangat patriotisme yang sudah mulai tumbuh di IV semakin kuat ketika mereka merasa kecewa atas usaha kerja sama dengan Belanda. Kekecewaan itu tampak jelas dengan diingkarinya janji November. Rasa kecewa tersebut menyadarkan IV, bahwa mereka harus percaya pada diri sendiri.

Kesadaran politik IV yang sudah mulai bangkit karena pengaruh pemimpin-pemimpin *Indische Partij* dan kekecewaan atas kerja sama dengan Belanda semakin meningkatkan corak politiknya setelah kedatangan generasi baru mahasiswa Indonesia yang memiliki kesadaran politik lebih tinggi

dari pada generasi mahasiswa sebelumnya. Generasi baru itulah yang selanjutnya mengarahkan IV menjadi organisasi politik yang radikal.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

KEGIATAN POLITIK PERHIMPUNAN INDONESIA DALAM MENYEBARKAN IDEOLOGINYA DAN REAKSI PEMERINTAH BELANDA

A. Kegiatan Politik Perhimpunan Indonesia Di Eropa

1. Propaganda Perhimpunan Indonesia di Perancis

Para pemimpin Perhimpunan Indonesia (PI) menyadari bahwa mahasiswa Indonesia di Belanda merupakan intelektual elit baru bagi tanah airnya, mereka mengembangkan persepsi kuat tentang peranan organisasi mereka di negeri Belanda dan dalam kerangka yang lebih luas dari gerakan nasionalis secara keseluruhan.

Dengan persepsi yang kuat tersebut, perjuangan mereka, sejak awal tahun 1925 telah diformulasikan secara jelas. Program-programnya meliputi perjuangan untuk tanah air dan juga ditunjang dengan program memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional.

Pada waktu PI diketuai oleh Soekiman, telah disusun program-program secara tegas dan lebih intensif. Pasal-pasal dalam program kerja PI dengan jelas mencerminkan kesadaran PI, bahwa nasionalisme Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, yaitu terlihat pada pasal 1, 2 dan 3. Pasal 1, mempropagandakan asas-asas perhimpunan lebih intensif terutama di Indonesia. Pasal 2, menarik perhatian internasional pada masalah Indonesia. Pasal 3, perhatian para anggota dibangkitkan untuk soal-soal internasional dengan ceramah-ceramah dan bepergian ke luar negeri

(Soenario, 1970: 33; Sudiyo, 1989: 61).

Untuk melaksanakan program kerja PI, terutama pasal 2 dan 3 pada bulan Januari 1925 PI berusaha untuk mencari hubungan dengan organisasi-organisasi mahasiswa Asia. Untuk keperluan itu dikirim Arnold Mononutu ke Paris. Dikirimnya Arnold Mononutu ke Paris sebagai wakil dari gerakan mahasiswa Indonesia di Belanda, karena ia anggota PI yang fasih berbahasa Perancis dan juga mempunyai pengalaman diplomatik (Ahmad Soebardjo, 1978: 38).

Lebih lanjut Ahmad Soebardjo menjelaskan, bahwa tugas Arnold Mononutu di Perancis adalah mencari hubungan dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara yang dijajah di Asia dan Afrika dan membicarakan mengenai keadaan-keadaan di masing-masing negaranya, dalam soal gerakan nasional, jika ada soal-soal mengenai lapangan ekonomi, bagaimana menghadapinya dan sebagainya, serta memberi laporan kepada PI di Negeri Belanda.

Dengan pengalaman diplomatik di atas Mononutu cepat memperoleh hubungan dengan pemuda-pemuda India, Cina dan Annam. Hasil kerjasama itu, adalah berdirinya sebuah organisasi pemuda Asia, bernama *Association Pour l'Etude des Civilisation Orientales*, perkumpulan untuk mempelajari peradaban-peradaban Timur. Perkumpulan itu mengadakan hubungan dengan perkumpulan kaum ahli kebudayaan dan seni di Paris, yang besar pengaruhnya dalam masyarakat, sehingga Mononutu dapat berhubungan dengan beberapa orang terkemuka dari perkumpulan ahli kebudayaan dan seni

tersebut (Mohammad Hatta, 1979 : 173).

Sebagai hasil hubungan Mononutu, perkumpulan itu akhirnya mengundang PI untuk mengadakan pertunjukkan tari Jawa pada bulan Desember 1925 di Paris. PI menerima undangan itu dan sebagai penari dikirim ke Paris Soepomo dan Wirjono Prodjodikoro, keduanya mahasiswa hukum di Leiden.

Tari-tarian Jawa yang mereka pertunjukkan sangat dihargai oleh penonton Paris, sehingga Dr. Loudon pada waktu itu Duta Besar Belanda di Paris mengundang Soepomo dan Wirjono mengulangi lagi pertunjukkan mereka di Paris untuk tahun berikutnya.

Pertunjukkan tersebut dipandang oleh PI sebagai pembuka jalan untuk melaksanakan propaganda politik, supaya dunia internasional mengetahui adanya Indonesia yang menuntut kemerdekaan.

2. Perhimpunan Indonesia Dalam Kongres Demokrasi Internasional di Bierville

Propaganda PI ke dunia internasional menjadi semakin luas sejak dipimpin Mohammad Hatta. Hal ini tidak berlebihan karena ia mempunyai pandangan dan ketajaman berpikir yang luas dan jauh ke depan. Mengenai usaha Hatta dalam mempropagandakan masalah Indonesia, Mavis Rose yang menganalisis biografi politik Hatta mengatakan :

Ia terlalu sibuk merancang cara-cara untuk meningkatkan efektifitas PI sebagai ujung tombak nasionalis, ia terus mengiklankan, "Konsep Indonesia"

(Rose, 1991: 54).

Usaha Hatta mempropagandakan konsep Indonesia tersebut dilakukannya dengan menulis dalam Indonesia Merdeka pada awal kepemimpinannya tahun 1926 dengan judul Propaganda Kita di Luar Negeri (Soenario, 1970: 33).

Dalam propaganda PI di luar negeri, menurut Hatta peranan Arnold Mononutu yang dikirim ke Paris sangat besar, seperti diadakannya kembali hubungan dengan beberapa orang mahasiswa Asia dan bekas mahasiswa Asia Lepas Sarbone. Antara lain dengan Duong van Giauw, seorang pengacara asal Annam, Topchybashi asal Azerbaijan, Tung Mo asal Tiongkok dan K.M. Panikar seorang wartawan dari India.

Lebih lanjut Hatta menjelaskan bahwa pada waktu itu gerakan demokrasi internasional di bawah pimpinan bekas anggota parlemen Perancis, Marc Sangnier sedang menyiapkan suatu kongres untuk perdamaian. Kongres itu akan diadakan di Bierville, suatu kota kecil dekat Paris, pada bulan Agustus 1926. Lima orang mahasiswa dan bekas mahasiswa tersebut mengajukan surat permintaan kolektif kepada Marc Sangnier, supaya golongan mereka yang berasal dari Asia diterima ikut serta pada kongres tersebut. Dalam waktu yang cepat mereka mendapat balasan, bahwa kumpulan mereka diterima hadir pada kongres tersebut dan akan mendapatkan kesempatan ikut bicara di sana.

Hasil aktivitas Arnold Mononutu di Paris diberitahukan kepada PI dalam suatu rapat anggota di Den

Haag. Oleh karena pada bulan Juli 1926 Hatta akan pergi ke Paris, PI memutuskan, bahwa ketua PI sendiri yang akan mewakili mahasiswa Indonesia pada kongres di Bierville. Sebenarnya Arnold Mononutu juga akan diikutsertakan dalam kongres tetapi karena kekurangan biaya ia tidak dapat ikut.

Pada akhir bulan Juli 1926 Hatta berangkat ke Paris dan menginap di hotel *Du Progres* yang berfungsi ganda sebagai kantor cabang PI (Rose, 1991: 54).

Di Paris Hatta bertemu dengan wakil-wakil Asia seperti Duong van Giouw, Tung Mo, Topchybashi dan Panikar. Hatta menjadi perantara utusan-utusan Asia yang sebagian hanya tahu bahasa Inggris seperti Panikar, sedang yang lain hanya bisa berbicara Perancis, seperti Duong van Giouw, Topchybashi dan Tung Mo, sedang Hatta menguasai kedua bahasa itu.

Para mahasiswa Asia tersebut membicarakan hal-hal yang akan dikemukakan nanti pada kongres demokrasi di Bierville. Dalam hal ini Hatta mengatakan dalam biografinya :

Aku terangkan, bahwa aku datang ke sana terutama untuk memperkenalkan nama negeriku Indonesia kepada dunia internasional (Mohammad Hatta, 1979: 201).

Pada tanggal 14 Agustus 1926, sehari sebelum kongres dimulai, Hatta bersama dengan wakil-wakil Asia berangkat ke Bierville. Kongres Demokrasi Internasional di Bierville itu dihadiri 31 bangsa yang terdiri dari berbagai delegasi

(Soenario, 1970 : 39).

Masing-masing delegasi mendapat dua giliran bicara, pada waktu pembukaan dan penutup. Di antara dua giliran itu ada pertemuan diskusi, mempersoalkan berbagai masalah yang dikemukakan dalam kongres. Walaupun wakil dari Asia merupakan delegasi gabungan tetapi masing-masing golongan dari Asia mendapat dua giliran bicara seperti yang lain. Oleh karena itu Hatta juga dapat bicara dua kali, pada pembukaan dan penutup, yang mana seperti telah disebut di atas ia sebagai wakil PI akan memperkenalkan nama Indonesia kepada dunia internasional. Bahkan menurut Soenario, di sana Hatta tidak hanya sekedar memperkenalkan nama Indonesia tetapi juga secara terang-terangan mengajukan tuntutan kemerdekaan Indonesia.

Delegasi Asia yang terkenal sebagai *delegation asiatique*, dapat memajukan dua resolusi yang diterima oleh kongres dengan suara bulat. Eunyi kedua resolusi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kongres, setelah memperhatikan bahwa krisis ekonomi dunia tidak dapat diatasi dengan tiada pertolongan Asia, bahwa pertolongan itu tidak mungkin apabila bangsa-bangsa Asia tidak diberi kebebasan untuk mengerjakan tugas rekonstruksi peradaban dan perdamaian; memperhatikan lagi bahwa penindasan bangsa-bangsa bertentangan dengan jiwa perdamaian. Meminta, sebagai satu syarat mutlak untuk kerjasama bangsa-bangsa di dunia, kehormatan yang pasti kepada hak

bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri dengan tiada membedakan ras dan kepercayaan.

- 2) Memperhatikan, bahwa perdamaian dunia yang kekal tidak mungkin dengan tiada membebaskan bangsa-bangsa yang tertindas. Kongres memberi kekuasaan kepada masing-masing delegasi bekerja di negeri mereka masing-masing untuk kemerdekaan bangsa yang tertindas (Mohammad Hatta, 1979: 204).

Penerimaan resolusi itu berarti tidak saja mengakui hak tiap-tiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri, tetapi juga mengesahkan setiap perjuangan untuk menjatuhkan kekuasaan kolonial.

Disamping resolusi di atas, melalui kongres demokrasi internasional menurut Hatta, langkah pertama untuk memperkenalkan tanah air Indonesia di luar negeri dibuat dengan berhasil. Nama "Indonesia" tidak perlu dimajukan dengan resolusi. Dalam hal ini ia mengatakan :

Selama aku di sana dan setelah mendengar pidatoku pada pembukaan kongres itu, semuanya menyebut Indonesia. Orang-orang Belanda, yang pada pidato permulaan masih menyebut "Hindia Belanda", kata itu tidak diulang mereka lagi, dalam perdebatan maupun dalam pembicaraan lainnya. Dalam tulisan-tulisan mereka ke luar, kepada kawan dan keterangan umum, mereka sebut "Indonesia". Apalagi setelah bertukar pikiran dengan aku. Dalam agenda pimpinan kongres, nama Indonesia telah terekam, tidak dapat tertukar kembali dengan *Indes Neerlandaises* (Mohammad Hatta, 1979: 203-204).

Dengan demikian dalam kongres itu Hatta berhasil menuntut pengakuan sidang untuk mempergunakan kata Indonesia dan bukan Hindia Belanda, sehingga baik dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tulisan sehubungan dengan kongres itu maupun dalam pembicaraan-pembicaraan, kata Indonesia yang dipergunakan. Hal ini merupakan kemenangan moral bagi Hatta sebagai wakil PI, apalagi wakil Belanda yang turut hadir pada awal kongres menolaknya.



3. Hubungan Dengan Komunis

Dalam usaha propaganda ke dunia internasional PI menjalin hubungan dengan pihak komunis. Hubungan ini dimaksudkan untuk memperluas dan memperkuat dalam usaha propaganda tersebut.

Dalam pandangan Hatta, komunis dalam hal ini komintern bermanfaat, baik bagi dukungan moral maupun melalui berbagai gerakan kemerdekaan internasional. Dengan lebih tegas ia mengatakan:

Benar-benar hanya dalam lingkungan sayap kiri ekstrim bahwa konsep tentang "Indonesia" dipakai secara serius dan dipromosikan (Mohammad Hatta dalam Robb-

Martens, seperti apa yang dikatakan Hatta tersebut benar-benar terbukti dengan keikutsertaan PI dalam kongres demokrasi internasional yang disponsori oleh Comintern (Ingleson, 1993: 48), yang mana PI merupakan suatu partai Indonesia pertama yang diterima dalam forum internasional sebagai wakil Indonesia dan bukan sebagai wakil Hindia Belanda dan di forum itu PI berhasil dengan baik mempropagandakan nama Indonesia.

Hubungan dengan komunis dapat terjadi karena pada

waktu itu pandangan Hatta tentang orang-orang komunis Indonesia tidak negatif. Menurutnya orang-orang komunis Indonesia itu masih bersifat nasional yang akan berguna dalam rangka mewujudkan persatuan Indonesia. Dalam tingkat pertama, tujuan mereka adalah juga sama dengan kalangan nasionalis lain, yaitu Indonesia merdeka. Apalagi Moskow dalam tahun 1925 melarang mereka untuk menentang kaum nasionalis revolusioner, justru menyuruh memberi bantuan dalam aksi-aksi yang dilancarkan untuk mencapai kemerdekaan penuh. Lebih lanjut Hatta menyatakan bahwa orang komunis Indonesia sebenarnya nasionalis yang terselubung. Sejauh mereka tetap berada di bawah bendera perjuangan kelas dari kawan-kawan seperjuangan mereka di Eropa, maka ini sama dengan perjuangan ras yang kita beri tekanan, dan perlu dicatat, bahwa mereka tidak dan belum pernah menyerang kapitalis Indonesia. Itu dapat dimengerti karena mereka pada dasarnya nasionalis, sehingga merasakan ikatan daerah yang kuat sekali dengan kita (dikutip dalam Ingleson, 1993: 43-44).

Alasan amat penting mengapa PI mau mengadakan hubungan dengan organisasi yang dikendalikan komunis adalah pernyataan kebijakan Comintern yang mendukung gerakan nasionalis non komunis, seperti telah disebut di atas. Menurut Hatta selama Comintern berpegang pada kebijakan itu, PI melihat bahwa kerjasama dengan organisasi yang disponsori Comintern cukup bermanfaat, seperti keikutsertaan PI dalam Kongres Demokrasi

Internasional di Bierville.

Bahkan PI selama periode yang singkat mempunyai dua wakil resmi dalam pengurus Comintern di Moskow, yaitu Semaun dan Iwa Koesoemasoemantri. Mereka ditunjuk pada tanggal 8 November 1925, tetapi hanya sampai tahun 1926 ketika keduanya keluar dari keanggotaan PI (Resolusi PI untuk menunjuk Semaun dan Iwa Koesoemasoemantri sebagai wakil ke Moskow, 8 November 1925 seperti dikutip Ingleson, 1993: 48). Penunjukkan itu tentu tidak lepas dari strategi PI dalam mempropagandakan ideologi ke dunia internasional, khususnya kepada Comintern.

Suatu langkah penting dari PI dalam propaganda ke luar negeri, sekaligus dalam memimpin gerakan kebangsaan Indonesia ke arah persatuan nasional terungkap dari konvensi dengan Semaun yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 1926. ketika PI memanfaatkan situasi hancurnya Partai Komunis Indonesia, setelah gagal dalam revolusinya pada tahun 1926. Hasil dari konvensi tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1. PI, yang harus berkembang menjadi suatu partai rakyat nasional Indonesia, bertekad untuk giat di dalam bidang sosial politik demi kepentingan rakyat Indonesia. PI harus mengambil tugas memberi perintah tertinggi dan bertanggung jawab penuh untuk pergerakan rakyat di Indonesia. Bidang sosial meliputi pendidikan rakyat, kesehatan rakyat dan segalanya yang berguna untuk memperkuat tenaga rakyat.

Pasal 2. PKI mesti mengakui pimpinan PI sebagai yang tertulis dalam pasal satu dari konvensi ini, dan mesti memberikan kepercayaan sepenuhnya. PKI dan organisasi-organisasi yang berada di bawah pimpinannya berjanji tidak sekali-kali akan mengadakan oposisi terhadap pergerakan rakyat nasional yang dipimpin oleh PI selama PI konsekuen menjalankan politik menuju kemerdekaan Indonesia.

Pasal 3. Percetakan koran yang selama ini dikuasai oleh PKI harus diserahkan kepada PI dengan persyaratan yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 4. Konvensi ini dicetak dalam enam lembar, masing-masing pihak memperoleh tiga lembar (Mohammad Hatta, 1979: 207).

Konvensi itu ditandatangani oleh Semaun wakil PKI dan Hatta wakil PI.

4. Perhimpunan Indonesia Dalam Kongres Anti Penindasan Kolonial

Setelah sukses mempropagandakan Indonesia melalui Kongres Demokrasi Internasional, pada tanggal 10-15 Februari 1927 PI mengirimkan wakil-wakilnya, dengan Hatta sebagai ketua delegasi bersama dengan Nazir Pamuntjak, Gatot Mangkuprodo dan Ahmad Soebardjo ke Kongres Anti Penindasan Kolonial yang diselenggarakan oleh Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Brussel, sebuah organisasi yang didponsori Comintern (Ingleson,

1993: 48; Mohammad Hatta, 1979: 208-209; Deliar Noer, 1991: 58). Dalam kongres itu PI mewakili Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan (PPPKI) atau mewakili konsentrasi nasional Indonesia (Deliar Noer, 1991 : 58). Wakil dari Indonesia lainnya yang ikut dalam kongres tersebut adalah Semaun yang mewakili Sarekat Rakyat.

Kongres yang diselenggarakan tidak lama setelah pemerintah Hindia Belanda menumpas revolusi PKI itu memberi PI suatu peluang bagus untuk secara terang-terangan mengemukakan keinginannya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kongres tersebut kemudian menerima resolusi yang diajukan oleh delegasi PI yang melukiskan suatu gambaran suram dari situasi ekonomi dan politik di Indonesia. Dan sehubungan dengan revolusi PKI, mengimbau amnesti umum bagi semua tahanan politik (Ingleson, 1993: 49).

Sebagai tindak lanjut kongres memutuskan untuk memohon kepada pemerintah Belanda agar diijinkan membentuk suatu komisi yang ditunjuk untuk masuk ke Jawa dan Sumatera dengan tujuan membuat laporan tentang apakah kekacauan tersebut disebabkan oleh revolusi komunis atau berpangkal dari kesengsaraan sosial ekonomi rakyat (Mohammad Hatta, 1979 : 211).

Atas saran Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pemerintah Belanda menolak permohonan itu. Namun bagaimanapun, kongres Brussel itu merupakan salah satu

forum propaganda yang amat penting bagi PI. Kongres itu memungkinkan para pemimpin PI mempromosikan asas-asasnya dan dapat bertemu dengan kaum nasionalis Asia dan Afrika, seperti Nehru yang mewakili Kongres Nasional India, Hafiz Ramadhan Bey dari Mesir, Senghor dari Senegal dan delegasi Kuomintang dari Cina. Pertemuan sesama tokoh nasionalis itu menjadi sangat penting bagi mereka, karena dari pertemuan itu dapat untuk saling menimba pengalaman satu dengan yang lain dalam perjuangannya.

Dalam laporannya tentang kongres tersebut Hatta mengemukakan :

Sekarang Indonesia lebih dikenal daripada sebelumnya dan diakui dalam masyarakat dunia. Kita telah menjalin tali persahabatan dengan wakil dari bangsa-bangsa terjajah dan tertindas lainnya yang nilainya akan abadi pada masa mendatang (dikutip dalam Ingleson, 1993: 49).

Kongres itu kemudian membentuk suatu organisasi Liga Menentang Imperialisme dan untuk Kemerdekaan Nasional Rakyat Tertindas, yang berkedudukan di Paris, yang mana Hatta terpilih untuk duduk dalam presidium.

PI tidak hanya menjadi anggota liga tersebut, tetapi juga membantu pembentukan Liga Cabang Belanda pada bulan Juli 1927. Bahkan sekretariat perwakilan-perwakilan itu segera dikuasai PI. Liga Cabang Belanda sering menyelenggarakan pertemuan untuk membahas situasi penjajahan, terutama di Indonesia, dan pertemuan itu dimanfaatkan PI sebagai forum lain untuk propagandanya. Menurut Ingleson hasil yang paling mencolok adalah

jurnalnya yang terbit dua minggu sekali. *Recht en Vrijheid* (Keadilan dan Kemerdekaan), diterbitkan antara bulan September 1927 dan Juni 1928. Artikel utama dalam nomor perdananya menyajikan ringkasan dari tujuan PI :

Pekerjaan kami, yang pertama dan utama, adalah sekuat tenaga memprotes dan melawan penganiayaan, pemerasaan dan perlakuan buruk terhadap rakyat jelata dan kaum nasionalis Indonesia dan sehebat mungkin mempropagandakan keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia (dikutip dalam Ingleson, 1993: 50).

Pada bulan Januari 1928, jurnal itu memuat program dari Liga Cabang Belanda yang dinyatakan telah dirancang setelah berkonsultasi dengan PI. Program tersebut hampir sama dengan program yang disusun oleh PI pada akhir 1926 ketika menerima usul tentang pembentukan partai nasionalis baru (Ingleson : 1993 : 50 - 51).

Liga cabang Belanda mengakui hak rakyat Indonesia untuk merdeka dan menyatakan keyakinannya bahwa perjuangan nasional untuk memperoleh kemerdekaan harus melewati jalur hukum. Liga itu kemudian mengajukan sembilan tuntutan kepada Belanda. Tujuh pertama meliputi hal-hal seperti dicabutnya peraturan yang membatasi kaum nasionalis, dihapuskannya "wewenang istimewa" Gubernur Jenderal dan suatu amnesti umum bagi aktivis pergerakan politik. Itu semua menurut Ingleson mempunyai arti penting bagi perkembangan kegiatan politik di Indonesia sampai pada tuntutannya yang terakhir agar bangsa Indonesia boleh menentukan nasibnya sendiri.

Seperti telah disebut di atas, bahwa Liga cabang

Belanda tersebut mula-mula di dominasi oleh PI dan kaum demokrat sosial Belanda. Karena Indonesia merupakan koloni Belanda yang paling luas, dan karena di dominasi PI, aktivitas Liga tersebut memusatkan hampir seluruh perhatiannya pada masalah penjajahan di Indonesia. Tetapi, pada tahun 1928 situasinya berubah karena ketegangan dalam tubuh Liga Internasional Pusat antara golongan komunis dan non komunis telah mencapai suatu tahap yang sedemikian rupa sehingga golongan non komunis mulai mengundurkan diri.

Ketegangan disebabkan karena Comintern (Stalin) mengubah taktiknya setelah terjadi kegagalan Partai Komunis Cina dan Partai Komunis Indonesia. Kemudian Comintern menghapuskan strateginya untuk bekerjasama dengan kelompok nasionalis non komunis (Mohammad Hatta, 1979: 229-230). Sebagai gantinya, Comintern mulai menuduh golongan nasionalis sebagai borjuis nasional dan mengutuk semua kerjasama dengan golongan nasionalis.

Bagi Liga cabang Belanda, kebijakan Comintern itu mengakibatkan kaum Demokrat Sosial Belanda mengundurkan diri, sehingga PI harus melawan partai komunis Belanda sendirian (Sjahrir dalam Ingleson 1993 : 51). Karena situasi ini PI kemudian mengundurkan diri pula, mungkin dengan alasan bahwa PI hampir tidak memperoleh peluang untuk mencegah CPN menguasai cabang itu, meskipun dengan konsekuensi kehilangan dukungan untuk mencapai tujuannya

yang lebih luas. Memang selama ini PI berjalan pada prinsipnya sendiri dan selalu berketetapan untuk tidak tunduk kepada tujuan komunis.

Kebijakan PI untuk menjauhi Liga cabang Belanda, tidak berlangsung lama, karena pada bulan April 1928 PI menggabungkan kekuatannya lagi dengan Liga Internasional untuk mereorganisasi Liga cabang Belanda. Motif Liga Internasional untuk mereorganisasi Liga cabang Belanda tidak jelas, walaupun mungkin sudah mulai menentang kekuasaan CPN karena waktu itu sedang terjadi konflik antar seksi dalam organisasi buruh Belanda dan pertikaian dalam tubuh CPN sendiri (Ingleson, 1993 : 52).

Walaupun PI kembali mendekati Liga cabang Belanda yang sudah direorganisasi itu, namun semangat partisipasinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Hal itu karena makin menipisnya kepercayaan PI terhadap Liga Internasional dan organisasi afiliasinya.

Pada bulan Juli 1929, PI mengirimkan suatu delegasi dibawah pimpinan Hatta ke kongres Liga Internasional di Frankfurt. Upaya Comintern yang terang-terangan untuk mendominasi kongres tersebut dan menggunakan organisasi non komunis untuk tujuannya sendiri, meyakinkan Hatta bahwa kepentingan PI dan Comintern sudah tidak lagi saling melengkapi dan dalam kenyataan makin jauh berbeda (Ingleson, 1993: 52).

Kemudian pada bulan Oktober 1929, PI mengadakan rapat anggota. Dalam rapat itu Hatta memberi laporan tentang

kongres Liga Internasional (Liga Menentang Imperialisme dan untuk kemerdekaan rakyat tertindas) di Frankfurt. Dalam laporannya ia menyatakan bahwa liga tersebut makin lama makin membuka kemungkinan di dominasi komunis yang akan menguntungkan Comintern dan Uni Soviet, dan sebaliknya mengesampingkan kepentingan nasionalis Asia :

Suatu gelombang pasang fanatisme muncul dari pihak yang sangat mewakili komunis, yang mengancam akan menelan segala yang tidak mencerminkan perasaan, pikiran dan cara kerja komunis (dikutip dalam Ingleson, 1993: 52).

Sementara itu kaum nasionalis Asia memandang nilai kongres tersebut dalam sudut pandang yang lain dari sudut pandang komunis :

Bagi kaum nasionalis, kehadiran mereka di kongres itu, pertama-tama untuk mempropagandakan negara mereka, kedua untuk memelihara hubungan satu sama lain dan saling memberi informasi tentang penderitaan dan kebutuhan masing-masing tentang perjuangan dan taktik masing-masing, pengalaman serta kesalahan masing-masing (dikutip dalam Ingleson, 1993: 52).

Selanjutnya Hatta menyampaikan kepada pengurus, karena nilai dari liga itu kini merosot dan dalam waktu dekat mungkin bisa bubar, maka PI perlu mempertimbangkan secara serius untuk mengundurkan diri dari liga itu. Namun demikian menurut Ingleson untuk sementara PI masih menjadi anggota Liga Internasional dan Liga cabang Belanda. Tetapi dalam praktek, keanggotaan semacam itu kecil sekali artinya karena kedua organisasi tersebut dengan cepat menghilang dari kancah politik.

Jadi seperti telah disebutkan di atas, pengaruh Comintern (komunis) terhadap PI tidak pernah amat penting.

Comintern bertujuan memanfaatkan organisasi mahasiswa itu untuk tujuannya, tapi dalam kenyataannya PI justru memanfaatkan organisasi yang disponsori Comintern sebagai forum internasional untuk propaganda nasionalisnya.

5. Pidato Mohammad Hatta di Gland Swis dan Utrecht

Ada dua kegiatan Hatta sebagai wakil PI yang penting dan berhubungan dengan usahanya mempropagandakan persoalan Indonesia di Eropa. Pertama, pidatonya di Gland Swiss pada tahun 1927, yang diselenggarakan oleh Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan. Kedua, pidatonya di depan perkumpulan mahasiswa Indologi di Utrecht tahun 1930.

Dalam pidatonya yang pertama, Hatta menerangkan hubungan kolonial antara Belanda dan Indonesia. Ia menolak pendapat hubungan kolonial yang dikemukakan oleh seorang penulis Perancis, E. Fallot, yaitu "aksi yang diselenggarakan oleh suatu bangsa beradab terhadap suatu negeri yang peradabannya kurang dari bangsa tadi, dengan tujuan mengubahnya secara berangsur-angsur dengan mengembangkan sumber-sumber alamnya serta mengadakan perbaikan dalam hal materi dan moralnya". Hatta membantah pendapat itu, menurutnya di mana saja penjajahan itu merupakan penggunaan kekuatan dan ketamakan bangsa-bangsa yang lebih kuat dalam hal materi untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan perdagangannya dengan mengorbankan bangsa-bangsa yang lebih lemah.

Dengan dasar tersebut, setelah menggambarkan kebesaran kerajaan-kerajaan kuno Indonesia, seperti Majapahit dan kepahlawanan Aceh mempertahankan diri terhadap serangan Belanda. Hatta melukiskan dengan angka-angka yang bersumber dari ahli-ahli Belanda sendiri, betapa besar keuntungan yang dikeruk oleh Belanda dari Indonesia baik dalam abad 19, maupun dalam tahun 1926, yaitu setahun sebelum pidatonya.

Disamping itu Hatta juga mengemukakan "cara biadab" yang dilakukan Belanda untuk merekrut para kuli perkebunan, serta kontrak yang mengikat mereka. Dengan tegas Hatta menyamakan ancaman hukuman dalam perjanjian buruh perkebunan di Indonesia dengan perbudakan, katanya :

Selalu dikatakan bahwa perbudakan telah dihapuskan seluruhnya sejak lebih dari setengah abad. Tetapi di Indonesia, sungguh pun telah ada segala macam perjanjian internasional, perbudakan seperti ini masih dijumpai dalam bentuk yang modern, dipertahankan atas nama agama Kristen oleh satu diantara bangsa-bangsa Eropa Barat dan yang mengaku merupakan negara beradab (dikutip dalam Deliar Noer, 1991: 69-70).

Selanjutnya Hatta mengemukakan kemelaratan hidup rakyat Indonesia, pendidikan yang serba kurang, tekanan dalam bidang politik yang diperkuat dengan segala macam kekerasan, termasuk hukuman dalam pengadilan serta hak-hak istimewa dari Gubernur Jenderal bila hukum tidak dapat diterapkan untuk menyingkarkan pejuang nasionalis dari masyarakat ramai. Namun demikian Hatta mengemukakan keyakinannya bahwa pergerakan nasional akan mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu dalam pidatonya di Utrecht, Hatta menyatakan bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia bertalian dengan kebangkitan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama bangsa-bangsa timur. Ia menilai, pergerakan kemerdekaan bertambah radikal dalam tahun 1920-an, dan Hatta melihat pengaruh Mustafa Kemal dari Turki dalam pergerakan nasional di Indonesia yang tambah radikal itu (Deliar Noer, 1991: 71).

Hal penting dalam pidatonya di Utrecht, adalah pernyataan yang menolak pendapat Prof. Van Vollenhoven, bahwa kata Indonesia tidak dapat dipergunakan sebagai penamaan politik bagi daerah yang dikuasai Belanda di Asia Tenggara. Alasan Van Vollenhoven menurut Hatta hanya karena penduduk daerah Hindia Belanda tidak mencakup semua orang yang termasuk orang Indonesia (katanya, hanya 49 juta dari 66 juta). Kemudian Hatta mengatakan, sebaiknya Van Vollenhoven juga melihat Amerika Serikat dan Jerman, katanya :

Yang secara geografis kita artikan dengan "Amerika" ialah benua "baru" yang membentang dari kutub ke kutub yang di dalamnya terdapat berbagai negara dan bangsa, namun hanya satu negara yang menduduki kurang dari seperempat bagian dari seluruh wilayahnya, yang namanya berasal dari benua itu. Namanya bukan hanya Amerika, tetapi bahkan "Amerika Serikat". Penamaan ini bisa menimbulkan kesan adanya perserikatan dari semua negara yang ada di Amerika. Tetapi tak akan timbul pikiran pada siapa pun untuk mengatakan, bahwa penamaan itu tidak dapat dipakai sebagai penunjuk bagi "negeri dollar" itu. Penamaan "Amerika Serikat" sudah lazim, bukan hanya orang-orang Amerika menamakan negaranya demikian, tetapi juga karena negara-negara yang ada di benua itu masing-masing mempunyai nama yang khas. Kalau kita berbicara tentang "orang-orang Amerika", maka yang

lazimnya dimaksud ialah penduduk "Amerika Serikat" dan bukan orang Kanada, Meksiko, Brazilia, Bolivia dan sebagainya.

Hal yang sama berlaku juga bagi "Jerman" masa kini. Di luar wilayah Kerajaan Jerman dan langsung diperbatasannya tinggal lebih dari 10 juta orang Jerman, diantaranya 6 juta bersatu dalam satu negara terpisah, yaitu Austria. Apakah karena itu orang-orang Jerman dari "Kerajaan" itu tidak berhak menamakan tanah tumpah darahnya "Jerman"? Kapan dan di manakah di dunia ini pernah ada orang yang mencoba membuktikan bahwa nama "Jerman" tidak dapat dipakai? Sebaliknya bilamana kita berbicara tentang "Jerman" dan "orang-orang Jerman" maka kita tidak akan ragu-ragu mengenai apa yang dimaksudkan dengan itu. Sebabnya ialah karena orang-orang Jerman di luar "Kerajaan" itu menamakan dirinya lain, dan karena negara Jerman lainnya di tepi Sungai Donau disebut "Austria" (Mohammad Hatta, 1980: 12-13).

Di situ Hatta melihat suatu contoh yang membuktikan, bahwa dapat tidaknya dipakai suatu nama geografis tidak tergantung pada pengertian-pengertian geografis atau etnologis, ia hanya ditentukan oleh kemauan dari penduduknya sendiri dan oleh keadaan yang dihadapi oleh negara itu.

B. Kegiatan Politik Perhimpunan Indonesia di Indonesia

1. Penyusupan ke partai-partai politik

Untuk melaksanakan program kerja PI terutama mempropagandakan asas-asas perhimpunan ke Indonesia, pada awalnya PI menganjurkan agar setibanya di tanah air alumninya bergabung dengan partai politik yang ada, menanamkan pengaruhnya di kalangan anggotanya dan berupaya keras membujuk agar mereka mau menerima ide-ide PI.

Anjuran tersebut merupakan wujud dari kesadaran para anggota PI yang menyadari bahwa organisasinya bukan lagi

merupakan organisasi sosial, tapi telah menjadi organisasi politik radikal dan menjadi pusat kemajuan bagi gerakan nasional Indonesia, yaitu suatu kelompok radikal yang para anggotanya memutuskan, bahwa sekembalinya ke Hindia Belanda, mereka akan bergabung ke rakyat dan berjuang bersama rakyat.

Memang dalam pandangan para anggota PI, dibandingkan dengan para pemimpin partai di Hindia Belanda, lulusan PI dibekali lebih baik untuk menyanggah kepemimpinan nasional, karena mereka tinggal disuatu masyarakat demokrasi yang jauh dari kekuasaan kolonial. Mengenai hal itu Hatta mengatakan :

Seperti pendaki gunung, pada puncak bukit ia akan memiliki pemandangan yang lebih baik atas dataran di bawahnya daripada orang-orang yang tinggal di dataran tersebut. begitu pula halnya dengan para mahasiswa Indonesia di Belanda berada dalam posisi yang lebih baik untuk memandangi situasi kolonial dibandingkan rakyat negeri mereka, yang tinggal di bawah hipnosis kolonial (dikutip dalam Rose, 1991 : 50).

Lebih lanjut Hatta mengatakan bahwa lulusan PI sebagai faktor pemersatu, yang melalui penyusupan ke dalam partai-partai yang ada, dapat mendorong kaum nasionalis setempat untuk mengesampingkan masalah-masalah primordial demi kepentingan perjuangan yang lebih besar yaitu menyatukan tenaga revolusioner untuk merebut kemerdekaan Indonesia.

Usaha-usaha penyusupan pertama dilakukan oleh Soedjadi dan Iskaq dan kemudian oleh Singgih dalam Budi Utomo, oleh Soekiman dalam Sarekat Islam. Kemudian sekitar

pertengahan tahun 1926, strategi alumni PI untuk menyusup ke dalam Budi Utomo dan Sarekat Islam ditambah oleh suatu usaha keras untuk mendorong alumni PI agar mulai membentuk suatu organisasi nasional baru menurut citra PI dan bertujuan mengambil alih kepemimpinan gerakan kebangsaan Indonesia. Melalui rencana dua arah tersebut diharapkan seluruh gerakan nasionalis berubah menjadi radikal tapi tetap bertanggung jawab berdasarkan garis ideologi PI (Ingleson, 1993 :37).

Untuk lebih mempercepat dalam menyebarkan asas-asasnya pada bulan Juni 1925 pengurus PI menugaskan Boediarto, Sartono, dan Arnold Mononutu untuk menyiapkan dan menyebarluaskan propaganda PI di Negeri Belanda dan di Indonesia.

Majalah *Indonesia Merdeka* yang terbit dalam bahasa Belanda, merupakan sarana utama propagandanya. Majalah itu disebarluaskan di Indonesia oleh wakil-wakil alumni dan simpatisan PI. Buku dan majalah yang diselundupkan dapat lolos dari pejabat pos dan pabean dengan cara dimasukkan ke dalam bagasi anggota PI yang pulang ke tanah air (walaupun pejabat pabean selalu menunggu kedatangan mereka dan menggeledah kopor-kopor mereka) atau dititipkan pada para pelaut yang bekerja di kapal Belanda dan khususnya untuk Indonesia merdeka, dimasukkan ke dalam lipatan edisi Belanda *Haagsche Post*, kemudian dibungkus dan dialamatkan kepada para distributor melalui simpatisan PI (Ingleson, 1993: 37-39).

Indonesia Merdeka yang disebarluaskan di Indonesia dan artikel-artikelnya menjadi bahan diskusi politik di kalangan mahasiswa di Bandung dan Surabaya. Isinya yang bebas dari pengawasan ketat pers, mempengaruhi pemuda-pemuda nasionalis di Indonesia dan menjadi suatu dasar intelektual serta ideologi untuk pandangan politik mereka.

Penghubung dan simpatisan PI di Indonesia yang paling berjasa dalam penyebaran *Indonesia Merdeka* adalah Soedjadi, seorang juru tulis di Departemen Keuangan di Batavia, yang pada tanggal 21 Januari 1926 secara resmi ditunjuk sebagai wakil di Indonesia oleh pengurus PI (Notulen rapat pengurus PI, 21 Januari 1926, seperti dikutip Ingleson, 1993: 39).

Soedjadi mempunyai tugas yang luas dan bermacam-macam mulai dari mempublikasikan *Indonesia Merdeka*, mencari langganan dan mengatur distribusinya, mengirim informasi tentang situasi politik di Indonesia kepada pengurus PI terutama kepada Hatta yang dengannya ia mengadakan hubungan surat menyurat secara teratur. Disamping itu ia juga menyebarkan ide-ide PI dikalangan organisasi politik di Indonesia dan berusaha mempengaruhi mereka ke arah berpikir PI. Menurut Ingleson dekatnya hubungan Soedjadi dan Hatta, serta kenyataan bahwa Hatta mengangkatnya sebagai orang kepercayaan dan korespondennya memberi Soedjadi peran yang amat penting dalam usaha PI menyebarluaskan ide-idenya di Indonesia untuk membentuk suatu gerakan nasionalis baru.

2. Rencana Pembentukan Organisasi Nasionalis Baru

Surat Soedjadi kepada pengurus PI, 15 April 1926 menunjukkan bahwa sejak bulan April 1926 ia melaporkan bahwa beberapa anggota Budi Utomo telah berjanji mendukung buah pikiran PI dan menyatakan rencananya untuk menyebarluaskan propaganda pada rapat-rapat Budi Utomo (dikutip dalam Ingleson, 1993 : 39-40). Bersama Iskaq ia terus berusaha menanamkan pengaruh ke dalam Budi Utomo. Tetapi hasilnya mengecewakan, dengan putus asa ia melaporkan kepada Hatta pada bulan Mei 1926 bahwa "sekarang saya tidak bisa mengharapkan banyak dari Budi Utomo, 99 persen anggotanya adalah orang-orang *Jan Compagnie*". Pengaruh yang dapat ditanamkan ke dalam organisasi itu hanya bersifat sementara (surat Soedjadi kepada Hatta 31 Mei 1926 seperti dikutip Ingleson, 1993: 40).

Selain berusaha menanamkan pengaruh ke dalam Budi Utomo, Soedjadi mengadakan hubungan dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts-Hoogschool*) dan Sekolah Kedokteran (*Stovia*) di Batavia dan menganjurkan agar mereka tidak masuk *Jong Java*, karena dalam pandangannya, keanggotaan *Jong Java* tidak cocok dengan kegiatan politik. Tetapi sebaliknya ia dalam suratnya kepada Hatta 9 Februari 1926 mendesak agar berusaha membujuk para anggota PI yang pulang ke tanah air untuk lebih berperan aktif dalam gerakan nasionalis. Selanjutnya ia menjelaskan, bahwa sebagai salah satu cara untuk membuat

mereka terlibat secara aktif di bidang politik, maka sebaiknya PI agar menghentikan kegiatannya lewat organisasi-organisasi yang sudah ada dan membentuk suatu partai baru. Ia berpendapat :

Karena itu saya mohon bantuan pengurus PI untuk menghimbau alumni PI agar bersatu dalam satu wadah organisasi baru di tanah air, yang akan berbuat lebih banyak untuk kepentingan rakyat dibandingkan organisasi-organisasi yang sudah ada (surat Soedjadi kepada Hatta 9 Februari 1926 seperti dikutip Ingleson, 1993 : 41).

Sebenarnya pengurus PI juga sudah sampai pada kesimpulan itu, dan selama beberapa bulan sudah membuat rencana untuk membentuk suatu konsentrasi nasional baru di Indonesia yang akan mewadahi semua aliran politik. Konsentrasi nasional semacam itu akan merupakan suatu organisasi yang benar-benar nasionalis. Dalam hal ini J.D. Legge menyebutkan sebagai nasionalis "sekuler", dalam artian tidak mencari landasan pada Islam ataupun ideologi komunis (Legge 1993 : xiii).

Atas inisiatif alumni PI yang sudah mempunyai pekerjaan bagus, sebagian besar di kota Surabaya, Batavia, Bandung, dan mereka yang ingin merasakan kembali rasa persatuan dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan seperti ketika masih berada di Belanda dulu, maka dibentuklah kelompok-kelompok studi di Indonesia (Scenario, 1970: 48). yang mana kelompok-kelompok studi tersebut merupakan langkah-langkah penting ke arah persatuan dan khususnya kelompok Studi Bandung berperan besar dalam proses pembentukan organisasi nasionalis baru

tersebut

C. Reaksi Pemerintah Belanda

Anggota PI sangat sadar bahwa kegiatan politiknya yang radikal itu, selalu diamati dengan cermat oleh pemerintah Hindia Belanda terutama oleh Penasehat Urusan Kemahasiswaan dari Kementerian Jajahan.

Menteri jajahan cemas melihat aktivitas politik PI. Kecemasan itu mulai tampak sejak PI diorganisasi pada tahun 1922 dan kecemasan semakin meningkat ketika PI mulai giat melakukan propaganda ke dunia internasional. Dan yang sangat mengkhawatirkan bagi pemerintah Hindia Belanda adalah hubungan PI dengan Comintern (komunis).

Reaksi atas kegiatan politik PI yang radikal tersebut, pemerintah Hindia Belanda melalui Penasehat Urusan Kemahasiswaan dari kementerian jajahan memberi peringatan agar para mahasiswa tidak lagi mengadakan propaganda politik. Peringatan itu disertai ancaman akan dicabut bea siswanya, atau dipulangkan ke tanah air bila tetap aktif dalam kegiatan politik.

Tetapi ancaman tersebut tidak menggoyahkan tekad para aktivis PI dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, namun justru semakin menambah keradikalan mereka.

Dengan latar belakang revolusi PKI di Jawa tahun 1926, Penasehat Urusan Kemahasiswaan mendesak Jaksa Agung agar memberinya ijin untuk menggeledah penginapan para anggota PI dengan pertimbangan akan menemukan barang-

barang mencurigakan yang dapat menghubungkan mereka dengan revolusi itu. Jaksa Agung yang lebih memahami tuntutan undang-undang negeri Belanda menolaknya dengan menunjukkan bahwa untuk dapat mengizinkan tindakan semacam itu ia harus mempunyai suatu bukti bahwa PI benar-benar bekerja dengan sarana-sarana yang melanggar hukum untuk menggulingkan struktur sosial Belanda (Ingleson, 1993 : 78).

Usaha dari Penasehat Urusan Kemahasiswaan yang menginginkan dilakukannya tindakan terhadap PI walaupun belum berhasil tetapi usaha untuk menindak para aktivis PI terus dilakukan dan usaha tersebut mendapat momentum yang tepat setelah PI pada tahun 1927 melalui *Indonesia Merdeka* edisi Maret-April mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang keras dalam propagandanya. *Indonesia Merdeka* edisi itulah yang nantinya dijadikan alasan untuk mengajukan para aktivis PI ke pengadilan dengan tuduhan menghasut untuk melakukan tindakan kekerasan.

Dengan munculnya *Indonesia Merdeka* edisi Maret-April 27 itu, kecemasan tentang kegiatan PI yang sudah berkembang dalam Kementerian Jajahan, berubah menjadi suatu keputusan untuk tidak meremehkan para pimpinan PI. Karena tidak memiliki "wewenang istimewa" seperti Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Menteri Jajahan mengalihkan perhatian dengan mengumpulkan cukup bukti untuk membujuk Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung bahwa hukuman berdasarkan Undang-Undang Pidana Belanda dapat dilakukan

(Ingleson, 1993 : 79).

Menteri Jajahan sepenuhnya mendukung tuntutan penasehatnya kepada Jaksa Agung untuk melakukan tindakan terhadap para pimpinan PI. Ia menyampaikan kepada Jaksa Agung bahwa pecahnya pemberontakan PKI berhubungan erat dengan para pendukungnya di Belanda. Oleh karena itu

saatnya untuk melakukan tindakan kekerasan telah tiba :

Pemerintah Hindia Belanda dapat secara amat efektif melarang setiap persiapan dari gerakan komunis di dalam wilayah Hindia Belanda, tetapi di luar wilayahnya, pemerintah Hindia Belanda tidak dapat berbuat apa-apa. Pemerintah Hindia Belanda boleh berharap bahwa di sini, pemerintah tertinggi mendukungnya dan sebisa mungkin memberi bantuan. Dan dalam hal ini, dukungan semacam ini tidak banyak bermanfaat selama penghasut dan agitator kekacauan mendapat kebebasan penuh untuk berbuat semaunya di negeri Belanda. Hal ini jelas menyangkut kepentingan umum negara : kegiatan para agitator tersebut di negeri Belanda dapat menyebabkan suatu pertempuran berdarah di Hindia Belanda, seperti yang telah terjadi, dan ini harus ditentang, dan mereka tidak boleh lagi dibebaskan dari hukuman dalam satu bagian negara ini bila terlibat dalam persekongkolan untuk menjatuhkan kekuasaan Belanda di bagian lainnya dari negara (dikutip dalam Ingleson, 1993 : 79 - 80).

Eada bulan Maret dan April Menteri Jajahan Koningsberger menyerahkan kepada Menteri Kehakiman bahan-bahan yang sudah dikumpulkan oleh Penasehat Urusan Kemahasiswaan tentang PI dan kegiatan pemimpinnya selama beberapa tahun terakhir. Bahan-bahan itu barangkali memang dapat dijadikan bukti yang diminta oleh Jaksa Agung, tetapi ada kemungkinan Jaksa Agung berada di bawah tekanan politik yang kuat dari Menteri Jajahan sehingga mengizinkan tindakan yang diharapkan dapat memberikan bukti semacam itu dan setelah dipertimbangkan akan

membenarkan langkah-langkah semacam itu (Ingleson, 1993 : 80).

Kemudian pada tanggal 10 Juni 1927 diadakan penggeledahan di penginapan Hatta, Soebardjo, Soepomo, dan Abdoel Madjid di Den Haag, serta di penginapan Darsono, Mohammad Joesoef, Ali Sastroamidjojo, dan Soelaiman di Leiden (tuntutan pejabat kehakiman 9 Juni 1927 seperti dikutip Ingleson, 1993 : 80).

Berita penggeledahan oleh polisi Belanda tersebut diketahui oleh Hatta tanggal 11 Juni 1927 di Swiss dari surat kabar Jerman *Vorwärts*, katanya :

Terbaca olehku sebuah berita yang mengatakan, bahwa polisi Belanda menggeledah beberapa tempat kediaman anggota PI di Den Haag, beberapa anggota pengurusnya ditahan, sedangkan ketuanya Mohammad Hatta yang mau lari ke luar negeri ditangkap diperbatasan Nederland. Aku tertawa membaca berita itu dan kutunjukkan lembaran surat kabar itu kepada Soetikno. Ia pun tertawa membacanya, lalu berkata : "Apabila penggeledahan benar-benar terjadi dan ditambah dengan berita saudara Hatta ditangkap di perbatasan Nederland, semuanya menambah popularitas "Perhimpunan Indonesia". Aku ingin tahu apa yang akan mereka perbuat, kalau kita nanti dari luar masuk ke Nederland". "Itu benar" - kataku - "marilah kita lihat apa yang akan dilakukan oleh polisi Nederland. Aku tidak percaya kita akan ditahannya" (Mohammad Hatta, 1979 : 217).

Waktu itu Hatta berada di Swiss menengok Soemadi anggota PI yang sakit dan akhirnya meninggal.

Tanggal 12 Juni 1927 Hatta kembali ke Nederland (Mohammad Hatta, 1979 : 217). Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Soebardjo yang sengaja menjemput Hatta, Soebardjo menceritakan tentang aksi polisi Belanda

tersebut. Sampai 10 September 1927 Hatta dan pengurus PI lainnya belum ditangkap, bahkan Hatta pada tanggal itu juga seperti telah disebut di atas ia berangkat ke Gland Swiss untuk memenuhi undangan Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan guna memberi ceramah tentang *L'Indonesie et Son Probleme I'Independence*. Sebelum Hatta mendapat giliran bicara, banyak orang bicara tentang penggeledahan dikalangan PI di Nederland, katanya :

Aku tertawa tentang banyaknya pertanyaan yang dikemukakan tentang peristiwa itu dan itu menggambarkan bahwa Pemerintah Belanda dan alat-alat polisinya menolong menyebarkan masalah Indonesia. Perhatian Nehru besar sekali tentang apa yang terjadi sekitar Perhimpunan Indonesia (Mohammad Hatta, 1979 : 217 - 218).

Setelah konferensi Liga Wanita Internasional selesai, Hatta kembali ke Belanda lewat Paris. Di Paris ia tinggal beberapa hari. Kemudian, pada tanggal 23 September 1927, setelah ia beberapa hari kembali di Den Haag, datang polisialis Belanda ke rumahnya dengan membawa surat perintah bahwa mereka ditugaskan untuk menahan Hatta. Bersama dengan Hatta ditahan juga Nazir Pamoentjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdoel Madjid Djojoadingrat. Sebenarnya yang harus ditangkap adalah 7 orang, tetapi Ahmad Soebardjo, Gatot Tarcemihardjo, dan Arnold Mononutu berada di luar negeri Belanda maka tidak dapat ditahan (Mohammad Hatta, 1979 : 219).

Tidak lama setelah mereka ditahan, Mr. Duijs seorang ahli hukum dan anggota parlemen Belanda dari SDAP,

menawarkan untuk menjadi pembela, katanya :

Tindakan yang diambil terhadap tuan dan teman-teman tuan oleh alat-alat pengadilan sangat memalukan negeri Belanda dan oleh karena itu aku dan temanku Mr. Mobach bersedia membela perkara tuan dengan cuma-cuma (dikutip dalam Mohammad Hatta, 1979 : 219).

Menurut Mr. Duijs keempat aktivis PI dituduh atas 3 perbuatan, yaitu menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat dalam pemberontakan dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Pihak penuntut mengajukan hukuman 3 tahun penjara bagi Hatta, 2,5 tahun penjara bagi Nazir Pamoentjak, dan 2 tahun penjara bagi Abdoel Madjid dan Ali Sastroamidjojo.

Seperti telah disebut di atas artikel dalam *Indonesia Merdeka* edisi Maret-April 1927 tersebut dikutip oleh pihak penuntut untuk mendukung kasus tersebut. Yang mana artikel tersebut menyebabkan *Indonesia Merdeka* digemari kalangan kaum muda Indonesia, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia, tapi merupakan ancaman bagi pihak penguasa Belanda.

Kalimat pertama dari kalimat-kalimat yang disebut berisi hasutan dari artikel *Indonesia Merdeka* tersebut adalah tulisan yang berjudul "Memasuki Tahun Yang Baru", halaman 1 dan 2 yang berbunyi :

"Berkala kita ini bukan lagi merupakan suara dari sekelompok kecil pemuda pelajar Indonesia saja. Dia sudah merupakan pencerminan perasaan dari berjuta-juta penduduk yang tertindas jauh di Timur sana. Bangsa kita selalu harus menelan segala perasaan yang dikandung dalam hatinya.

Ketentuan sensor disamping bermacam-macam peraturan yang dibuat penguasa asing telah menghapus segala kesempatan bagi rakyat untuk mengungkapkan perasaan yang bergejolak dalam benaknya. Oleh sebab itu, jikalau hak lamanya untuk mengadakan protes secara massal ditindas dan diberangus, tidak terdapat lagi cara lain bagi mereka selain menyatakan protes terhadap penindas-penindas asing itu dengan suara dentuman senjata. Suatu cara yang tidak terelakkan, yang sekali-kali terpaksa digunakan oleh rakyat sebuah masyarakat jajahan yang tertindas (dikutip dalam Duijs, 1985 : 39).

Menurut Mr. Duijs penuntut umum memotong alur artikel itu, padahal dari lanjutan tulisan itu jelas nyata, bahwa maksudnya bukan menghasut atau mengajak orang supaya berontak. Tetapi hanya suatu tinjauan yang menggarisbawahi suatu keadaan yang berlaku. Hal itu langsung dapat diketahui dalam lanjutan naskah tersebut, yang berbunyi :

"Di mana massa kami tidak dapat bergerak secara leluasa, *Indonesia Merdeka* senantiasa merasa wajib untuk mencerminkan dan menerjemahkan perasaan yang hidup dalam kalangannya. Kami selalu dapat menyelami dan memahami apa yang dirasakan dan apa yang terdapat dalam hati bangsa kami. Dan untuk kesekian kali telah terbukti, bahwa kami tidak pernah salah menapsirkannya. Kerap kali berkala kami ini secara blak-blakan memberi peringatan kepada penjajah yang kejam mengenai suatu pergolakan yang segera dapat terjadi di sana. Kami hidup bersama bangsa kami, karena itu secara naluri kami merasakan, kalau mereka sudah terpaksa berbuat sesuatu dalam waktu dekat. Hal itu sudah terjadi. Pemberontakan rakyat telah berkobar melawan kekejaman penguasa" (dikutip dalam Duijs, 1985 : 39 - 40).

Kalimat kedua yang disebut menghasut juga diambil dari terbitan yang sama yaitu dari tulisan berjudul *Hak-hak Eksorbitan*, halaman 8, yang mengatakan :

"Sebenarnya bangsa Indonesia juga tidak perlu lagi membela keadaannya terhadap kekuasaan Belanda. Untuk bangsa Indonesia hanya terdapat kemungkinan untuk menolak mengakui kekuasaan, peraturan, ketetapan dan



Undang-Undang Belanda, untuk menganggap dirinya terikat pada ketentuan-ketentuan itu jelas-jelas merupakan khayalan belaka. Bangsa Indonesia hanya mengenal satu jenis pembelaan, yaitu pembelaan diri sebagai bangsa yang diserang dan ditindas, pembelaan dengan mengobarkan revolusi bersenjata melawan penguasa Belanda (dikutip dalam Duijs, 1985 : 40).

Kalimat tersebut menurut Mr. Duijs juga telah dirobek dari kesatuannya, sehingga terasa jauh lebih berbahaya yang sebenarnya yaitu, kalau orang tidak tahu soal apa yang dipermasalahkan. Dalam hal ini persoalannya adalah masalah tidak adanya perlindungan hukum, sehingga setiap bumiputera dapat begitu saja diasingkan atau dikirimkan ke tempat-tempat pembuangan.

Memang kalau dilepaskan dari konteksnya dan tidak dihadapkan pada latar belakang ideologi PI, artikel tersebut dapat dianggap menghasut digunakannya kekerasan untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Bahkan pihak penuntut lebih jauh memberi argumentasi bahwa PI berhubungan erat dengan Comintern dan tidak hanya menghasut digunakannya kekerasan untuk menggulingkan kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tapi dalam kenyataan sudah terbukti dalam pemberontakan PKI (Mohammad Hatta, 1976 : 16-18).

Dalam pidato pembelaan Mr Duijs menyatakan bahwa kasus tersebut sama sekali bukan masalah kriminal, tapi masalah politik dan keempat mahasiswa tersebut tidak melanggar undang-undang dalam melakukan kegiatan politik mereka dalam PI (Duijs, 1985 : 130). Disamping itu ia juga menyanggah hubungan mereka dengan Comintern maupun dengan

pemberontakan PKI.

Setelah secara panjang lebar Mr Duijs menyampaikan pembelaan, kemudian ia secara ringkas menyimpulkan pokok-pokok pembelaannya:

1. Secara yuridis: mereka tidak dapat dihukum, karena pasal 131 KUHP negri ini tidak berlaku untuk Hindia Belanda;
2. Secara moral: tidak terdapat sesuatu yang patut dihukum: kita akan melakukan suatu ketidak-adilan yang terbesar, kalau kita menjatuhkan hukuman atas diri mereka berdasarkan ketentuan, yang penerapannya, sesuai dengan pengakuan semua pihak yang menyetujui dan membela berlakunya undang-undang itu, secara mutlak harus diberlakukan berdasarkan tingkat moral yang terdapat dalam suatu negara yang teratur dan tertib hukum, yang bertolak belakang dengan keadaan yang terdapat di Hindia Belanda;
3. Pengalaman bertahun-tahun dalam bidang kejaksaan, pengadilan dan kehakiman (lihat praktek-praktek dengan lain-lain keterangan serupa yang telah disebutkan) akan melakukan puncak ketidak-adilan, jikalau keempat orang ini dihukum, karena kata-kata yang mereka gunakan belum 1/10 kali keras dan tajamnya dari ucapan-ucapan yang telah dilancarkan orang-orang yang tuan-tuan tidak pernah hiraukan, apalagi menuntutnya;
4. Penahanan sementara atas diri mereka yang berlangsung sampai enam bulan lamanya, tidak mempunyai dasar hukum;
5. Hidup di bawah suatu pemerintahan kolonial seperti yang sudah diuraikan panjang lebar, harus menerima hinaan-hinaan yang dilancarkan terhadap bangsanya oleh pers Belanda, cemoohan, anjuran untuk memusuhi dan memperlakukan mereka dengan kekerasan, jelas tidak dapat diabaikan begitu saja;
6. ...Apakah semua itu belum cukup ? (Duijs, 1985 : 135-137).

Pada akhir pembelaannya Mr. Duijs memohon supaya segera memerintahkan mengeluarkan para tertuduh dari tahanan sementara dan selanjutnya, sesuai dengan permohonan yang sudah ia kemukakan sebelumnya, supaya hakim menyatakan para tertuduh bebas dari segala tuduhan dan

tuntutan.

Sementara itu masing-masing terdakwa juga membacakan pledoinya secara singkat. Sebenarnya Hatta telah menulis suatu pledoi yang panjang lebar, tetapi atas permintaan pengadilan, pledoi itu harus diketik dan yang dibacakan cukup ringkasannya saja. Oleh Hatta, permintaan pengadilan itu diterima sebagai suatu pertanda kemungkinan hasil sidang akan menguntungkan.

Pembelaan yang dibuat Hatta, dan kemudian diterbitkan sebagai brosur oleh PI serta disebarluaskan di Eropa dan di Indonesia (secara selundupan) dengan judul *Indonesie Vrij* (Indonesia Merdeka) itu merupakan suatu ringkasan cemerlang dari semua yang telah dikatakan oleh PI selama lima tahun terakhir. Setelah mengecam "kecurigaan borjuis picik" (golongan reaksioner) orang Belanda, Hatta memuji pemuda Indonesia yang penuh tanggung jawab:

Sebagai putra-putra negaranya sendiri, mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri ini merasa benar-benar terpanggil untuk mengemban tugas negara mereka sendiri. Kepada mereka rakyat akan menaruh lebih banyak kepercayaan, dan kepada mereka rakyat mencari perlindungan. Mereka merasa betapa indahya tugas dari putra-putra yang intelek dari suatu negeri, dimana suatu bangsa asing dari ras lain memegang tongkat kekuasaan atasnya. Upaya mereka yang pertama haruslah membuat bangsa mereka menganggap penghinaan atas mereka itu sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat diampuni, dan menyalakan semangat kemerdekaan dalam diri rakyat sehingga benar-benar menghargai milik kemanusiaan yang paling besar: kemerdekaan bangsa (dikutip dalam Ingleson, 1993: 87).

Selanjutnya Hatta berusaha menghapuskan salah duga bahwa ia dan PI mendorong penggunaan kekerasan untuk memperolah kemerdekaan. PI, menurutnya tidak pernah

menganjurkan tindak kekerasan, tetapi hanya sekedar membicarakan tentang kemungkinan terjadinya tindak kekerasan, kecuali jika Belanda mau mengubah sikapnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia pasti memperoleh kemerdekaannya, "pasang naik sejarah" sedang berada dipihaknya, tetapi terserah Belanda sendiri untuk memutuskan apakah kemerdekaan itu harus dicapai dengan damai atau dengan kekerasan (pledoi Hatta dalam Duijs, 1985: 140-141).

Hal lain, yang disampaikan dalam pembelaannya adalah penolakan atas tuduhan bahwa ia akan lari, karena itu menurut pendapatnya, ia dan kawan-kawannya yang ditahan itu tidak sepantasnya ditahan. Sebaliknya kalau akan lari, jalan untuk itu mudah saja, katanya, karena memang waktu penggledahan mereka sedang berada di luar negeri Belanda. Tetapi karena mereka menghadapi perjuangan dengan berani dan terbuka, karena itu bila mereka lari, berbagai salah sangka akan muncul. Maka ia mempersingkat masa liburnya di luar negeri Belanda dan segera kembali untuk menghadapi kemungkinan adanya tuntutan, katanya:

Kami melarikan diri, tuan ketua dan majelis hakim yang terhormat ? Kami bukan pengecut dan tidak pernah terlintas dalam benak kami untuk melarikan diri. Kami berjuang untuk suatu tujuan yang luhur dan melarikan diri akan merusak seluruh perjuangan kami (pledoi Hatta dalam Duijs, 1985: 143).

Kemudian pembelaan Hatta diakhiri dengan mengutip sajak dari Rene de Clerq seorang pujangga Prancis, katanya:

" Yang mulia tuan-tuan Hakim !" Sekarang aku sedang siap menunggu keputusan tuan-tuan tentang pergerakan kami. Kata-kata Rene de Clerq, yang dipilih pemuda Indonesia sebagai petunjuk, hinggap di bibirku: "Hanya satu tanah yang dapat disebut tanah airku, ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu ialah usahaku" (pledoi Hatta dalam Duijs, 1985: 146).

Pada akhirnya Hatta dan kawan-kawannya dibebaskan dari segala tuntutan pada tanggal 22 Maret 1928.

Seperti telah disebut dimuka, pledoi Hatta berjudul Indonesia Merdeka, yang kemudian diterbitkan sebagai Erosur dan beredar sampai ke Indonesia, menjadi bahan bacaan yang digemari oleh kalangan pergerakan di Indonesia, dan memberi pengaruh bagi pendapat, sikap dan semangat mereka.

Jadi kegiatan politik PI dalam menyebarkan ideologinya yang diarahkan pada dua sasaran. Pertama, program-program perjuangan diarahkan untuk propaganda ke luar negeri, dengan tujuan menarik perhatian dunia internasional pada masalah-masalah Indonesia. Kedua, Program-program perjuangan diarahkan untuk tanah air dengan melakukan penyusupan ke partai-partai politik yang sudah ada sambil berusaha membentuk organisasi nasional baru, seperti halnya pergerakan nasional di Indonesia juga tidak lepas dari represi pemerintah Belanda seperti ancaman akan dicabut beasiswanya, tekanan-tekanan terhadap orang tua agar anaknya yang belajar di Belanda tidak ikut aktif dalam politik, bahkan penahanan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

HUBUNGAN PERHIMPUNAN INDONESIA DENGAN PARTAI NASIONAL INDONESIA

A. Kelompok Studi

Sudah disebut di atas, akibat propaganda PI, khususnya inisiatif alumninya yang ingin merasakan kembali rasa persatuan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan seperti ketika masih di Belanda, maka dibentuk kelompok-kelompok studi di Indonesia.

Sebab apa dengan bentuk kelompok studi ? Karena pada waktu itu pengawasan terhadap pergerakan nasional masih keras, jadi dengan pendirian kelompok studi tersebut dimaksudkan untuk lebih mengurangi pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap aktivitas mereka (Soesanto Tirtoprodjo, 1989 : 74).

Disamping itu berdirinya kelompok studi merupakan pertanda ketidakpuasan para alumni PI terhadap partai-partai politik yang sudah ada. Dalam kelompok-kelompok itu mereka mengadakan diskusi politik dengan tokoh-tokoh nasionalis yang sudah berpengalaman seperti Tjipto Mangoenkoesoemo dan Abdoel Moeis, serta para mahasiswa Indonesia yang masih muda-muda. Dengan cara itu mempermudah diterimanya ideologi PI sebagai dasar untuk suatu gerakan baru (Ingleson, 1993 : 42).

Kelompok studi Indonesia merupakan kelompok studi pertama, yang didirikan di Surabaya pada tanggal 11 Juli

1924 (Dahm, 1987: 65). Pendiri dan penggerak utamanya adalah Soetomo, seorang dokter di Surabaya yang sebelumnya aktif dalam PI antara tahun 1919-1923. Kelompok studi itu dimaksudkan untuk dapat menyatukan elite baru dan mengembangkan kesadaran nasionalisme Indonesia. Hal ini karena organisasi seperti Budi Utomo menurut mereka kurang berorientasi kebangsaan.

Disamping bergerak di bidang politik, dengan mengembangkan kesadaran nasionalisme Indonesia, kelompok studi Indonesia juga bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang dihadapi masyarakat Indonesia, antara lain dibukanya rumah pondokan untuk anak-anak sekolah, asrama wanita, sekolah tenun, kerajinan, koperasi, perkreditan dan lain-lain. Demikian pula didirikan Bank Kredit Bumiputra, Bank Nasional Indonesia, biro advis dan lain sebagainya. Dengan lain perkataan masyarakat diajak mengatasi masalah sosial dan masalah nasional secara kolektif dan konstruktif (Koch, 1955 : 126).

Kelompok studi kedua yang kemudian berpengaruh luas adalah kelompok studi umum (*Algemene Studie Club*) yang didirikan di Bandung pada tanggal 29 November 1925, atas prakasa alumni PI dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di kota itu. Ide pembentukannya keluar dari Iskaq Cokrodisoeryo, alumni PI, tetapi realisasinya dilakukan oleh Soekarno dan Anwari, mahasiswa jurusan arsitektur dan mesin (Suhartono, 1994: 58).

Kelompok studi umum Bandung banyak mendapat sumbangan pikiran dan pengalaman dari para nasionalis seperti Cipto Mangoenkoesoemo. Cokroaminoto. Sartono dan lain-lain. Untuk pertama kalinya Iskaq diangkat sebagai ketua umum, tetapi jabatan itu hanya dipegang kurang dari setahun. Dilihat dari tokoh-tokoh pergerakannya kelompok studi ini lebih mengarahkan gerakannya dibidang politik, yaitu memantapkan penyebaran nasionalisme melalui pembentukan organisasi baru.

Kelompok Studi Indonesia dan Kelompok studi umum yang gerakannya telah dipengaruhi oleh ide-ide PI, menurut Ingleson bagaikan magnet bagi bekas anggota PI dan bagi generasi muda di kota-kota besar yang mulai bangkit secara politis. Sudah disebut di muka bahwa Kelompok Studi Bandung lebih condong pada kegiatan politik dan bersikap non kooperasi terhadap pemerintah. Keadaan ini berbeda dengan Kelompok Studi Surabaya, yang walaupun tetap mengembangkan kesadaran nasionalisme Indonesia, tetapi kelompok ini lebih kuat gerakannya dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini karena anggotanya kebanyakan pegawai pemerintah yang mau tidak mau harus bersikap moderat. Ditambah lagi kepemimpinan Soetomo yang sudah berpengalaman dalam Budi Utomo sudah tentu tindakannya mantap dan orientasinya luas, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suhartono, 1994 : 59).

Namun demikian kelompok studi Surabaya setapak lebih maju dan mengarah ke politik, setelah pada tahun 1926

menghidupkan kembali gerakan yang didasari ideologi PI yaitu dengan melakukan propaganda ke seluruh Jawa agar mempertegas semangat persatuan dan mendorong para pemuda ikut ambil bagian dalam kelompok studi. Usaha propaganda tersebut ternyata membawa hasil yang baik, karena tidak lama kemudian dibentuk Komite Persatuan Indonesia di Bandung yang kemudian diikuti oleh kota-kota lainnya.

Dipihak lain kelompok Bandung juga tidak ketinggalan, untuk mendukung propogandanya kelompok itu mengeluarkan majalah "Indonesia Muda" yang diterbitkan menurut model "Indonesia Merdekanya" PI dan segera menarik banyak pembaca di kota-kota Jawa dan Sumatera. Majalah itu dipimpin oleh Soekarno yang menyumbangkan artikel paling besar jumlahnya.

Soekarno yang sebelumnya aktif dalam proses pembentukan kelompok studi umum, dan setelah kelompok studi itu terbentuk ia bersama-sama dengan bekas anggota PI secara serius membicarakan masa depan Indonesia. Ideologi yang dibawa pulang oleh para bekas aktivis PI meneguhkan dan semakin memperkuat gagasan-gagasan yang ia kumpulkan dari bahan-bahan bacaan dan hubungannya yang dekat dengan tokoh nasionalis pendahulunya seperti Tjokroaminoto, Tjipto Mangoenkeosoemo, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat dan lain-lain.

Penerbitan Indonesia Muda yang pertama, kedua dan ketiga memuat artikel panjang yang ditulis oleh Soekarno berjudul "Nasionalisme, Islam, dan Marxisme" (Legge, 1985:

99: Soekarno, 1964: 1-23). Artikel itu merupakan uraian yang paling jelas tentang pokok-pokok pikiran politik Soekarno pada tahun 1926. Pokok-pokok pikiran Soekarno tersebut, menurut Legge dapat dianggap sebagai pernyataan penting yang pertama tentang posisinya dan juga merupakan suatu permulaan ungkapan gagasannya tentang nasionalisme sekuler.

Dalam uraiannya Soekarno menyatakan bahwa, berdasarkan tradisi perjuangan kemerdekaan nasional di Indonesia terdapat tiga aliran politik yang dominan dalam melawan kolonialisme Belanda, yaitu aliran politik Nasionalis, aliran politik agama (Islam) dan aliran politik Marxis. Kemudian ia mengemukakan apa yang baginya merupakan pertanyaan sentral :

"Dapatkah roh-roh itu dalam situasi kolonial bekerja bersama-sama menjadi satu roh besar, roh persatuan ? Roh persatuan yang akan membawa kita ke kebebasan ? (dikutip dalam Legge, 1985: 100).

Pokok pikiran Soekarno bahwa gerakan-gerakan nasionalis Islam dan Marxis di Indonesia berasal dari suatu dasar yang sama yaitu hasrat kebangsaan untuk melawan kolonialisme Belanda dan bahwasannya ketiga aliran gerakan politik tersebut harus bersatu dalam perjuangan melawan musuh bersama bukanlah buah pikiran yang orisinal. Kolom-kolom dalam Indonesia Merdeka telah penuh dengan artikel-artikel semacam itu sejak tahun 1924, yang semuanya tentu telah dibaca Soekarno dengan seksama (Ingleson, 1979 : 23).

Walaupun pokok-pokok pikiran tersebut sudah jelas ada dalam propaganda PI dan kesimpulan yang diambil Soekarno sama dengan kesimpulan yang telah ditarik oleh PI sebelumnya, argumen-argumen yang ia pergunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tersebut merupakan sesuatu yang khas. Sumbangan Soekarno ialah menyerap apa yang telah dikemukakan oleh PI sejak tahun 1923, membuat sintesa dan menerjemahkannya ke dalam bahasa yang lebih sesuai dengan daya tangkap masyarakat Indonesia dan menyebarkannya kepada khalayak pembaca yang lebih luas.

Oleh karena itu pada akhir tahun 1926 telah muncul harapan dikalangan nasionalis-nasionalis muda dari berbagai golongan dan partai politik ketika mereka merasakan ada jalan menuju kebijaksanaan baru dan arah baru dalam aktivitas mereka. Bekas anggota PI telah berhasil dalam mencangkokkan benih-benih ideologi nasionalis baru ke dalam bumi politik Indonesia melalui propaganda yang intensif (Ingleson, 1979 : 24).

Kelompok studi di Bandung dan Surabaya yang merupakan basis perjuangan bagi bekas anggota PI, selanjutnya mencari peranan politik yang lebih luas, dan kebutuhan akan suatu partai nasionalis baru semakin banyak diterima. Dengan demikian langkah-langkah pertama telah diambil menuju ke persatuan yang lebih luas antara berbagai kelompok.

B. Revolusi Komunis Dan Sebuah Partai Nasional Baru

Revolusi komunis di Jawa bulan November 1926 dan di Sumatera Barat bulan Januari 1927 menjadi titik balik dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia (Shiraishi, 1990: 339). Revolusi yang dirancang dengan tidak seksama oleh pimpinan partai, yang diantara mereka sendiri sudah tidak ada kesepakatan tentang kebijakan yang diambil untuk mengadakan aksi. Hal ini tampak dengan tidak setujunya Tan Malaka terhadap rencana aksi tersebut, demikian juga Stalin di Moskow karena tidak ada faktor obyektif yang membolehkannya.

Tidak adanya kesepakatan yang bulat diantara pimpinan PKI dan tidak adanya faktor obyektif yang mendukung serta hanya mendapat sedikit dukungan rakyat dalam revolusi tersebut, mengakibatkan bencana bagi PKI sendiri. Partai itu dibubarkan, dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Para pemimpinnya banyak yang dihukum mati dan lainnya dibuang ke Digul, Irian Jaya.

Berkaitan dengan kegagalan revolusi PKI, pada bulan April 1927 PI mengeluarkan pernyataan pers melalui kantor berita Indonesia yang baru didirikan :

Kegagalan dari revolusi ini tidak akan menjadi halangan bagi kita menuju kemerdekaan Indonesia, tetapi memberi kita pelajaran dari banyak sekali pengalaman untuk membentuk organisasi yang lebih baik dan melakukan aksi dengan lebih seksama. Rakyat Indonesia tidak akan berhenti memperjuangkan kemerdekaan tanah air sebelum mencapai tujuan mereka. Walaupun begitu banyak dari mereka harus mengorbankan harta dan nyawa demi cita-cita yang tinggi. Dan mereka tidak merasa takut. Sebaliknya, aksi mereka akan lebih mantap, lebih kuat dan lebih kuat lagi

(dikutip dalam Ingleson, 1993: 56).

Gagalnya revolusi komunis tersebut membuat Hatta merasa ada kebutuhan yang mendesak bagi adanya suatu partai baru untuk menggantikan PKI yang dilarang. Ia percaya bahwa di dalam partai yang baru nanti, agama dan ideologi asing harus ditempatkan dibawah nasionalisme.

Revolusi PKI yang gagal tersebut bagi Hatta merupakan suatu katalisator untuk menyelesaikan rencananya membentuk partai baru di Indonesia seperti yang selama ini dianjurkan. Ia mengajukan programnya kepada pengurus PI pada 23 November 1926 dan resmi diterima sebagai garis kebijakan PI.

Program tersebut mengusulkan pembentukan sebuah *Indonesische Nationalistische Volkspartij* (Partai Rakyat Nasionalis Indonesia) yang anggaran dasarnya meliputi program politik, sosial dan ekonomi yang luas dan juga mendesak diselenggarakannya kongres nasional pada pertengahan tahun 1927 untuk mengumumkan partai itu secara resmi. Salinan dari perincian program itu tidak pernah diketemukan, tapi ditanya waktu ditahan polisi Belanda Hatta memberikan iktisarnya dan menambahkan ringkasan lebih jauh dalam pidato pembelaannya di depan pengadilan di Den Haag pada bulan Maret 1928 (Ingleson, 1979 : 25).

a. Politik

1. Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Indonesia.
2. Suatu bentuk pemerintahan Indonesia di masa depan atas dasar demokrasi murni, dengan masyarakat

pedesaan sebagai unsur terpenting.

3. Kebebasan pers dan hak mengadakan perserikatan dan pertemuan terbuka tanpa larangan.
4. Dihapuskannya "wewenang istimewa" gubernur jenderal.
5. Hak pilih untuk semua.

b. Ekonomi

1. Memajukan koperasi pertanian dan bank-bank pinjaman untuk rakyat.
2. Memajukan industri nasional berdasarkan koperasi.
3. Penghapusan sistem sewa tanah.
4. Penghapusan tanah partikelir.
5. Peraturan yang adil untuk kebijakan perpajakan, dengan membebaskan pungutan pajak bagi petani yang luas tanahnya kurang dari setengah bau (1,75 a).

c. Sosial

1. Undang-undang sosial; penghapusan *poenale sanctie*: delapan jam kerja dalam sehari.
2. Penghapusan sama sekali praktek riba.
3. Pembinaan pendidikan nasional.
4. Perbaikan kesehatan masyarakat.

Program tersebut seakan tanpa ideologi lebih radikal seperti yang selama ini dianjurkan oleh PI sejak tahun 1923. Hal ini tentu untuk memperoleh dukungan rakyat sebanyak mungkin tanpa menimbulkan amarah pemerintah Hindia Belanda, sementara itu partai tersebut masih memperoleh kesempatan untuk konsolidasi. Langkah semacam itu tentu telah disesuaikan dengan kondisi, di mana pada

waktu itu represi pemerintah Hindia Belanda sedang kuat-kuatnya terhadap gerakan kebangsaan.

Namun demikian, dilihat dari isi Indonesia Merdeka secara tidak langsung sudah tampak dalam tuntutan politik untuk menentukan nasib sendiri dan sikap non kooperatif, jelas merupakan jalan untuk mencapai tuntutan itu.

Selain rencana dari Hatta untuk suatu organisasi nasional yang baru tersebut ada rencana lain, yaitu "Rencana Organisasi Untuk Gerakan Nasional Kita" yang diberikan Semaun kepada Hatta agar disampaikan ke pengurus PI dan agar dapat diterima PI sebagai dasar pembentukan partai baru.

Rencana Semaun mendesak pembentukan sebuah partai nasionalis baru berdasarkan prinsip non kooperatif dan swadaya, dan khusus ditujukan untuk membentuk "negara dalam negara" dan akhirnya mengorganisasikan revolusi untuk menggulingkan Belanda (Ingleson, 1993: 59).

Rencana tersebut merupakan kritik otokritik Semaun setelah revolusi PKI gagal, dengan sepenuhnya Semaun menyadari adanya perpecahan di kalangan PKI, organisasi yang buruk, keanggotaannya yang kebanyakan hanya sekedar nama, dan pendekatannya yang tidak menyeluruh kepada revolusi itu, itulah sebabnya ia menekankan perlunya organisasi untuk menyiapkan sebuah revolusi dengan kekerasan :

Kita yakin bahwa kemerdekaan kita hanya dapat dicapai melalui pengorbanan darah dan air mata. Dan revolusi

hanya akan berhasil jika diorganisasikan dengan baik dan berlangsung diseluruh wilayah secara serentak (dikutip dalam Ingleson, 1993: 60).

Seperti disebut dimuka. Semaun berharap bahwa Hatta akan menyetujui rencananya dan akan meyakinkan pengurus PI agar rencana tersebut diterima sebagai dasar pembentukan partai nasional baru. Dalam hal ini Semaun merasa kecewa karena Hatta menolaknya dan memilih rencana yang dibuatnya sendiri serta tidak bersedia menyampaikan rencana tersebut untuk dipertimbangkan oleh pengurus PI. Kemudian Hatta menjelaskan keberatannya, bahwa rencana Semaun tersebut terlalu condong kepada ideologi komunis dan karena rencana tersebut menganjurkan aksi kekerasan sebagai cara terbaik.

Ketika menolak rencana Semaun, Hatta tetap pada keyakinannya yang selalu ia kemukakan tentang pentingnya secara bertahap mendidik rakyat Indonesia dan mempersiapkan mereka untuk menjadi bangsa yang merdeka. Pada tahun 1927 Hatta menjelaskan :

Rencana yang disusun oleh Semaun bertentangan dengan pandangan saya sendiri dalam hal bagaimana kemerdekaan harus dicapai. Menurut rencana saya, rakyat, melalui peningkatan pendidikan, harus dituntun secara bertahap ke tingkatan perkembangan yang dapat membawa kepada suatu kehidupan yang merdeka. Tapi, cara Semaun adalah menuntun rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang ada melalui aksi bawah tanah (dikutip dalam Ingleson, 1993 : 61).

Walaupun Hatta menolak rencana Semaun dan memilih rencananya sendiri, seperti telah disebut di muka, Hatta dan Semaun menandatangani suatu konvensi, masing-masing atas nama PI dan PKI. Alasan Hatta mengadakan konvensi dengan PKI adalah untuk mempermudah PI dalam memimpin

gerakan propaganda ke luar negeri. disamping itu juga memudahkan PI dalam mengarahkan gerakan kebangsaan Indonesia kearah persatuan nasional. Akhirnya, konvensi semacam itu menurut Hatta cocok dengan tujuannya membentuk suatu organisasi massa di Indonesia :

Saya membuat konvensi semacam itu karena saat ini massa rakyat di Hindia Belanda berada di bawah pengaruh PKI, dan bahwa tujuan saya adalah menghilangkan pengaruh tersebut dan membawa massa rakyat ke bawah pengaruh organisasi kita, dan dengan demikian di bawah pengaruh nasionalisme murni (seperti dikutip dalam Ingleson, 1979: 28).

C. Pembentukan Partai Nasional Indonesia

Gagalnya revolusi komunis yang berakibat dibantainya PKI beserta massa pengikutnya membuat elemen paling aktif dan paling berkomitmen dalam pergerakan tersingkir dari arena politik (Shiraishi, 1990 : 339).

Selain tersingkirnya PKI dari arena politik masih ada dampak lain bagi gerakan nasionalis akibat dari revolusi yang gagal tersebut (Ingleson, 1979 : 29). Pertama, itu menunjukkan bahwa revolusi semacam itu sia-sia belaka, karena dengan mudah dapat ditumpas oleh kekuatan Belanda yang lebih unggul. Kedua, setelah PKI gagal menyusun suatu revolusi yang luas dan berhasil, kaum nasionalis menjadi sadar akan kelemahan organisasi, bukan hanya PKI, tetapi dari semua organisasi nasionalis. Mereka juga menyadari perlunya membentuk suatu organisasi yang kuat dan berdisiplin. Yang terakhir dan yang paling penting, adalah tersingkirnya PKI menimbulkan kekosongan dalam gerakan

kebangsaan, padahal gerakan kebangsaan saat itu memerlukan pengarahan dan pemimpin, baik dari organisasi politik yang ada dan bangkit kembali, maupun dari pembentukan partai baru.

Gagalnya revolusi tersebut mendorong Soedjadi, wakil resmi PI di Indonesia untuk berbuat sesuatu. Pada tanggal 20 Desember 1926, ia memberitahu Hatta bahwa Iskaq dan Boediarto, sesegera mungkin bergerak untuk membentuk suatu partai baru, sesuai dengan rencana PI (surat Soedjadi kepada Hatta seperti dikutip Ingleson, 1979: 29). Pada awal tahun 1927, agak lama setelah menerima rencana Hatta untuk gerakan yang baru itu, mereka menyatakan keinginan untuk membentuk Sarekat Rakyat Nasional Indonesia (SRNI) dan menyelenggarakan suatu Kongres Nasional pada bulan Juli untuk meresmikan partai baru tersebut (surat Soedjadi kepada Hatta, 7 Maret 1927 seperti dikutip Ingleson, 1979: 30).

Dengan demikian jelas bahwa persiapan untuk membentuk suatu partai nasionalis baru yang tidak berdasarkan Islam maupun komunis, sejauh ini adalah atas inisiatif PI dan dalam prakteknya sebagian besar menurut gagasan dan rencana Hatta.

Namun demikian bahwasannya Hatta yakin bahwa partai baru itu akan diorganisasi oleh alumni PI, berdasarkan ideologi PI, dan tepat sesuai dengan rencananya, dan bahwa ia akan adapat mengendalikan kegiatannya dari Belanda menunjukkan bahwa Hatta kurang mengetahui secara terinci

tentang situasi politik di Indonesia, karena hampir bersamaan dengan persiapan PI untuk membentuk suatu partai baru itu, sejak paroh kedua tahun 1926 di Indonesia sendiri ada gerakan ke arah kesatuan nasional dan menuju pencarian arah baru bagi arus utama dalam gerakan kebangsaan (Ingle-son, 1993 : 64).

Dengan demikian usaha mencari suatu dasar baru bagi gerakan nasionalis yang berpusat pada kelompok-kelompok studi di Bandung dan Surabaya segera memperoleh momentum-nya. Pada awal tahun 1927, setelah pengumuman tentang rencana pembentukan SRNI dalam bulan Juli, maka proses pembentukan partai baru tersebut berpindah dari tangan Hatta di negeri Belanda ke suatu kelompok nasionalis dalam kelompok studi umum di Bandung.

Walaupun hampir semua pemimpin kelompok studi umum itu alumni PI, kecuali Soekarno dan Anwari, mereka sampai pada keyakinan bahwa mereka lebih memahami situasi Indonesia dari pada pengurus PI di Belanda. Mengenai hal itu J.D. Legge yang menganalisis biografi politik Soekarno menilai bahwa para mahasiswa Indonesia di Belanda lebih bersikap Barat jika dibandingkan dengan unsur kejawaan yang menonjol dalam diri Soekarno (salah satu pemimpin kelompok studi umum). Jika para pengurus PI menarik pelajaran dari pengalaman berbagai konflik dalam dunia pemikiran Eropa, maka Soekarno justru membina pengalaman dari alam lingkungan Jawa. Dalam prosesnya hal itu juga memperluas pengalaman seperti para mahasiswa Indonesia di

Belanda. sebab Soekarno berada ditengah-tengah kancah kegiatan politik. ia tidak memandang gejolak setempat dari suatu jarak tertentu (Legge,1985 : 108-109).

Setelah menerima usul program aksi dari PI untuk partai baru para pemimpin kelompok studi umum merasa yakin bahwa mereka harus melepaskan dukungannya kepada SRNI dan mengambil inisiatif sendiri. Penolakan itu terlihat jelas dari surat Soedjadi kepada Hatta 7 Maret 1927, berisi tentang penerimaan yang dingin terhadap rencana-rencana Hatta :

Program partai tersebut tidak sesuai dengan keinginan para pendukung anda. Tambahan lagi, ia jelas bertentangan dengan apa yang ditegaskan dalam *Indonesia Merdeka* dan dengan kritik Dr. Soetomo. Tentu saja, kita harus mempunyai suatu program yang cocok dengan semangat "non-kooperasi". Program anda juga tidak sesuai dengan keinginan rakyat (dikutip dalam Ingleson, 1979: 30).

Hal utama yang menimbulkan perbedaan pendapat adalah pandangan Hatta, bahwa partai yang diusulkannya itu harus memainkan peranan yang besar dalam bidang pendidikan dan melalui pendidikan itu menyiapkan rakyat secara pelan-pelan untuk merdeka. Hatta menekankan, meskipun partai baru tersebut dimaksudkan agar berwatak radikal namun demikian ia harus bertindak lebih hati-hati daripada yang pernah dilakukan PKI, ia mengemukakan :

Partai ini harus merupakan duplikat dari Perhimpunan Indonesia itu sendiri dan harus menjalankan tugas politik PI bagi tanah air. apalagi sekarang PKI telah tiada. Program partai baru tersebut harus agak moderat tapi tetap berdasarkan pada prinsip nonkooperasi. Tekanan utama kegiatannya haruslah mengorganisasi, bukan melakukan agitasi. Kongres tahunan harus diadakan dan delegasi ke kongres itu

harus dipilih oleh rakyat. Anggota partai yang ada tapi mau bekerja sama dengan penjajah juga harus diperbolehkan menjadi anggota kongres ini. Masalah pokok yang dibicarakan dalam kongres itu haruslah segala sesuatu yang menguntungkan pembangunan bangsa. Kongres tersebut harus benar-benar menjadi semacam dewan rakyat, yang berbeda dari "Volksraad" milik pemerintah Hindia Belanda (dikutip dalam Ingleson, 1979: 31).

Program partai yang agak moderat dari Hatta tersebut dilatarbelakangi oleh situasi pergerakan yang sedang mendapat represi yang sangat kuat dari pemerintah Hindia Belanda. Tekanan yang efektif terhadap PKI oleh pemerintah memperkuat pandangan Hatta, bahwa partai nasionalis di Indonesia hanya dapat menghindari tekanan pemerintah dengan membentuk kader yang loyal dan sadar politik. Hanya dengan menciptakan suatu kader dan struktur organisasi maka aksi massa dapat dipakai secara efektif sebagai senjata melawan pemerintah kolonial.

Program partai yang menekankan pada peranan pendidikan untuk pembentukan kader dari Hatta tersebut, dianggap oleh para pemimpin kelompok studi umum, tidak akan cukup cepat membawa rakyat ke arah kemerdekaan. Mereka lebih tertarik dengan rencana-rencana yang lebih menggariahkan untuk suatu agitasi dan konfrontasi dalam melawan pemerintah Hindia Belanda.

Para pemimpin kelompok studi umum, kemudian mulai merencanakan organisasi baru menurut garis kebijakan yang lebih dapat diterima mereka. Dua orang organisator yang pokok adalah Sartono, alumni PI dan Soekarno, yang belum lama lulus sebagai seorang insinyur dari Sekolah Tinggi

Teknik Bandung (Ingleson, 1979: 332).

Langkah selanjutnya diambil di rumah Soekarno (Bandung) pada bulan April 1927, ketika suatu kelompok yang terdiri dari Soekarno, Iskaq, Soenario, Boediarto, Tjipto Mangoekoesoemo, J. Tilaar dan Soedjadi membentuk suatu panitia persiapan untuk mempelajari dan mempertimbangkan pembentukan organisasi baru itu (Legge, 1985: 110). Sedangkan Sartono dan Anwari minta maaf karena tidak dapat hadir dalam pertemuan itu (dikutip dalam Ingleson, 1993: 68).

Dalam pertemuan itu tidak ada seorang ketua rapat yang khusus memimpin pertemuan-pertemuan mereka. Mereka lebih banyak membicarakannya sebagai teman-teman dekat dalam suasana informal. Tokoh seniornya, dr. Tjipto, agak ragu mengenai seluruh usaha ini dan memperingatkan bahaya tindakan pemerintah Hindia Belanda yang menindas suatu partai nasional yang khusus diorganisasi untuk itu, tetapi yang lain memutuskan untuk jalan terus (Legge, 1985: 110).

Akhirnya dalam pertemuan lanjutan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927, sebuah organisasi baru bernama Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) berhasil terbentuk. Orang-orang yang terlibat dalam pembentukan organisasi baru itu, seperti Sartono, Iskaq, Soedjadi, Soenario merupakan tokoh-tokoh terkemuka dari PI. Dengan demikian jelas bahwa PI tidak hanya berperan sebagai pencetus ide bagi kebutuhan akan organisasi baru, tetapi para aktivis-nya yang telah pulang ke tanah air terlibat langsung dalam

pembentukan organisasi baru tersebut.

Lebih jelas lagi tentang pembentukan PNI berkaitan hubungannya dengan PI, terlihat dalam proses persidangan Soekarno dihadapan pengadilan kolonial Hindia Belanda tahun 1930, yang mana jawaban-jawaban Soekarno dalam persidangan menunjukkan adanya hubungan yang erat antara PNI dan PI :

Presiden Landraad: "Apakah ada bekas anggota Perhimpunan Indonesia diantara tuan-tuan yang turut mendirikan PNI itu ?"

Terdakwa: "ya, Mr. Boediarto, Mr. Soenario dan Mr. Iskaq".

Presiden Landraad: "Apakah mereka itu mempunyai pengaruh pada berdirinya PNI di sini ?"

Terdakwa : "Sudah barang tentu, bahwa mereka bertiga itu dari negeri Belanda membawa azas yang bersamaan, yang lantas menjadi azas dari partai yang didirikan di negeri kita ini. Tuan-tuan Mr. Iskaq dan Boediarto dan juga yang lain-lain yang baru kembali dari Holland, mempunyai cita-cita yang hampir sama dengan cita-cita kita" (dikutip dalam Soenario, 1970:51-52).

Meskipun sudah tampak jelas pengaruh PI terhadap PNI (baik dari ide PI untuk membentuk partai nasionalis baru maupun keterlibatan bekas anggotanya dalam pembentukan organisasi baru tersebut), walaupun John D. Legge juga mengakui bahwa gagasan mengenai organisasi nasional baru tersebut telah lebih dahulu didiskusikan dikalangan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Belanda, tetapi pembentukan PNI menurutnya berasal dari hasil kerja kelompok studi umum daripada PI.

Namun demikian Soenario, mantan tokoh penggerak PI dengan tegas membantah bahwa seolah-olah PNI adalah kelanjutan atau penjelmaan semata-mata dari kelompok studi

umum di Bandung, seperti dikatakannya :

Pendeknya nyata tidak benar, seperti dikira oleh beberapa pengarang, bahwa seolah-olah PNI adalah perlanjutan atau penjelmaan semata-mata dari *Algemene Studie Club* di Bandung. Oleh karena pada waktu didirikan PNI, tidak sepatah katapun yang diucapkan oleh para pendiri mengenai *Algemene Studieclub*. Memang Mr. Boediarto dan kami sendiri misalnya belum pernah menjadi anggota dari perkumpulan itu. Selain daripada itu Ir. Darmawan Mangoekoesoemo, ketua pertama dari club itu, yang telah kami interview beberapa kali, berkata secara positif, bahwa *Algemene Studie Club* hidup terus sesudah PNI didirikan. Hanya karena kalah populer dengan PNI, yang sangat menarik perhatian massa, maka setelah lebih dari satu tahun kemudian club tersebut mati dengan sendirinya tanpa diadakan pembubaran secara resmi (Soenario, 1970: 56).

Adanya hubungan yang erat antara PI dengan PNI yang baru dibentuk tersebut juga tampak dari anggaran dasarnya yang diambil dari anggaran dasar sementara yang disusun oleh Soedjadi, Boediarto dan Iskag untuk SRNI (Ingleson, 1979: 33). Yang mana anggaran dasar tersebut pada dasarnya hanya melanjutkan dan melaksanakan ideologi PI di Belanda, yaitu Kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi dan swadaya.

Selain persamaan ideologis, PNI juga memakai bendera merah putih seperti PI, tetapi kepala kerbau ditengah-tengahnya diganti dengan kepala banteng, karena terasa lebih sesuai dengan tekad, kekuatan dan keberanian rakyat dan bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme Belanda.

Selanjutnya kelompok yang membentuk organisasi baru tersebut bermaksud menyelenggarakan kongres pada bulan September atau Desember 1927 dan pada saat itulah partai tersebut akan diresmikan. Pemilihan pengurus akan

dilaksanakan dalam kongres ini, sedangkan pengurus pusat sementara terdiri atas Soekarno sebagai ketua, Iskaq sebagai sekretaris/bendahara dan Samsi sebagai komisioner (Ingleson, 1979: 33). Tetapi kongres I baru dapat dilaksanakan pada tahun 1928 di Surabaya. Dalam kongres ini nama Perserikatan Nasional Indonesia diganti dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) (Soenario, 1970: 51).

Selama tiga tahun berikutnya PNI akan mempopulerkan ideologi yang disusun oleh anggota PI di negeri Belanda pada awal tahun 1920-an dan memainkan pengaruh besar atas jalannya pergerakan kebangsaan. Dalam pengertian ini, PNI cocok dengan harapan Hatta dan pengurus PI untuk partai baru itu pada akhir tahun 1926. Namun dalam taktik dan gayanya, dan dalam konsepsinya tentang apa yang merupakan sebuah "partai massa" keinginan PNI lain dari keinginan Hatta. Untuk partai yang ia harapkan terbentuk pada tahun 1927 itu, Hatta harus menunggu sampai pendidikan Nasional Indonesia berdiri pada Desember 1932 (Ingleson, 1993 : 70).

Jadi, para pemimpin kelompok studi umum telah menolak rencana Hatta untuk partai nasionalis baru itu dan mengambil inisiatif untuk membentuk PNI yang bebas dari pengawasan Hatta dan PI, tetapi ideologi yang dikemukakan oleh PNI selama tiga tahun berikutnya pada dasarnya sama dengan ideologi yang dikembangkan dalam PI, yaitu kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi dan swadaya.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

HUBUNGAN PERHIMPUNAN INDONESIA DENGAN SUMPAH PEMUDA

A. Propaganda Perhimpunan Indonesia Terhadap Pemuda Indonesia

Sebagai perhimpunan mahasiswa yang mempelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia PI banyak mendapat perhatian dari kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda pada umumnya. Hal tersebut tentu sangat wajar, karena para aktivis PI sudah berketetapan, bahwa bagian terpenting dari tugasnya adalah mengadakan propaganda nasionalis untuk disebarluaskan di Indonesia.

Propaganda PI yang secara kongkrit mulai menarik perhatian pemuda-pemuda di tanah air adalah isi karangan-karangan dalam majalah PI, "Indonesia Merdeka" yang sampai ke tangan mereka secara sembunyi-sembunyi (klandestin) melalui wakil-wakil alumni PI dan simpatisannya.

Tentang pengaruh PI terhadap pemuda dan pelajar di Indonesia Mohammad Hatta menyatakan, "Propaganda tentang Indonesia merdeka dan politik *non-cooperation* yang dilancarkan oleh PI" cepat memikat hati para pemuda, pelajar dan pemimpin-pemimpin yang sudah berpengalaman di tanah air" (dikutip dalam Soenario, 1970: 44). John Ingle-son juga membenarkan hal ini :

Indonesia Merdeka yang disebarluaskan di Indonesia dan artikel-artikelnya menjadi dasar dari banyak diskusi politik yang hangat di kalangan mahasiswa di

Bandung dan Batavia. Isinya, yang bebas dari pengawasan ketat pers terhadap semua surat kabar dan jurnal terbitan Indonesia, mempengaruhi pemuda nasionalis di Indonesia yang pada waktu itu sedang mencari jati diri pribadi sekaligus jati diri bangsa Indonesia. juga suatu dasar intelektual dan ideologi untuk pandangan politik mereka (Ingleson, 1993 : 39).

Memang seperti telah diuraikan di muka, bahwa pengaruh PI terasa dan terbukti dengan nyata dalam seluruh pergerakan nasional di Indonesia khususnya terhadap lahirnya Studi Klub dan PNI. Yang mana organisasi tersebut mendominasi gerakan kebangsaan pada waktu itu dan juga mempunyai hubungan yang erat dengan tercetusnya sumpah pemuda, khususnya dalam mendorong semangat persatuan di kalangan pemuda. Sudiro dkk. juga membenarkan hal itu, "Propaganda PI di Indonesia merupakan suatu sukses besar, sebab mahasiswa, pemuda-pemuda, kaum terpelajar dan sebagainya banyak dijiwai oleh cita-cita PI" (Sudiro dkk., 1974 : 39).

Pengaruh-pengaruh yang nyata akan kelihatan dalam perkembangan sejarah pergerakan nasional termasuk pergerakan pemuda di tahun-tahun setelah tahun 1925, seperti berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), Pemuda Indonesia dan Kongres Pemuda I.

B. Berdirinya Organisasi Persatuan Pemuda

1. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia

Perhimpunan itu dimulai tahun 1925. Atas inisiatif Djaksodipuro di Jakarta sejumlah mahasiswa *Technische Hoogesschool* dan *Rechtshoogeschool* mengadakan pertemuan.

Materi pembicaraan dalam pertemuan tersebut, seputar kesadaran pemuda intelektual terhadap tanah airnya. Dalam pembicaraan yang diadakan, mereka berkesimpulan bahwa tugas mereka bukan hanya untuk mencari ijazah tetapi juga harus ikut memikirkan soal-soal yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Hasil pertemuan itu kemudian dilanjutkan di Bandung dengan memanfaatkan kongres *Jong Java* dan *Jong Islamieten Bond* yang diadakan pada bulan Desember 1925 (Ahmaddani G. Martha dkk., 1984: 52). Dari banyak mahasiswa dan pelajar yang mengunjungi kedua kongres tersebut ternyata terdapat pula mereka yang dulu telah bertemu di Jakarta. Hasil pertemuan lanjutan ini adalah keinginan untuk mendirikan *Indonesische Studentbond*. Tapi gagasan tersebut baru bisa dilaksanakan delapan bulan kemudian oleh empat mahasiswa *Stovia* dan *Rechtshoogeschool*. Organisasi baru yang didirikan itu pada tahun 1926 kemudian memakai nama "Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia" (PPPI).

Asas PPPI didasarkan pada pertentangan kolonial dan cita-cita mendidik anggotanya untuk mengabdikan pada rakyat, yaitu berjuang untuk kemerdekaan bangsa (Pringgodigdo, 1977: 104). Selanjutnya Pringgodigdo menjelaskan, walaupun PPPI tidak ada hubungan organisasi secara langsung dengan PI, tapi PPPI itu telah meneruskan kemasyarakatan cita-cita PI. Mr. Soenario, mantan anggota PI, juga membenarkan hal itu :

Berdirinya PPPI merupakan reaksi para mahasiswa

sekolah-sekolah tinggi di Jakarta (Soegondo, Sowirjo, Sigit dan lain-lain) atas perjuangan pemuda-pemuda dari PI (Soenario, 1970 : 58).

Sementara itu J.Th. Petrus Blumberger menyatakan :

"PPPI" (*tracht eenigszins de plaats te vervullen van de Perhimpunan Indonesia in Nederland en in haar orgaan "Indonesia Raja" (propageert het streven naar een "Groot Indonesia Merdeka" (berusaha untuk sedikit banyak mengisi tempat PI di Nederland dan dalam majalahnya "Indonesia Raya" mempropagandakan usaha ke arah "Indonesia Raya yang Merdeka" (dikutip dalam Soenario, 1979 : 59).*

Peranan seperti tersebut dapat terjasi karena PPPI pada waktu itu selalu berhubungan dengan PI. PI dalam waktu-waktu tertentu mengirimkan majalah *Indonesia Merdeka* ke Indonesia. Sebaliknya PPPI mengirimkan majalah *Indonesia Raya* dan berita-berita penting ke Belanda.

Sementara itu secara lebih tegas A.K. Pringgodigdo menyatakan bahwa jasa PPPI terletak dalam hal mempersatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda menjadi satu organisasi (Pringgodigdo, 1977 : 104). Dalam kedudukan ini PPPI dianggap sebagai "Saudara Tuanya". PPPI di kalangan perkumpulan-perkumpulan pemuda berpengaruh besar, sebab anggota-anggotanya, yaitu mahasiswa, bagi pelajar-pelajar menengah adalah menjadi saudara tua atau kakak kelas. Disamping itu anggota PPPI banyak yang merangkap menjadi pimpinan perkumpulan pemuda.

Hubungan dan keadaan itulah yang akhirnya menyebabkan, anjuran dan usul PPPI kemudian menimbulkan fusi antara perkumpulan-perkumpulan pemuda.

2. Kongres pemuda I

Keinginan untuk bersatu yang selalu diserukan dan dihidup-hidupkan oleh PI dan PPPI cepat bisa tertanam dalam sanubari pemuda-pemuda Indonesia. Sebagai akibatnya pada 30 April - 26 Mei di Jakarta diadakan kongres pemuda Indonesia pertama.

Kongres Pemuda I dihadiri oleh wakil-wakil organisasi atau perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti *Jong Java*, *Jong Sumatera Bond*, *Jong Ambon*, Sekar Rukun, *Jong Islamieten Bond*, *Studerende Minahassers*, *Jong Bataks Bond* dan Pemuda Kaum Theosofi (Mardanas Safwan, 1973: 23). Kongres diselenggarakan oleh sebuah panitia yang terdiri dari organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan pemuda. Kongres Pemuda I ini dipimpin oleh Mohammad Tabrani.

Tujuan utama kongres Pemuda I adalah untuk membentuk dan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yakni sebuah badan pusat dengan maksud : (1) memajukan faham persatuan dan kebangsaan. (2) mempererat hubungan antara sesama perkumpulan-perkumpulan pemuda kebangsaan.

Oleh karena itu, dalam kongres banyak pidato-pidato yang berjudul "*Indonesia Bersatu*". Para pemuda diharapkan memperkuat rasa persatuan yang harus tumbuh mengatasi kepentingan golongan, agama, dan daerah. Juga secara jelas diuraikan tentang sejarah perjuangan Indonesia, dan ditekankan masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian pemuda untuk diresapkan dan dihayati dalam rangka mencapai

cita-cita Indonesia Merdeka. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I itu, antara lain ialah :

- a. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia: (walaupun dalam hal persatuan ini masih tampak samar-samar).
- b. Usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot, dan lain-lain.

Sungguhpun di dalam Kongres Pemuda I belum dicapai atau diwujudkan satu organisasi atau perkumpulan pemuda yang tunggal, namun Kongres Pemuda I telah menambah gelora semangat persatuan pemuda-pemuda Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia tidak berputus asa. Mereka adalah kelompok pejuang persatuan dan kesatuan nasional Indonesia yang militan dan sungguh-sungguh menyadari betapa pentingnya persatuan dan kesatuan nasional Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tanah air dan bangsa.

3. Pemuda Indonesia

Semangat persatuan yang semakin kuat sejak Kongres Pemuda I, tampak pada pemuda-pemuda di Bandung, khususnya mereka pernah menjadi anggota PI bergabung, dalam *Aglemene Studie Club* pimpinan Soekarno melihat perlunya pembaharuan pandangan atas organisasi pemuda kedaerahan.

Mereka merasa bahwa sebuah organisasi pemuda yang lepas dari sifat kedaerahan dan netral terhadap agama sangat diperlukan. Dengan kebangsaan sebagai dasar organisasi, semua pemuda dapat diikutsertakan. Jadi yang

organisasi. semua pemuda dapat diikutsertakan. Jadi yang diajukan para pemrakarsa ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh PPPI. Bedanya, PPPI lebih banyak disponsori oleh para pemuda pelajar yang bersekolah di dalam negeri, sedangkan kelompok Bandung ini kebanyakan pemuda terdidik yang pernah bersekolah di luar negeri. Beberapa tokoh di antara mereka yang baru pulang ialah Soegiono (KRT Josodiningrat), Joesoepadi, Soewadji, Moh. Tamsil, Soebagio Reksodipuro, Assaat, Roesmali, Soenario, Sartono, Iskak, Boediarto, Wirjono, dan lain-lain. Pada tanggal 20 Februari 1927 di Bandung berdirilah sebuah organisasi pemuda yang bersifat nasional yang dinamakan Jong Indonesia (Sudiro dkk., 1974: 43-44).

Tujuan *Jong Indonesia*, ialah menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia yang bersatu, sesuai dengan tujuan PI seperti dinyatakan dalam *Indonesia Merdeka* :

Wij kunnen de geboorte van Jong Indonesia slecht met vreugde begroeten. Zij is geheel in de geest van de Ferhimpunan Indonesia opgebouwd. (kita hanya tinggal menyambut lahirnya Jong Indonesia itu hanya dengan gembira. Ia adalah dibangun sesuai dengan jiwa PI) (dikutip dalam Soenario, 1970: 59).

Para pemimpin organisasi Jong Indonesia ini ialah Soegiono, Soenardi, Moeljadi, Soepangat, Agus Prawiranata, Soekamso, Soelasmis, Kotjo Soengkono dan Abdoel Gani. Sedangkan ketuanya pertama kali, yaitu Soegiono. Untuk cabang Jakarta dan Bandung mempunyai bagian untuk pemuda yang diberi nama "*Putri Indonesia*".

Mengenai gerakannya, organisasi ini belum ikut langsung dalam gerakan politik. Namun demikian tetap menjalankan kegiatan-kegiatan ke arah persatuan, karena masalah persatuan dan kesatuan mendapat perhatian penuh dalam organisasi *Jong Indonesia*. Kegiatan-kegiatan itu antara lain : bekerja bersama-sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda lain, memajukan kepanduan kebangsaan Indonesia dan berolah raga bersama (Pringgodigdo, 1977: 103).

Dalam waktu yang tidak lama *Jong Indonesia* memperoleh pengikut yang banyak. Sejumlah cabang *Jong Indonesia* berhasil dibentuk antara lain di Yogyakarta, Solo dan Jakarta. Untuk pengurus pusat tetap masih berkedudukan di Bandung. Dengan banyak cabang tersebut *Jong Indonesia* pada tanggal 28 desember 1927 mengadakan kongresnya yang pertama (Ahmaddani G. Martha, 1984: 55).

Kongres pertama yang diadakan di Bandung menghasilkan beberapa keputusan penting antara lain :

1. Nama organisasi yang sebelumnya masih dalam bahasa Belanda, sesuai dengan keinginan untuk memajukan bahasa Nasional kemudian dirubah menjadi "*Pemuda Indonesia*".
2. Bahasa Melayu (Indonesia) ditetapkan sebagai bahasa pengantar dalam organisasi pemuda Indonesia.
3. Gagasan PPPI untuk membentuk wadah fusi, asal semua organisasi pemuda lainnya juga ikut serta dalam badan fusi yang akan dibentuk. Seandainya ada organisasi

pemuda yang tidak menyetujui maksud tersebut maka Pemuda Indonesia akan menetapkan pendiriannya kemudian (Sudiro dkk., 1974: 44).

Memperhatikan hasil kongres tersebut menunjukkan, bahwa Pemuda Indonesia sangat mengarahkan perhatiannya pada masalah persatuan nasional, sama dengan yang dilakukan oleh PPPI, PNI dan PI. Adanya persamaan perhatian itu, karena Pemuda Indonesia mempunyai kedekatan hubungan dengan PNI. Kedekatan itu dapat terjadi karena dorongan untuk mendirikan organisasi pemuda Indonesia para mantan anggota PI dan sekaligus para pendiri PNI, seperti Sartono, Iskaq, Boediarto dan Soenario.

Dengan demikian antara PI, PNI, PPPI dan Pemuda Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat, khususnya dalam kedekatan ideologi. Dan PPPI serta pemuda Indonesia itu merupakan dua organisasi pemuda yang sangat aktif dalam menggalang persatuan di kalangan pemuda. Dalam kongres Pemuda II 1928 kedua organisasi itu mempunyai peranan yang penting.

4. Kongres Pemuda II

Seperti telah disebut di muka, walaupun Kongres Pemuda I belum berhasil membentuk sebuah wadah tunggal di kalangan pemuda, namun itu tidak berarti usaha ke arah penyatuan organisasi pemuda terhenti. Bulan-bulan pertama setelah kongres selesai, panitia kongres, yang tidak membubarkan diri terus meneruskan usaha-usahanya.

Mereka tetap yakin, bahwa pada suatu saat badan atau wadah persatuan yang mereka dambakan pasti akan terwujud. Maka atas inisiatif *Jong Java* pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan lagi pertemuan lanjutan atau dalam istilah pada waktu itu dinamakan *Na - Conferentie*. Hadir dalam pertemuan ini wakil-wakil : *Jong Java*, *JSB*, *JIB*, *Jong Bataks*, *Ambonsche Studeerenden*, *Jong Celebes*, *Jong Minahasa*, Sekar Rukun dan Panitia Kongres Pemuda I. Pertemuan lanjutan ini dipimpin oleh M. Tabrani (Ahmaddani G. Martha dkk., 1984: 63).

Agenda pertemuan berkisar pada masalah penyatuan organisasi pemuda dalam satu wadah tunggal. Perdebatan dan tukar pikiran yang terjadi pada Kongres Pemuda I dilanjutkan pada pertemuan ini. Mereka sepakat untuk meneruskan usaha penyatuan organisasi pemuda, yang telah dirintis sejak Kongres Pemuda I.

Masing-masing organisasi peserta *Na-Conferentie* setuju merundingkan lebih lanjut keputusan tersebut dengan pengurus organisasi masing-masing dan meneruskan konsultasi-konsultasi dengan pihak panitia. Dengan demikian keinginan untuk membentuk wadah tunggal masih ditangguhkan sampai waktu yang tidak terbatas.

Usaha selanjutnya, diadakan pertemuan pada tanggal 20 Februari 1927. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh : *Jong Java*, *JSB*, Sekar Rukun, *Jong Bataks Bond*, *JIB*, *Jong Ambon*, *Jong Minahasa* dan PPPI. Seperti pada pertemuan 15 Agustus

1926. pertemuan kali ini juga tidak mengalami kemajuan pesat. Fusi yang diidam-idamkan sebagai organisasi pemuda belum disepakati para peserta.

Kegagalan pertemuan 20 Februari 1927 tidak membuat para tokoh pemuda menghentikan kegiatannya. Pada tanggal 23 April 1927 diadakan lagi pertemuan. Pertemuan ini dihadiri oleh *Jong Java*, *JSB*, *Jong Bataks Bond*, *Jong Ambon*, *Jong Minahasa*, Pemuda Indonesia dan PPPI (Ahmaddani G. Martha dkk., 1984: 64-65). Mereka mencoba kembali membahas persoalan-persoalan yang belum terselesaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Walaupun tujuan pokok untuk mewujudkan wadah tunggal masih belum tercapai namun pembicaraan mengalami banyak kemajuan.

Pertemuan 23 April itu berhasil merumuskan dasar-dasar pikiran bersama sebagai landasan untuk langkah-langkah berikutnya. Masalah-masalah yang mereka sepakati bersama meliputi : (1) Bahwa cita-cita Indonesia Merdeka harus menjadi cita-cita semua putra Indonesia. (2) Semua perkumpulan pemuda harus berdaya upaya menuju penyatuan organisasi pemuda dalam satu wadah tunggal (Gadenboek *Jong Java*, 7 Maret 1915 - 20 April 1930: 325, seperti dikutip Ahmaddani G. Martha, 1984: 65).

Memperhatikan hasil pertemuan tersebut menunjukkan, bahwa pemikiran tokoh-tokoh pemuda mengalami kemajuan dibandingkan dengan apa yang telah mereka capai pada kongres pemuda I. Mereka semakin menyadari akan pentingnya persatuan diantara pemuda, maka pada pertemuan 23 April

mereka tegas-tegas mengemukakan perlunya satu wadah tunggal bagi semua organisasi pemuda. Selain itu untuk pertama kali para pemuda bersama-sama mencetuskan tujuan akhir perjuangan adalah Indonesia Merdeka.

Disamping itu situasi umum pergerakan banyak membantu dan mendorong organisasi pemuda untuk saling mendekati, menentukan pilihan fusi atau federasi. Bantuan dan dorongan itu terlihat dengan terbentuknya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tanggal 17 Desember 1927. Program PPPKI adalah :

1. Berusaha untuk mencapai dan menyamakan arah aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi, dengan kerjasama antara anggota-anggotanya.
2. Menghindarkan perselisihan sesama anggotanya, yang hanya bisa melemahkan aksi kebangsaan (dikutip dalam Ahmaddani G. Martha dkk., 1973: 68).

Dengan terbentuknya PPPKI maka interaksi ke arah persatuan antara organisasi orang dewasa dengan organisasi pemuda semakin kuat. Suasana demikian menjadi semakin matang pada beberapa bulan kemudian.

Sementara itu usaha untuk mempersatukan pemuda dalam satu wadah tunggal terus berjalan. seperti pada tanggal 3 Mei 1928 digedung *Indonesia Clubgebouw*, jalan Kramat Raya 106. para pemuda sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda II (dikutip dalam Ahmaddani G. Martha dkk., 1984: 69).

Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan 12 Agustus 1928, yang berhasil menyusun komposisi dan

personalia panitia kongres, waktu dan tempat kongres, tujuan dan agenda kongres. pertemuan 12 Agustus 1928 ini dihadiri oleh utusan-utusan : PPPI, *Jong Java*, *JIB*, Pemuda Indonesia, *Jong Celebes*, *Jong Ambon*, *Jong Bataks Bond* dan Kaum Pemuda Betawi.

Sesuai dengan keputusan pertemuan 12 Agustus 1928 itu, maka susunan panitia Kongres Pemuda II sebagai berikut :

1. Ketua : Sugondo Joyopuspito, mahasiswa Fakultas Hukum dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia.
2. Wakil Ketua : Joko Marsaid, mahasiswa Fakultas Hukum dari *Jong Java*.
3. Sekretaris : Mohammad Yamin dari *Jong Sumatranen Bond*.
4. Bendahara : Amir Syarifuddin dari *Jong Bataks Bond*.
5. Pembantu I : Johan Mohammad Cai dari *Jong Islamieten Bond*.
6. Pembantu II : Kacasungkono dari Pemuda Indonesia.
7. Pembantu III : Senduk dari *Jong Ambon*.
8. Pembantu IV : J. Leimena dan *Jong Ambon*.
9. Pembantu V : Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi
(dikutip dalam Sagimun, 1988: 166).

Dari susunan pengurus itu terlihat PPPI mendapat kehormatan untuk memimpin panitia kongres. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya posisi PPPI dalam mewujudkan persatuan di kalangan pemuda.

Mengenai peranan PPPI dalam Kongres Pemuda II.

Mr. Soenario dengan tegas menyatakan :

Maka atas inisiatif PPPI. yang bercita-cita menyatukan (melalui fusi) semua perhimpunan pemuda, sesuai dengan perjuangan PI dan PNI. diadakan di Jakarta kongres pemuda-pemuda Indonesia yang kedua (27-28 Oktober 1928) dibawah ketua Soegondo (Soenario. 1970 : 60).

Dengan besarnya pengaruh PPPI dalam persiapan sampai pelaksanaan kongres pemuda II, menunjukkan pula secara tidak langsung pengaruh PI terhadap kongres pemuda II tersebut, karena seperti dinyatakan oleh J.Th. Petrus Blumberger dan Pringgodigdo di muka, bahwa keberadaan PPPI pada dasarnya adalah penerus sekaligus penyebar cita-cita atau ide-ide PI.

Disamping itu panitia kongres banyak mendapat bantuan dan nasehat-nasehat dari tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman antara lain Mohammad Nasif, Arnold Mononutu, Sartono dan Soenario. Tokoh-tokoh tersebut adalah mantan anggota PI yang telah pulang ke Indonesia untuk menyebarkan/ mempropagandakan ide-ide PI. Dengan demikian, keterlibatan mereka dalam proses pelaksanaan kongres menunjukkan adanya hubungan PI dengan Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda.

Disamping terlibat dalam memikirkan jalannya kongres, yaitu sebagai penasehat (Sagimun, 1988: 169). Anggota PI yang telah pulang ke Indonesia, juga terlibat secara langsung dalam acara kongres. Misalnya Sartono yang mewakili PNI, yang mana PNI pada dasarnya adalah

pelembagaan dari ideologi PI (empat pokok pikiran PI) dan dengan PNI dimasyarakatkan empat pokok pikiran tersebut di Indonesia, sehingga pengaruhnya sangat terasa dalam kongres pemuda II.

Mantan anggota PI lainnya yang ikut hadir dalam kongres pemuda II adalah Soenario, mewakili Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (PAPI) dan Arnold Mononutu, mewakili Perserikatan Minahasa. Kehadiran mereka semakin menguatkan semangat persatuan dan kesatuan nasional para pemuda. Hal ini sesuai dengan kebijakan PI terutama dalam mempropagandakan asas-asasnya ke Indonesia. Seperti sudah disebut di muka PI menganjurkan kepada anggotanya yang pulang ke tanah air, agar dengan keras menyebarkan ide-idenya. Ide-ide atau pokok pikiran PI terutama mengenai kesatuan nasional, solidaritas dan non-kooperasi benar-benar terwujud dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda, yang berbunyi :

PERTAMA : KAMI PUTERA DAN PUTERI INDONESIA MENGAKU BERTUMPAH DARAH YANG SATU, TANAH INDONESIA.

KEDUA : KAMI PUTERA DAN PUTERI INDONESIA MENGAKU BERBANGSA SATU, BANGSA INDONESIA.

KETIGA : KAMI PUTERA DAN PUTERI INDONESIA MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA.

Dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda menunjukkan pemuda Indonesia telah mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit dan perbedaan berdasarkan kedaerahan untuk menciptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu

sesuai dengan tujuan PI. Oleh karena itu Hatta mengatakan

Adalah benar dan tidak dapat disangkal, bahwa sebagian besar dari pemuda-pemuda Indonesia di tanah air telah terpicat oleh asas-asas kita. Dan mereka tidak tinggal diam menanam dan menghidupkan cita-cita yang dianjurkan oleh Perhimpunan Indonesia di atas persada tanah air, yaitu Indonesia satu dan tidak terbagi-bagi. Dalam tahun 1928 pergerakan pemuda yang bersifat kedaerahan, seperti *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Ambon*, *Jong Celebes* dan lain-lain, bergabung menjadi pemuda Indonesia, dengan mengambil suatu keputusan yang bersejarah, yang menentukan bentuk Indonesia untuk masa datang (dikutip dalam Soenario, 1970 : 60-61).

Dengan demikian antara PI dengan lahirnya Sumpah Pemuda, memang ada hubungan yang erat. Hubungan itu terjalin melalui majalah Indonesia Merdeka, yang secara sembunyi-sembunyi dikirimkan ke Indonesia. Ide-ide PI yang dibawa majalah itu sangat berpengaruh terhadap pola pikir para pemuda, sehingga mereka sedikit-demi sedikit menyingkirkan sifat kedaerahan mengarah ke persatuan. Semangat persatuan yang semakin menguat di kalangan pemuda, kemudian mereka tunaikan dengan mengikrarkan sumpah pada kongres pemuda II yang terkenal dengan "Sumpah Pemuda". Yang mana sumpah tersebut merupakan perwujudan dari ide-ide (empat pokok pikiran) PI. Hubungan yang lain terjalin secara langsung dengan keterlibatan para mantan anggota PI dalam memikirkan pelaksanaan kongres pemuda II, maupun yang ikut langsung menghadiri acara kongres yang menghasilkan Sumpah Pemuda.

BAB VI

KESIMPULAN

Perubahan Perhimpunan Indonesia (PI) dari organisasi sosial menjadi organisasi politik pada mulanya dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin *Indische Partij* (IP) yang dibuang ke Belanda dan kemudian menjadi anggota *Indische Vereeniging* (IV). Pengaruh politik mereka semakin kuat dengan diterbitkannya majalah *Hindia Putera* oleh Soewardi Suryaningrat.

Semangat patriotisme yang sudah mulai tumbuh di IV semakin kuat ketika mereka merasa kecewa atas usaha dialog/kerjasama dengan pemerintah Belanda. Kekecewaan itu tampak jelas dengan diingkarinya janji November. Rasa kecewa tersebut menyadarkan IV. bahwa mereka harus percaya pada diri sendiri.

Kesadaran politik IV yang sudah mulai bangkit karena pengaruh pemimpin-pemimpin IP dan kekecewaan atas kerjasama dengan Belanda semakin meningkatkan corak politiknya setelah kedatangan generasi baru mahasiswa Indonesia yang memiliki kesadaran politik lebih tinggi dari pada generasi mahasiswa sebelumnya. Generasi baru itulah yang selanjutnya mengarahkan IV menjadi organisasi politik yang radikal.

Pada tahun 1922 mereka mengubah IV menjadi *Indonesische Vereeniging*. Dengan demikian pada tahun itu,

generasi baru mahasiswa tersebut mulai mereorganisasi perkumpulan dengan mengubah sifat, tujuan, dan kegiatannya. Proses reorganisasi yang semakin menekankan pada masalah politik tampak dari langkah mereka mengembangkan ideologi nasionalis baru yang sekuler. Dengan dasar ideologi tersebut mereka semakin radikal dalam aktivitas politiknya. Hal ini tampak dari perubahan nama majalah *Hindia Putera* menjadi *Indonesia Merdeka* pada tahun 1924. Dalam kata "Merdeka" terkandung ungkapan tentang tujuan dan usaha keras mereka. Sejak itu dan seterusnya, "Indonesia Merdeka" menjadi semboyan perjuangan mereka.

Sebagai tindak lanjut menggunakan kata *Indonesia Merdeka* maka sebulan setelah secara resmi *Indonesische Vereeniging* menjadi organisasi politik, namanya diganti menjadi *Perhimpunan Indonesia*.

Untuk menyebarkan haluan ideologinya sudah tentu PI melakukan kegiatan-kegiatan politik. Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya diarahkan pada dua sasaran.

Pertama, program-program perjuangan diarahkan untuk propaganda ke luar negeri, dengan tujuan menarik perhatian dunia internasional pada masalah-masalah Indonesia. Untuk keperluan itu, perhatian para anggotanya dibangkitkan buat soal-soal internasional seperti mengadakan kerjasama dengan organisasi mahasiswa Asia, mengikuti Kongres Demokrasi Internasional, mengikuti

Kongres Anti Penindasan Kolonial, dan mengadakan ceramah-ceramah di luar negeri.

Kedua, program-program perjuangan diarahkan untuk tanah air dengan melakukan penyusupan ke partai-partai politik yang sudah ada, seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo untuk mempropagandakan ideologinya.

Langkah penyusunan ke partai politik tersebut ditambah dengan suatu usaha keras untuk berusaha membentuk suatu organisasi nasional baru menurut citra PI dan bertujuan mengambil alih kepemimpinan gerakan kebangsaan di Indonesia. Untuk mempermudah tugas tersebut maka PI menyebarkan majalah *Indonesia Merdeka* sebagai alat propagandanya.

Rencana PI untuk membentuk organisasi nasional baru tersebut terus diusahakan dengan keras oleh para alumninya yang telah pulang ke tanah air bersama-sama dengan para aktivis politik lokal, antara lain Soekarno dan Anwari.

Aktivitas mereka dalam usaha membentuk organisasi nasional baru tersebut dipusatkan pada sebuah kelompok studi, yaitu Kelompok Studi Umum di Bandung. Rencana program untuk partai nasional baru tersebut pada awalnya datang dari Hatta, dalam proses perkembangannya berpindah ke tangan para pemimpin Kelompok Studi Umum, karena rencana Hatta dianggap kurang cepat untuk perjuangan mencapai kemerdekaan.

Namun demikian sampai terbentuknya partai nasional

baru tersebut (PNI), ideologi yang digunakan adalah ideologi PI. Jadi secara ideologis antara PI dan PNI sama, hanya dalam gaya dan polanya tidak sama dengan keinginan Hatta (PI).

Dengan demikian antara PI dan PNI terjalin hubungan yang erat. Hubungan itu terjalin baik dari ide PI untuk membentuk partai nasional baru (PNI) maupun keterlibatan secara langsung mantan anggotanya dalam proses mendirikan PNI. Kedekatan PI dengan PNI semakin kuat dengan dipakainya ideologi PI menjadi ideologi PNI.

Berdirinya PNI, dengan menyebarluaskan ideologi PI semakin meningkatkan persatuan, khususnya semangat persatuan di kalangan pemuda pada waktu itu. Semangat persatuan yang menyala-nyala di kalangan pemuda merupakan hasil propaganda PI, baik melalui majalah *Indonesia Merdeka* maupun langsung dari para alumninya yang telah pulang ke tanah air.

Semangat persatuan yang kuat tersebut mereka tunaikan dengan mengikrarkan sumpah dalam Kongres Pemuda II yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Yang mana Sumpah Pemuda itu pada dasarnya merupakan wujud dari ideologi PI, terutama mengenai kesatuan nasional, solidaritas dan non-kooperasi.

Disamping itu alumni PI tidak saja hanya mendorong semangat persatuan pemuda, baik secara pribadi atau lembaga (PNI) tetapi mereka secara langsung ikut memi-

kirkan proses pelaksanaan Kongres Pemuda II, dan bahkan mengikuti acara kongres yang menghasilkan Sumpah Pemuda tersebut. Dengan demikian jelas ada hubungan yang erat antara PI dengan Sumpah Pemuda.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution
1995 *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia* (terjemahan). Pustaka Utama, Jakarta.
- Ahmad Soebardjo
1978 *Kesadaran Nasional*. Gunung Agung, Jakarta.
- 1975 *Peranan Ide-Ide Dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*. Yayasan Idayu, Jakarta.
- Ahmaddani G. Martha, dkk.
1984 *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. PT Kalina, Jakarta.
- Arnold Mononutu
1980 *Seorang Pejuang Berkarakter*. Gunung Agung, Jakarta.
- Burger, D.H.
1957 *Sejarah Ekonomi Sosiologi Indonesia* (terjemahan). Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chafer Bayd C.
1955 *Nationalism Myth And Reality*. A Harverst Book Harcourt, Brace and World, Inc. New York
- Dahm, Bernhard
1987 *Sukarno Dan Perjuangan Kemerdekaan* (terjemahan). LP3ES, Jakarta.
- Deliar Noer
1991 *Mohammad Hatta Biografi Politik*. LP3ES, Jakarta.
- Duijs, J.E.W.
1985 *Membela Mahasiswa Indonesia Di Depan Pengadilan Belanda*. Gunung Agung, Jakarta.
- Friedmann L.L.D.W.
1961 *Politik Dunia* (terjemahan). Sumur Bandung, Bandung.
- Gottchalk
1975 *Mengerti Sejarah* (terjemahan). UI Press, Jakarta.
- Ingleson, John
1979 *Road To Exile The Indonesia Nationalist Movement 1927 - 1934*. Australian National University.

1993 *Perhimpunan Indonesia Dan Pergerakan Kebangsaan* (terjemahan). PT Temprint, Jakarta.

Kartini Kartono

1980 *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Alumni, Bandung.

Koch, D.M.G.

1955 *Menuju Kemerdekaan* (terjemahan). Yayasan Pembangunan, Jakarta.

Kohn, Hans

1961 *Nasionalisme Arti Dan Sejarahanya* (terjemahan). PT Pembangunan, Jakarta.

Legge, John D.

1985 *Sukarno Sebuah Biografi Politik* (terjemahan). Sinar Harapan, Jakarta.

1993 *Kaum Intelektual Dan Perjuangan Kemerdekaan : Peranan Kelompok Sjahrir* (terjemahan). Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Mardanas Safwan

1973 *Peranan Gedung Kramat Raya 106 Dalam Melahirkan Sumpah Pemuda*. Dinas Museum DKI Jakarta.

Margono Djojohadikoesoemo

1975 *Catatan-Catatan Dari Lembaran Kertas Yang Kumal Dr. E.F.E. Douwes Dekker*. Bulan Bintang, Jakarta.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed)

1987 *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.

Moedjanto, G.

1974 *Sejarah Indonesia*. Kanisius, Yogyakarta.

Mohammad Hatta

1960 *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*. PT Pembangunan, Jakarta.

1976 *Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*. Yayasan Idayu, Jakarta.

1966 *Peranan Pemuda. Menuju Indonesia Merdeka. Indonesia Adil dan Makmur*. Angkasa Bandung, Jakarta.

1979 *Memoir*. Tintamas, Jakarta.

 1980 *Nama Indonesia (Penemuan Komunis ?)*. Yayasan Idayu, Jakarta.

Nagazumi, Akira

1986 *Indonesia Dalam Kajian Sarjana Jepang. Perubahan Sosial Ekonomi Abad XIX dan XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme*. PT Midas Surya Gramindo, Jakarta.

Nazir, M.

1985 *Metodologi Penelitian*. Ghalia, Jakarta.

Neil, Robert van

1984 *Munculnya Elit Modern Indonesia* (terjemahan). Pustaka Jaya, Jakarta.

Pringgodigdo, A.K.

1977 *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Dian Rakyat, Jakarta.

Renan, Ernest

1994 *Apakah Bangsa Itu ?* (terjemahan). Alumni, Bandung.

Rose, Mavis

1991 *Indonesia Merdeka. Biografi Politik Mohammad Hatta*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sagimun MD

1992 *90 Tahun Prof. Mr. Soenario (Manusia Langka Indonesia)*. Rosdajaya Putera, Jakarta.

 1988 *Peranan Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi*. Bina Aksara, Jakarta.

Sargent, Lyman Tower.

1986 *Ideologi Politik Kontemporer* (terjemahan). Bina Aksara, Jakarta.

Sartono Kartodirdjo

1990 *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. PT Gramedia, Jakarta.

 1982 *Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Gramedia, Jakarta.

Sartono Kartodirdjo dkk.

1977 *Sejarah Nasional Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Shiraishi, Takhashi

1990 *An Age Motion. Popular Radicalism in Java 1912 - 1926*. Cornell University Press.

Sitorus, L.M.

1988 *Sejarah Pergerakan Dan Kemerdekaan Indonesia*.
Dian Rakyat, Jakarta.

Soehardjo, H.S.

1983 *Sejarah Asia Tenggara I*. Jurusan Sejarah dan
Geografi Sosial IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta.

Soekarno

1964 *Di Bawah Bendera Revolusi*. Gunung Agung, Jakarta.

Soenario

1970 *Perhimpunan Indonesia Dan Pemanannya Dalam
Perjuangan Kita*. Seminar Sejarah Nasional II
tanggal 26 - 29 Agustus 1970, Yogyakarta.

Sudiro dkk.

1974 *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Yayasan Gedung-Gedung
Bersejarah, Jakarta.

Suhartono

1994 *Sejarah Pergerakan Nasional*. Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.

Soesanto Tirtoprodjo

1989 *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. PT Pem-
bangunan, Jakarta.

Winarno dan Surachman

1982 *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan
Teknik*. Tarsito, Bandung.

Zainoel Ihsan, A., dan Pitut Soeharto (ed)

1981 *Aku Pemuda Kemarin Di Hari Esok*. Jaya Sakti,
Jakarta.





PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

geerd, om een groot feest hier in Indië te houden: het eeuwfeest van Neerlands Vrijheid. Het mag voor de inwoners van deze landen niet ongemerkt voorbij gaan, dat het in de komende maand November juist honderd jaren zal zijn geweest, dat Nederland een koninkrijk werd en de Nederlanden een onafhankelijke natie vormden, al stond het als zoodanig ook achteraan in het gelid der mogendheden.

Uit een oogpunt van redelijkheid valt inderdaad veel te zeggen voor deze aanstaande viering van een nationale gebeurtenis. Iminers pleit dat alleen voor de vaderlandsliefde der Nederlanders, voor hun pieteit jegens het land, waar eens hun voorvaderen heldendaden verrichtten. De herdenking zal zijn een uitdrukking van hun gemoed van trots, dat een eeuw geleden het aan Nederland gelukt was, het vreemde overheerschingsjuk af te schudden en zelf een natie te vormen.

Ik kan mij gemakkelijk in den gemoedstoestand indenken van den Nederlandschen patriot van thans, wien het gegeven is zulk een jubileum te vieren. Want ook ik ben patriot en, gelijk de Nederlander van zilver nationale richting zijn Vaderland lief heeft, zoo heb ook ik mijn eigen Vaderland lief, meer dan ik zeggen kan.

Wat een vreugd, wat een genot zal het wezen een nationalen dag van zoo groot gewicht te kunnen herdenken. Ik wilde, dat ik voor een ogenblik Nederlander kon wezen, niet een Staatsblad-Nederlander, of in een salver-puyavert-coupe zamen van het Nederland genees-

gagsan untuk mengadakan suatu pesta besar di Hindia; pesta satu abad Kemerdekaan negeri Belanda. Bagi penduduk di daerah-daerah ini tidak boleh dilewatkan begitu saja bahwa pada bulan November yang akan datang, tepat seratus tahun yang lalu, negeri Belanda menjadi negara Kerajaan dan merupakan suatu bangsa yang merdeka, walaupun dalam kedudukan tersebut negeri ini mendapat tempat yang paling akhir dalam barisan negara-negara yang berkuasa.

Memang, dilihat dari sudut kewajaran, banyak hal yang patut dikecam mengenai perayaan peristiwa nasional mendatang ini, oleh karena menunjukkan betapa besar cinta mereka terhadap tanah airnya di mana nenek moyang mereka pernah menunjukkan kepahlawanannya. Peringatan itu akan merupakan pencetusan seluruh rasa kebangsaan mereka atas berhasilnya bangsa Belanda melepaskan diri dari penindasan penjajah asing satu abad yang lalu dan membentuk suatu bangsa sendiri.

Saya dengan mudah dapat menyelami perasaan patriotisme Belanda yang ada pada mereka sekarang, mereka yang dapat merayakan hari ulang tahunnya. Karena saya pun seorang patriot, dan seperti orang Belanda yang berdirin nasional murni yang mencintai Tanah Airnya, saya pun mencintai Tanah Air saya lebih daripada yang dapat saya katakan.

Betapa menyenangkan, betapa nikmatnya bila dapat memperingati suatu peristiwa nasional yang begitu besar artinya. Saya ingin sekali menjadi orang

Seandainya... *)

ALS IK EENS NEDERLANDER WAS

R. M. SOEWARDI SOERJANINGRAT

In couranten-artikelen wordt thans *Dalam makalah-makalah harian seten overvloede het denkbeeld gepropagandankarang banyak sekali dipropagandakan*

*) De brochure "Als ik eens Nederlander was..." (Comité Boeken Promotie van de Nederlandsche Cultuur in de Oost-Indië) uitgaaf van "De Tijdschrift" Schiedam, 1913, no. 67.

van vreemde smetten. Wat zou ik dan jubelen zis straks in November de lang verbeide dag komt, de dag der vrijheidsfeesten. Wat zou ik dan juichen bij het vrijelijk zien wapperen der Nederlandsche vlag, met het strookje Oranje daarboven. Ik zou tot heesch worden toe medezingen het „Wilhelmus” en het „Wien Neerlands bloed”, als straks de muziek zou inzetten. Ik zou verwaand kunnen zijn van al die manifestaties, ik zou God danken in de christelijke kerk voor zijn goedheid, ik zou een wensch, een smeekbede ten hemel zenden om 't behoud van Neerlands macht, ook in deze Koloniën, opdat het ons mogelijk zou blijven, onze grootheid te handhaven met deze kolossale macht achter ons. Ik zou alle Nederlanders hier in Insulinde vragen om financieelen steun, niet alleen voor het feest zelf, doch ook voor de vlootplannen van Colijn, die zoo ijverde voor het behoud van Neerlands onafhankelijkheid, ik zou ik weet waarlijk niet, wat ik dan verder zou doen, als ik Nederlander was, want ik zou tot alles in staat zijn, gelooft ik.

Neen, toch niet! Als ik Nederlander was, zou ik nog niet tot alles in staat zijn. Ik zou inderdaad wenschen, de komende onafhankelijkheidsfeesten zoo uitgebreid mogelijk te organiseren, doch ik zou niet willen, dat de inboorlingen dezer landen aan die herdenking mee deden. Ik zou hen verbieden mee te jubelen bij de festiviteiten, ik zou zelfs het feestremin wenschen af te zetten, opdat geen inlander wat zoude kunnen zien van onze uitgelaten vroegde bij deze herdenking van onze vrijheidsdag.

Denk nu, mijn lieve lezers, om

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Belanda, walaupun hanya untuk sementara saja, bukan seorang Belanda. Lembaran Negara Hindia Belanda (Staatsblad-nederlander), tetapi seorang Belanda yang sebenarnya, anak negeri Belanda Raya, bebas dari segala percampuran darah asing. Betapa saya akan bersuka cita, bila hari yang didambakan dalam bulan Desember yang akan datang ini tiba, hari pesta-pora kemerdekaan. Betapa saya akan bersorak sorai melihat bendera Belanda dengan jumbai jingga di atasnya melambai-lambai dengan bebasnya. Saya akan turut menyanyikan lagu "Wilhelmus" (Lagu Kebangsaan Belanda - penterj.) dan "Wien Neerlands bloed" sampai suaraku parau, bila nanti musik dilagukan orang.

Saya mungkin akan merasa bangga atas segala luapan perasaan itu; saya akan bersyukur kepada Tuhan di gereja Kristen atas kebbaikannya, saya akan memanjatkan permohonan, memanjatkan do'a kepada Tuhan di sorga untuk terpeliharanya kekuasaan negeri Belanda, juga di daerah-daerah jajahan ini, sehingga kami masih tetap dapat mempertahankan kebesaran kami dengan dukungan kekuasaan yang luar biasa besarnya. Saya akan minta kepada semua orang Belanda di Kepulauan Hindia ini uang sumbangan, bukan hanya untuk keperluan pesta saja, melainkan juga untuk rencana armada laut Colijn, yang demikian gigih berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Belanda, saya akan entah apa lagi, tak tahulah saya apa yang masih akan saya lakukan, seandainya saya orang Belanda; karena saya kira saya akan berani berbuat apa saja.

Oh, tidak juga! Seandainya saya

advocatuurheid in het hok me zoo ongegeneerd, zoo ongepast, in den wij- ik ben nog altijd Nederlander in verbeelding - den inlander laten mede juichen bij de herdenking onzer onafnankelijckheid. Wij kwetsen hen eerstens in hun fijn cergevoel, doordat wij hier in hun geboorteland, waar wij overheerschen, onze eigen vrijheid herdenken. Wij jubelen thans, omdat we honderd jaren geleden verlost werden van een vreemde heerschappij; en dit alles zal nu plaats hebben ten aanschouwe van hen, die nu nog steeds onder onze heerschappij staan. Zouden wij niet denken, dat die arme geknechten ook niet snakten naar het oogeblik, dat ze evenals wij nu, eenmaal zulke feesten zouden kunnen vieren?! Of meenden wij soms, dat wij door onze lang doorgezette, geestdoodende fnuik-politiek den inboorlingen alle menschelijke zielsgevoelens hadden gedood? Dan zouden wij toch zeer zeker bedrogen uitkomen, want zelfs de onbeschaafde volken verwenschen allen vorm van overheersching. Als ik Nederlander was, zou ik dan ook geen onafhankelijkheidsfeest vieren in een land, waar wij het volk zijn onafhankelijkheid onthouder.

Geheel in de lijn van dezen gedachtengang is het onbillijk met alleen, maar ook ongepast, om de inlanders te doen bijdragen ten bate van het feestfonds. Beleedigt men ze reeds door 't idee der meestelijke herdenking zelf van Neerlands vrijheid, thans maakt men ook hun beurzen ledig. Voorwaar een moreele en stoffelijke beleediging!

Wat denkt men toe met al dat feestgevier te kunnen bereiken, hier in Indië? Als het een uiting van nationale vroegde moet beduiden, dan is het wat onverstan-

orang Belanda, belum tentu saya berani berbuat segala-galanya. Memang, saya akan berharap agar pesta-pora hari kemerdekaan itu diselenggarakan semeriah mungkin, akan tetapi saya tidak ingin kaum pribumi di daerah-daerah ini turut serta dalam perayaan H.U.T. tersebut, akan saya larang mereka turut bersuka-cita dalam perayaan-perayaan itu, bahkan tempat berpesta-pora ingin kupagari, agar orang-orang pribumi tidak dapat melihat sedikit pun kegembiraan kami yang meluap-luap dalam memperingati hari kemerdekaan kami itu.

Nampaknya seperti kurang sopan, menurut perasaan saya, seolah-olah kami sudah tidak tahu malu, sungguh tidak pantas, bila kami - saya masih tetap orang Belanda dalam angan-angan saya - menyuruh orang pribumi turut bersorak-sorai pada peringatan kemerdekaan kami. Kami pertama-tama melukai rasa harga diri (kehormatan) mereka yang peka itu, karena kami di tanah tumpah darah mereka yang kita jajah ini memperingati hari kemerdekaan kami sendiri. Kita sekarang bersuka-cita oleh karena seratus tahun yang lalu kami terlepas dari jajahan kekuasaan asing, dan kesemuanya itu akan dilakukan di hadapan mata mereka yang hingga sekarang masih tetap dijajah oleh kami. Tidakkah seharusnya kita memikirkan, bahwa mereka yang tertindas sangat mendambakan saat di mana mereka seperti kami sekarang akan dapat pula merayakan pesta-pora seperti ini? Atau apakah mungkin kami mengira bahwa kami, setelah menjalankan politik pemerintahan yang memanjakan jiwa selama berabad-abad itu, telah membinuh segala perasaan da-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dig, om het hier in een overheerscht land te doen. Men stoot het volk hier voor het hoofd. Of wil men daarmede een grootheids-betooging in politieken zin? Dan moet zulke politiek al zeer onpolitiek wezen. Vooral in deze tijden, waar het volk van Indië bezig in zich te wormen en nog in een slaapdrongen periode van ontwakning verkeert, is het een tactische fout, om dat volk het voorbeeld te geven, hoe het eventueel zijn vrijheid moet vieren. Men prikkelt zoo de hartstochten, men ontwikkelt onbewust den vrijheidszin, de hoop op een komende onafhankelijkheid. Zonder opzet roept men het inlandsche volk toe: „Kijkt, menschen, hoe wij onze onafhankelijkheid herdenken; hebt de vrijheid lief, want het is een waar genot, om een vrij volk te wezen, vrij van alle overheersching!”

Als de maand November dezes jaars voorbij zal zijn, zullen de Nederlandsche kolonisten een politiek waagstuk hebben uitgehaald. De risico zij dan op hun rekening. Ik zou de verantwoordelijkheid niet willen dragen al was ik ook een Nederlander.

Als ik Nederlander was, nu op dit moment, dan zou ik protesteeren tegen het denkbeeld dezer herdenking. Ik zou in alle couranten schrijven, dat het verkeer is, ik zou mijn mede-kolonisten waarschuwen, dat het gevaarlijk is in dezen tijd vrijheidsfeesten te houden, ik zou alle Nederlanders afraden, om het ontwakende, vrijmoedig geworden volk van Neêrlandsch Indië voor het hoofd te stooten en het mogelijk tot brutaliteit te brengen. Waarachtig, ik zou protesteeren met alle kracht, die in me is.

Doch is ben geen Nederlander,

lam jiwa mereka secara tuntas? Kalau begitu, kami benar-benar akan terkecoh, sebab bahkan bangsa-bangsa yang paling tidak beradab sekali pun mengutuk segala bentuk penjajahan. Maka, seandainya saya ini orang Belanda, tidak akan saya adakan pesta peringatan kemerdekaan di suatu negeri, yang rakyatnya telah kita rampas kemerdekaannya.

Bila kita mengikuti jalan pikiran ini seluruhnya maka bukan saja hal yang demikian itu tidak adil, melainkan sungguh tidak pantas untuk meminta kaum pribumi memberikan sumbangannya untuk dana penyelenggaraan pesta tersebut. Sudah kita hina mereka dengan gagasan memperingati hari kemerdekaan Belanda dengan berpesta-pora, sekarang ditambah lagi dengan menguras habis dompet mereka. Betul-betul suatu penghinaan moral maupun material!

Apakah yang ingin mereka capai dengan mengadakan segala pesta-pora itu di sini, di Hindia? Bila itu dimaksudkan sebagai luapan kegembiraan, maka kiranya tidak bijaksana untuk melakukannya di sini, di suatu negara yang dijajah. Mereka melukai hati rakyat negeri ini. Atau apakah mereka hendak menjadikan suatu pertunjukan kemegahan secara politik? Bila benar demikian, maka tindakan politik yang demikian itu benar-benar sangat tidak politis. Lebih-lebih di waktu-waktu sekarang. Di kala rakyat Hindia sedang sibuk membina diri dan berada dalam keadaan hendak bangun walaupun masih agak mengantuk, merupakan suatu kesalahan taktik untuk memberikan kepada rakyat suatu contoh tentang bagaimana mereka pada suatu waktu harus merayakan kemer-

ik ben slechts een bruine zoon van dit tropisch land, een inboorling van deze Nederlandsche Kolonie, en daarom ook zal ik niet protesteeren.

Want als ik protesteerde, zou het mij kwalijk worden genomen. Ik zou immers het Nederlandsche volk, dat hier in mijn land regeert, beleedigen en van mij afstooten. En dat wil ik niet, dat mag ik niet. Als ik Nederlander was zou ik immers het inlandsche volk niet voor het hoofd willen stooten?!

Ook zou men mij brutaal kunnen noemen tegenover Hare Majesteit, onze geërbiedigde Koningin, en dat zou onvergeeflijk zijn., want ik ben Haar onderdaan, die Haar steeds trouw moet blijven.

En daarom protesteer ik niet!

Integendeel, ik zal aan de feesten deelnemen. Als straks een collecte wordt gehouden, dan zal ik mijn bijdrage doen, al moest ik daardoor mijn huis-houdelijke begrooting tot op de helft terug brengen. Het is mijn plicht als inlander van Neêrland's Kolonie, om den onafhankelijkheidsdag van Nederland, het land van onze meesters, met luister mede te herdenken. Ik zal mijn landgenooten en mede-onderdanen van het koninkrijk der Nederlanden allen vragen, om aan 't feest deel te nemen, want al is dat feest van zuiver Nederlandsche beteekenis, dan nog hebben we daarin de beste gelegenheid, om onze trouw en ons medevoelen aan Nederland te betuigen. Alzoo zullen we houden een „aanhankelijkheids demonstratie”. Wat een genot zal het mij wezen. Goddank dat ik geen Nederlander ben.

Alle ironie terzijde thans.

Zooals ik in den aanhef van dit opstel

dekaan mereka. Dengan demikian rakyat digugah mafsunya; secara tidak sadar hasrat kemerdekaan mereka, harapan akan merdeka di hari mendatang dibina. Tanpa sengaja kepada rakyat diserukan: "Lihatlah, orang-orang, bagaimana kami memperingati hari kemerdekaan kami; cintailah kemerdekaan, karena sungguh-sungguh merupakan suatu kenikmatan untuk menjadi orang merdeka, bebas dari semua penjajahan!"

Bila bulan November tahun ini telah lampau, maka kaum penjajah Belanda telah melakukan suatu tindakan politik yang sangat berani. Resikonya adalah tanggung-jawab mereka. Saya tidak mau memikulnya walaupun umpamanya saya orang Belanda.

Seandainya saya orang Belanda, pada saat ini, maka saya akan memprotes gagasan peringatan ini. Saya akan menulis di semua surat kabar bahwa tindakan ini salah. Saya akan memperingatkan sesama kaum kolonial-ku, bahwa berbahaya mengadakan pesta kemerdekaan di waktu-waktu ini, akan saya nasihatkan semua orang Belanda untuk tidak menyakiti hati rakyat Hindia Belanda - yang sedang bangkit dan telah menyakiti hati rakyat Hindia itu - dan tidak membuatnya menjadi kurang ajar. Sungguh, saya akan mengajukan protes dengan segala kekuatanku.

Akan tetapi saya bukan orang Belanda, saya hanya seorang anak negeri daerah panas ini, kulitku berwarna coklat, seorang pribumi di daerah jajahan negeri Belanda, maka dari itu saya tidak akan mengajukan protes.

Sebab, seandainya saya mengajukan protes, maka orang tidak terima. Bukan itu yang saya inginkan, saya akan tetap

de 100-jarig jubileum van Neerlands onafhankelijkheid voor de overal zoo hoog verheven trouw aan het vaderland, in ons geval van de Nederlanders. Ik gun dezen dan ook ten volle de vreugde, die ze zullen genieten van hun nationale herdenking. Wat mij en velen mijner landgenooten echter tegen de borst stuit is hoofdzakelijk het feit, dat thans weder de inlanders hebben mede te betalen voor een zaak, die hun niet het minst aanbelangt. Wat zal het feest, dat wij helpen tot stand komen, ons wel brengen? Niemendal, hoogstens een herinnering aan ons adres, dat wij geen vrij volk zijn en dat „Nederland ons nimmer onafhankelijkheid zal schenken”, voorzoolang althans de heer Idenburg de landvoogdij blijft voeren, en dan -- maar toch -- de les, die wij uit de feesten zullen trekken: dat het n.l. een plicht moet zijn van een ieder, om den dag der onafhankelijkheidsverklaring zijns volks op waardige wijze te herdenken.

Ik voel dan ook veel meer voor het denkbeeld, dezer dagen het eerst in het inlandsche dagblad „Kaoem Moeda” en in „De Express” ontvouwd, om te Bandung, vanwaar het idee der herdenking is uitgegaan en waar ook het hoofdcomitee gevestigd is, een commissie van ontwikkelde inlanders te vormen, welkansam op den dag der herdenking een telegram van gelukwenschen aan de Koninklijke zenden, waarbij achter tevens aangevoegd wordt op de buitenwereldsgezindheid van artikel 133 R.R. en op de wijze instelling van een Indisch Parlement.

De resultaat van het verzoek, waarvan ik hier spreekt het laatste gedeelte daarvan, is dat ik liever buiten beschouwing laat het verzoek, want het is niet mijn

zaken, maar ik wil u wel mededeelen, dat ik liever de aandacht van de

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dua traktat negeri Belanda pada tahun-tahun di negeriku ini dan saya akan menjauhkan mereka dari saya. Itu saya tidak mau, saya tidak boleh berbuat demikian. Seandainya saya orang Belanda, bukankah saya tidak mau menyakiti hati rakyat kaum pribumi?”

Lagi pula mungkin orang akan mengatakan saya ini kurang-ajar terhadap Seri Ratu yang kita muliakan, dan akan merupakan dosa yang tidak dapat dima'afkan, karena saya adalah kawulanya (abdinya penterj.) yang senantiasa harus setia kepadanya.

Maka dari itu saya tidak mengajukan protes!

Bahkan sebaliknya, saya akan turut berpesta. Bila nanti dipungut sumbangan, saya pun akan menyumbang walaupun dengan demikian anggaran belanjaku akan terpaksa ku perkecil menjadi separuh dari biasanya. Kewajiban ku sebagai inlanders (orang pribumi) di daerah jajahan negeri Belanda (Nederlandsche Kolonie) untuk turut memperingati hari kemerdekaan negeri Belanda secara meriah. Saya akan minta kepada kawan-kawan sebangsaku dan sesama kawula negara Belanda untuk turut serta dalam pesta itu, sedang walaupun pesta itu memalukan diri khusus bagi orang-orang Belanda, namun kita pun mendapat kesenangan yang paling banyak untuk memelihara kesetiiaan dan persahabatan kita kepada Nederlandsche Negeri Belanda. Selain daripada itu saya akan mengajukakan "instruksi baru" Betapa maha mulia rasanya apabila nanti saya berseru kepada kawan-kawan orang Belanda

Bandung, maulid. Artikel ini akan saya kirimkan kepada

zulk' een verzoek niet teeds een protest in zich, dat ons, ten eerste, alle recht wordt en blijft onthouden om over politieke zaken te spreken, dat ons m.a.w. alle „vrijheid”, op dat gebied is ontzegd? Een vrijheidlievend volk als het Nederlandsche, dat thans zijn vrijheidsfeesten gaat houden, moet zulk verzoek wel billijken.

Wat de instelling van het parlement aangaat, daaruit spreekt ten duidelijste de innige wensch, om, *cout que cout* een stem in het kapittel te hebben. Dit is dan ook zeer noodig. Waar uit de manier van ontwakken van het Indische volk genoegzaam kan blyken, dat de emancipatie met bizondere snelheid voortschrijdt, daar mag zeker worden gedacht aan de mogelijkheid, dat dit nu nog overheerscht volk op eenmaal zijn meester over het hoofd zal groeien. Wat dan, als veertig miljoen goed ontwaakte menschen verantwoording komen eischen van dat honderdtal, dat de Tweede Kamer moet vormen en een volksvertegenwoordiging wordt genoemd? Wil men dan liever te elfder ure kapituleeren, als de crisis daar zal zijn?

Het kiinkt een beetje wonderbaar, dat het meegemeld comite om een parlement zal vragen. Terwijl door de Regering slechts schuchterwetend wordt te werk gegaan, terechting een koloniale vertegenwoordiging waar hoogstwaarschijnlijk enkel uitgezochten door de Regering worden genoemd als onze (z.g.) aigvaardigden in dien (z.g.) kolonialen raad-vote gemeenteraden! -- komt daar het comite in galop aan met een geweldig verzoek, niets meer of minder dan een Indisch parlement.

Binnen het heet het Comité slechts het verzoek tot het protest, in dat

Seperti yang saya katakan pada permulaan karangan ini peringatan ke seratus tahun kemerdekaan negeri Belanda yang telah kita sebut di atas menunjukkan dengan baik kesetiaan kepada tanah air yang sudah banyak sekali didegung-degungkan itu, dalam hal ini dari pihak orang-orang Belanda. Maka dari itu saya tidak akan cemburu sedikitpun terhadap kegeimbiraan meluap-luap yang akan dirasakan oleh mereka pada hari peringatan kemerdekaan nasionalnya nanti. Akan tetapi, yang paling menyakiti hati saya dan kebanyakan kawan-kawan sesama bangsa saya adalah kenyataan, bahwa orang-orang pribumi lagi-lagi harus turut membayar untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan mereka. Apa yang dapat kita harapkan dari pesta yang kita turut menyelenggarakan itu? Tidak ada, paling banyak suatu peringatan bagi kita, bahwa kita bukan bangsa yang merdeka dan "bahwa Belanda takkan pernah memberikan kedaulatan kepada kita", sedikit-dikitnya selama tuan Idenburg tetap memegang jabatan wali negara, lalu -- aneh sekali -- pelajaran yang akan kita peroleh dari pesta-pesta tersebut: bahwa merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk memperingati hari pernyataan kemerdekaan hangasanya dengan baik.

Oleh karena itu, saya lebih cenderung kepada gagasan yang akhir-akhir ini untuk pertama kali diuraikan dalam koran pribumi "Kaoem Moeda" dan dalam "De Express", untuk mendirikan suatu panitia kaum pribumi terpelajar di Bandung, tempat yang menyetuskan gagasan tersebut dan tempat bendibnyakan kantor pusat panitanya tersebut. Badan itu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

voorshands niet in the wlligen verzoek verzet, en minder op het resultaat daarvan. Merkwaaardig is het immers dat juist op den dag, dat Nederlanders hun vrijheidsdag herdenken, het comite komt aanvaarden bij de koningin, om de opheffing te verkrijgen van de absolute heerschappij van Nederland over een volk van veertig millioen zielen.

Ziedaar, nu reeds, de invloed van het denkbeeld der herdenking!

Neen, voorwaar, als ik Nederlander was, ik zou nimmer zulk jubileum willen vieren hier in een door ons overheerscht land. Eerst dat geknechte volk zijn vrijheid geven, dan pas onze eigen vrijheid herdenken.

pada hari peringatan nasional Belanda akan mengirimkan sebuah telegram ucapan selamat kepada Ratu disertai suatu permohonan yang mendesak agar pasal III R R (Regeringsreglement - Peraturan Pemerintah) dihapus dan suatu Parlemen Hindia dibentuk.

Hasil dari permohonan tersebut ada lagi yang merendahkan bagian terakhir. Lebih baik tidak usah dipikirkan, arti dari tindakan itu sendiri sudah sangat merupakan sesuatu yang berharga. Bukankah suatu permohonan seperti itu sudah mengengahkan protes yang menyatakan pertamannya bahwa kita hingga kini sama sekali tidak diberi hak untuk membicarakan masalah nasional pada suatu lembaga yang bernama parlemen.

sa yang sangat mencintai kemerdekaannya seperti rakyat negeri Belanda yang sekarang akan mengadakan pesta kemerdekaannya tentu akan membenarkan permohonan seperti itu.

Yang mengenai pembentukan parlemen, disitu nampak dengan jelas betapa besarnya hasrat kita untuk *coust que cout* (bagaimanapun juga) mempunyai suara dalam bagian ini. Ini memang sangat perlu. Di mana bangkitnya rakyat Hindia telah cukup membuktikan bahwa emansipasi telah berlaku dengan luar biasa cepatnya, tentu orang pun dapat juga memperhitungkan adanya kemungkinan bahwa rakyat yang sekarang mereka jajah pada suatu ketika akan melebihi majikannya. Apa nanti yang akan terjadi bila empat puluh juta orang yang telah bangun benar datang memintakan pertanggungjawaban kepada seratus orang yang harus membentuk de Tweede-Kamer dan dinamakan perwakilan rakyat itu? Apakah mereka lebih suka menyerah kelak kalau sudah terlanjut, kalau krisis sudah terjadi?

Kedengarannya agak aneh bahwa panitia yang disebut-sebut di atas justru minta sebuah parlemen. Sedangkan pihak pemerintah, dengan lambat sekali, baru mulai dengan pembentukan suatu perwakilan nasional yang mungkin sekali anggotanya hanya orang-orang yang dipilih dan diangkat oleh Pemerintah sebagai apa yang dinamakan) utusan dalam dewan-dewan daerah. Bahkan panitia dengan tergesa-gesa datang begitu saja membawa sebuah usul yang hebat sekali tak lebih dari tak kurang dari suatu usul kepada parlemen.

hanya protes yang tersimpul dalam permintaan, yang untuk sementara waktu tidak akan dipenuhi; dan tidak begitu ditujukan kepada hasilnya. Memang aneh sekali bahwa justru pada hari orang-orang Belanda sedang memperingati hari kemerdekaannya, panitia ini meluncur begitu saja ke hadapan ratu dengan permohonan agar penjajahan mutlak oleh negeri Belanda terhadap rakyat yang berjumlah empat puluh juta

jiwa dapat dihapuskan.

Nah, lihat, sekarang sudah ada pengaruh gagasan peringatan tersebut!

Sungguh, seandainya saya ini orang Belanda, maka saya tak akan pernah mau merayakan pesta peringatan seperti itu di sini, di suatu negeri yang kita jajah. Berikan dahulu rakyat yang tertindas itu kemerdekaannya, baru sesudah itu kita memperingati kemerdekaan kita sendiri.

Bei
Gloriam

TAKAAN
KARTA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

21
22
23

TABEL 1
TOKOH-TOKOH PIMPINAN INDISCHE VERENIGING 1908 – 1913

N a m a	Gondowinoto	Notodiningrat	Abdoel Rivai	Radjiman W.	Brentel
Tahun dan tempat lahir	1889 Yogyakarta	1888 Yogyakarta	1876 Yogyakarta	1879 Yogyakarta	1879 Bagelen, Jawa Tengah
Pendidikan sebelum ke Eropa	ELS HBS (5 tahun) Tamat: 1907	HIS HBS (5 tahun) Tamat: 1908	STOVIA Tamat: 1895	ELS STOVIA Tamat: 1898 Gelar dokter 1904	ELS STOVIA Tamat: 1903
Jangka waktu dan tempat belajar	1908 – 1919 Fakultas Hukum Univ. Leiden	1908 – 1916 Akademi Teknik di Delft	1899 – 1907 Univ. Amsterdam, dapat gelar doktor di Ghent, Belgia	1909-10, 19-20 Univ. Amsterdam, studi seterusnya di Berlin, Paris dll.	? – 1913 Univ. Amsterdam
Bidang khusus	Bahasa Latin & Yunani	Arsitektur Teknik Sipil	Ilmu Kedokteran	Ilmu Kedokteran	Ilmu Kedokteran
Pekerjaan setelah kembali ke tanah air	1919-21: Anggota Majelis Kehakiman, Makasar 1921-22: Hakim Ketua pada Pengadilan Pribumi Makasar	1913-16: praktek di den Haag, Amsterdam- Rotterdam; 1919: calon insinyur, Pekerjaan Umum, Kabupaten Purworejo	1918-24: anggota Volksraad 1927: Mendirikan Medische Hoogeschool (Sekolah Tinggi Kedokteran) 1928: ke Eropa	1918: anggota Volksraad 1930: ke Paris	1913-21: dokter pemerintah di Malang, Bitar, Solo, Temang- gung dan Bojolali
Pekerjaan pada Masa Pendudukan Jepang	Penuntut Umum di Mangkunegaran	Insinyur Kepala, Solo	tidak diketahui	Dokter pada Pengadilan, Solo	Dokter pada Pabrik Gula, Klaten
Meninggal dunia	1953	1944	1953	1952	1944

Catatan : Mengenai Abdoel Rivai, lihat Ensiklopedia Indonesia (3 vol, Bandung & s'Gravenhage: W. van Hoeve, 1954-1956). Seterusnya lihat: *Orang Indonesia yang terkemuka di Djawa* (Jakarta: Gunseikanbu, 1944). Singkatan tentang sekolah: "ELS = Europeesch Lagere School; HBS = Hogere Burger School; STOVIA = School tot opleiding van Indische artsen (Sekolah Dokter Pribumi). STOVIA ini merupakan nama baru (yang diberikan pada tahun 1902) untuk Sekolah Dokter Djawa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TABEL 2
PENERBITAN INDISCHE VERENIGING/INDONESISCHE VERENIGING,
PERHIMPUNAN INDONESIA dan INDONESISCH VERBOND VAN STUDEERENDEN

Seri	Terbitan	Organisasi	Vol.	No.	Bulan/Tahun	Halaman
I	<i>Hindia Poetra</i>	Indische Vereniging	1	1-9	Maret 1916 – April 1917	274
II	<i>Hindia Poetra</i>	(Indonesische Verbond Van Studeerenden)	1	1-12/13	Agust. '18 – Nov./Des. '19	266
			2	1-12	Jan. – Des. 1920	192
			3	1-12	Jan. – Des. 1921	200
			4	1-5	Jan. – Agust. 1922	84
III	<i>Hindia Poetra Indonesia Merdeka</i>	Indonesische Vereniging Perhimpunan Indonesia	1	1-6	Jan. – Nov. 1923	96
			2	1-7/8	Maret – Nov./Des. 1924	135
			3	1-9	Feb. '25 – Des. '25/Jan. '26	136
			4	1-4	Feb. – Mei (?) 1926	106
			5	1-3	? – ? 1927	103
			6	1-7/8	? – Nov. 1928	147
			7	1-6	Maret – Nov. 1929	108
			8	1/2-6	Jan./Feb. – Des. 1930	114
			9	1-3/4/5	? – Okt. 1931	80
			10	?	? 1932	58
			11	?	? 1933	32
			12	1-4/5/6	Nov. 1936 – Nov. 1937 24 + 27 + 24 + 36	
13	1-4	Feb. – Sept. 1938	162			
14	1-2	Maret – Juli 1939	109			
15	3-5	Juni – Des. 1940	59 (-24)			

Catatan : Karena seri-seri ini terbit di Negeri Belanda, nomor-nomor lepas, apalagi satu set lengkap, hampir tak dapat ditemukan di Indonesia. Sepanjang pengetahuan saya, koleksi paling baik dimiliki oleh perpustakaan Cornell University, tetapi setiap nomor tak ada halaman kulitnya, karena semua itu telah dibikin mikrofilm. Inilah sebabnya maka ada tanda tanya pada daftar ini. Saya juga telah mempelajari koleksi lengkap *Hindia Poetra*, seri pertama di Perpustakaan Universitas Leiden dan sebuah koleksi cukup baik dari seri kedua dan ketiga pada Lembaga Linguistik dan Antropologi di Leiden, Nederland. No. 1 dan 2 *Indonesia* Vol. 15, tak ada dalam semua koleksi tersebut. Maka saya tambahkan angka 24 pada kolom halaman. Dalam kebanyakan hal pemberian halaman dilakukan secara berurut pada setiap volume. Karena itulah pada koleksi Cornell University kaitan antara setiap nomor sulit untuk ditentukan. Terkecuali *Indonesia* Volume 12, yang diberi halaman dengan nomor. Angka 24+27+24+36+ adalah contoh hal tersebut. Angka 7/8, 3/4/5 dst. berarti bahwa itu adalah nomor gabungan, misalnya no. 7 dan 8 atau 3, 4 dan 5 dan fakta ini disebutkan di salah satu tempat dalam teks. Tanggal penerbitan mungkin ditulis, misalnya, sebagai berikut: Nov/Des. 1924 atau hanya Okt. 1931. Saya mengikuti cara pemakaian yang asli.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14

Penulis	Nomor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah "
Dewan Redaksi		2	5,5	-	0,5	4,4	7,4	0,2	4	12,5	36,5
Tanpa nama, nama samaran yang tak bisa dikenal atau inisial		3,7	5,5	5	4,7	6,6	10,4	-	-	-	35,9
Orang Indonesia :											
Abdoel Moeis		-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Dwidjosewojo		-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Latif, S.M.		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Loekman Djajadiningrat		4,5	3	-	-	-	-	-	0,8	-	8,3
Marco, Mas		-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	5,2
Noto Soeroto		1	1	7	1	1	-	1,2	-	-	12,2
Ratu Langie, S.		5,2	-	-	2,5	-	-	-	-	-	7,7
Soerjo Koesoemo		-	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Soerio P.etro		-	-	-	-	8	2,3	7,2	8,2	8	33,7
Soewardi Soerjaningrat (atau S.N.)		6,5	4	2,2	1,2	2,3	11,5	14,3	5,2	5,3	52,5
Jumlah bagian ini		17,2	8,0	9,2	8,7	12,3	13,8	27,9	23,2	13,3	133,6
Orang Eropa :											
Abendanon, J. H.		-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	2,7
Berkey, Antoine		-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	0,7
Berding, Frans		-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	3,7
Borel, H.		-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5
François, J.H. (J.H.F.)		2,8	-	5,5	3	1	0,5	3	-	1,7	17,8
Giel, W.J.		2,5	-	-	1	-	-	-	-	-	3,5
Middendorp, Herman		-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
Mühlenfeld, A.		4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Muller, Hendrik		-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
Schmulling, E. L. K.		-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Schouten, C.		-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	2,3
Tillema, H.F.		-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	5,5
Versteegh, A.D.		-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5
Jumlah bagian ini		9,3	8,7	9,5	9,5	8,4	0,8	3	8,3	1,7	59,2
Jumlah total		32,2	27,7	23,7	23,4	31,7	32,4	31,1	35,5	27,5	265,2

Catatan : Tabel ini dibuat berdasarkan teks asli yang disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden di Nederland

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TABEL 4
ISI KARANGAN DALAM *HINDIA POETRA* SERI PERTAMA, 1916 – 1917

Nomor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah (hlm.)
Isi										
Penjelasan dan pembahasan kebijakan organisasi Keadaan di Hindia Belanda, Tinjauan pers, dll. ^{a)}	8	9,7	6	2,5	1	1,2	0,5	3,8	-	32,7
Timbangan Buku	-	1,5	2	2	1	0,8	0,3	-	6,5	14,1
Kebudayaan dan Kesenian	-	2,5	3,6	7	7	1	10,2	8,2	-	39,5
Pendidikan (termasuk pelajaran bahasa)	5,2	4,7	-	-	10,7	10,6	-	6,2	-	37,4
Laporan tentang India Jajahan Inggris	2,8	-	4	-	-	-	-	-	-	6,8
Tokoh-tokoh (termasuk berita duka)	4	-	-	-	2,3	-	-	2	-	8,3
Laporan bencana alam di Hindia Belanda ^{b)}	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	5,5
Masalah Pertahanan Hindia Belanda	-	-	-	-	-	9,6	4,5	12,2	10,8	37,1
Berita Volksraad	-	-	-	-	-	1,8	8,8	-	-	10,6
Pemberontakan, Gerakan Politik & Penekanan, dll.	-	-	-	-	-	2,5	5,2	-	1,5	9,2
Serba-serbi ^{c)}	8,2	9,3	4,6	3,2	3,1	0,9	1,6	3,1	7,1	41,1
Total	32,2	27,7	23,7	23,4	31,7	32,4	31,1	35,5	27,5	265,2

Catatan : Sumber tabel ini sama dengan sumber tabel 3.

- a) Walaupun tinjauan atau ringkasan pers tentu memuat kembali topik-topik lain yang terdaftar di sini, saya tak membuat klasifikasi baru.
- b) Mulai nomor 8 masalah Volksraad dan Pertahanan sering dibahas secara tergabung. Dalam keadaan demikian, saya klasifikasikan di bawah topik Pertahanan.
- c) "serba-serbi" meliputi sajak, pepatah dan peribahasa, laporan perjalanan ringan serta parodi, dll.

Konvensi antara Semaun dan Mohammad Hatta

TERJEMAHAN ini dibuat berdasarkan salinan yang disimpan dalam arsip bekas Kementerian Penjajahan (terlampir dalam Penasihat Urusan Kemahasiswaan kepada Menteri Jajahan, 13 Juni 1927, V 28 Juni 1927 - M 10/No. 50). Untuk pembicaraan tentang situasi yang menjadi latar belakangnya, lihat Bab. 4.

Konvensi antara Semaun dan Mohammad Hatta Disetujui di 'S-Gravenhage, 5 Desember 1926

Yang bertanda tangan di bawah ini, Semaun, wakil dari Partai Komunis Indonesia, atas nama Partai Komunis Indonesia di satu pihak dan Mohammad Hatta, wakil dari Partai Nasionalis Perhimpunan Indonesia, atas nama partai tersebut di lain pihak.

mempertimbangkan, bahwa demi usaha untuk kemerdekaan Indonesia, bahwa gerakan rakyat yang kuat adalah penting, dan konsolidasi dari kekuatan nasional Indonesia amat diperlukan, maka disetujui butir-butir sebagai berikut:

Bab 1

Perhimpunan Indonesia, yang harus berkembang menjadi suatu partai rakyat nasional Indonesia, bertekad untuk giat di dalam bidang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sosial politik demi kepentingan rakyat Indonesia.

Perhimpunan Indonesia harus mengambil tugas memberi perintah tertinggi dan bertanggung jawab penuh untuk pergerakan rakyat di Indonesia.

Bidang sosial itu meliputi pendidikan rakyat, ekonomi nasional, kesehatan masyarakat dan semua yang mendukung kekuatan rakyat nasional.

Bab 2

Partai Komunis Indonesia harus mengakui kepemimpinan Perhimpunan Indonesia, seperti sudah digariskan dalam art. 1 bab 2 dari perjanjian ini, dan harus memberikan dukungan sepenuhnya.

Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi di bawah kekuasaannya harus berjanji, dengan alasan apa pun, untuk tidak menentang kepemimpinan Perhimpunan Indonesia atas gerakan rakyat nasional, selama ini konsisten mendorong kebijakan untuk kemerdekaan Indonesia.

Bab 3

Percetakan koran yang selama ini dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia harus diserahkan kepada Perhimpunan Indonesia dengan persyaratan yang akan ditetapkan kemudian.

Bab 4

Konvensi ini dicetak enam rangkap, masing-masing partai memperoleh rangkap tiga.

Partai-partai yang menyetujui.

Untuk PKI
Semaun

Untuk Perhimpunan Indonesia
Moh. Hatta.

Semaun

Rencana Organisasi untuk Gerakan Kebangsaan Kita

RENCANA ini sudah dibicarakan di depan. Singkatnya, rencana ini diajukan oleh Semaun, wakil PKI di Eropa dan anggota Comintern, kepada Hatta pada bulan November 1926 dengan harapan Hatta mendesak Pengurus PI agar mau menerimanya sebagai program PI untuk membentuk partai nasionalis sebagai konsekuensi hancurnya PKI. Hatta menolak dan sebagai gantinya berhasil mengajukan rencananya sendiri. Bukan hanya Hatta yang tidak bisa menerima rencana Semaun, tetapi karena beberapa alasan dianggap tidak ortodoks dan karenanya juga tidak dapat diterima oleh Comintern. Namun demikian rencana ini memang memberi suatu wawasan berharga ke dalam pemikiran seorang komunis Indonesia yang terkemuka dan seorang yang dekat dengan Perhimpunan Indonesia. Lebih penting lagi, satu salinannya jatuh ke tangan Kementerian Jajahan Belanda yang menarik kesimpulan bahwa itu sebenarnya adalah rencana Perhimpunan Indonesia untuk partai nasionalis baru di Indonesia. Meskipun Hatta berkali-kali menyangkalnya, pemerintah Belanda dan pemerintah Hindia Belanda terus-menerus mengutipnya setelah tahun 1927 sebagai bukti adanya pengaruh komunis dalam PNI dan sebagai pertanda

bahaya yang sudah dekat karena PNI sedang mengadakan persiapan untuk melancarkan pemberontakan besar lainnya.

Terjemahan ini dibuat berdasarkan salinan yang disimpan dalam arsip bekas Kementerian Jajahan (terlampir dalam Penasihat Urusan Kemahasiswaan kepada Menteri Jajahan, 23 Februari 1927, V 8 Maret 1927 - G 4/ No. 27).

Rencana Organisasi untuk Gerakan Kebangsaan Kita

Sejauh ini organisasi untuk gerakan kebangsaan kita berpegang pada suatu fondasi yang salah dan hanya merupakan tiruan dari partai-partai Eropa. Karena tujuan partai politik Eropa berbeda dari tujuan organisasi nasional kita, maka metode organisasinya tidak ada gunanya bagi kita. Partai-partai Eropa merupakan partai parlementer serta partai dari negara bebas. Partai itu tidak perlu melawan pemerintahan asing, sebagai gantinya hanya memerangi kekuasaan. Melalui parlemen anggotanya berusaha berbakti kepada negara mereka sesuai dengan prinsip-prinsip mereka.

Dengan kita, situasinya berbeda. Kita harus berperang melawan rezim asing dan tujuan kita adalah memerdekakan tanah air kita. Karena itu, organisasi kita harus dibentuk sedemikian rupa sehingga cocok dengan tujuan kita. Dan karena rakyat berpegang pada kebijakan nonkooperasi, maka bentuk organisasi yang lama tidak lagi memuaskan. Kebijakan nonkooperasi hanya dapat dilaksanakan jika organisasi tersebut memusatkan kekuatannya untuk menolong diri sendiri. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan nasional harus kita mulai sendiri. Oleh karena itu, sejalan dengan perjuangan untuk memperoleh kekuatan politik, kita harus memikirkan kondisi sosial ekonomi kehidupan rakyat kita. Pendidikan nasional dan perekonomian nasional harus ditingkatkan sebagaimana halnya koperasi nasional, industri nasional dan kesehatan masyarakat. Di samping itu, kita harus membangun gedung pengadilan nasional sebagai penengah pertikaian di antara rakyat kita.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

139

Inilah sasaran utama dari kerja nasional kita selama kita berjuang ke arah "pembentukan sebuah negara di dalam negara". Dan sekarang metodenya: kerja dalam arah ini berarti bahwa di dalam kerangka dominasi bangsa asing itu kita menciptakan pemerintahan yang kelak harus berada dalam posisi untuk mengambil alih pemerintah. Sebuah pemerintahan negara modern adalah berdasarkan organ-organ berikut:

- a. pemerintah dan parlemen
- b. pemerintah propinsi dan dewan propinsi
- c. pemerintah kota dan dewan kota

Sistem tersebut berbentuk piramid. Kegiatan dan tanggung jawab harus dibagi rata. Di samping itu, kita dapat melihat organ ketiga: kekuasaan juridis dan aparat kekuatannya, yaitu polisi. Dan diperlukan kekuatan tempur untuk memelihara keamanan dan kemerdekaan negara kita. Ini semua merupakan pilar paling penting untuk mendukung sebuah negara modern.

Jika kita ingin membangun kemerdekaan nasional, kita harus berusaha keras agar kita sendirilah yang menciptakan organ tersebut. Kita yakin bahwa kemerdekaan kita hanya dapat dicapai melalui pengorbanan air mata dan darah. Dan suatu revolusi hanya akan berhasil jika diorganisasi dengan baik dan bila berlangsung *di seluruh wilayah secara serentak*. Inilah yang seharusnya dilaksanakan. Revolusi setempat dapat dengan mudah ditindas oleh pemerintah. Namun untuk mengadakan revolusi yang menyeluruh, negara tidak mempunyai cukup kekuatan bersenjata. Revolusi yang tidak terorganisasi akan membawa kehancuran diri sendiri; atau paling sedikit pemecahan kekuatan nasional yang sudah dengan susah payah disatukan. Jadi, kita harus menggiring gerakan kebangsaan kita ke arah suatu revolusi yang terorganisasi. Untuk ini diperlukan organisasi yang sempurna. Karenanya kita harus menyiapkan pemerintahan nasional dan aparat kekuasaan. Keduanya ini tidak dapat dicapai dengan organisasi bentuk lama. Sekarang, bagaimana cara membangunnya? Persis seperti partai-partai parlementer Eropa? Ada pengurus, terdiri atas seorang ketua, seorang atau lebih wakil ketua, beberapa orang sekretaris,

tukan oleh pemegang tiga jabatan pertama — ketua, sekretaris, dan bendahara — sementara anggota pengurus lainnya hampir tidak mempunyai tugas. Bagaimana mungkin sebuah badan semacam itu bekerja dengan aktif? Untuk membangun negara dalam negara — hanya dengan cara itu kemerdekaan nasional dapat dicapai — harus ada badan pengurus yang diorganisasi dengan cara yang sedemikian rupa sehingga semua anggota pengurus, tanpa terkecuali, mempunyai fungsi yang pasti untuk membangun dan untuk itu mereka bertanggung jawab kepada kongres tahunan, sebagai ganti dari sebuah parlemen. Pengurus harus dibentuk sedemikian rupa sehingga para anggotanya sejajar dengan para menteri dalam negara-negara yang independen. Pengurus yang seperti itu harus memiliki citra yang sama dengan suatu Dewan Menteri. Hanya dengan cara ini dapat diperoleh gerakan kebangsaan yang di dalamnya terkandung kedua faktor yang harus ada untuk kemerdekaan nasional, yaitu pemerintahan negara yang lengkap dan kekuatan tempur nasional.

Gerakan semacam itu dapat bekerja dalam dua arah secara serentak: (a) melaksanakan *kerja sosial* lewat *aksi terang-terangan*; (b) *merongrong penguasa* dengan membentuk suatu kekuatan tempur nasional melalui *aksi bawah tanah*. Bersamaan dengan kedua jalan itu, kesatuan nasional sekaligus dapat diperkuat. Kita memahami sulitnya melakukan pekerjaan ini. Itulah sebabnya kita harus mulai dengan membentuk kelompok anggota inti yang kuat. Kita harus mendirikan organisasi baru dengan markas besarnya, misalnya, di Bandung. Di setiap ibu kota keresidenan harus didirikan cabang untuk melaksanakan *aksi terang-terangan* dan *aksi bawah tanah*. Jadi, tidak perlu terlalu banyak cabang. Organisasi ini harus benar-benar menggiring rakyat menuju revolusi yang serentak dan terorganisasi. Ini harus dilakukan pada waktu-waktu yang hanya saling berselisih satu atau dua hari saja. Misalnya, hari ini di A, besok di B, lusa di C, dan seterusnya. Revolusi ini harus disebar dalam bentuk lingkaran, mengelompok di sekeliling pusat-pusat tertentu. Tujuan utamanya adalah menguasai kota-kota besar, karena kalau sudah berada di tangan kita, maka de-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kata lain, pertama-tama kita harus merebut pusat kekuatan dalam karesidenan itu. Dalam hal ini kita dapat mengikuti metode kaum *Carbonaris*, aksi bawah tanah Italia pada pertengahan abad yang lalu, dan *Revolusi Pemuda Turki* pada tahun 1908. Revolusi itu harus dimulai di sebuah kota besar yang terpencil, atau daerah terdekat di sekitarnya, sehingga kekuatan militer kolonial membutuhkan waktu untuk pergi ke sana. Sementara itu, tempat-tempat, yang menjadi lemah karena tentaranya dikirim ke tempat revolusi pertama terjadi, direbut secara mendadak. Jika revolusi tersebut diatur sedemikian rupa sehingga di tempat-tempat utama, sasaran serangan pokoknya haruslah menduduki gedung telepon dan telegraf, maka gedung-gedung penting itu akan jatuh ke tangan kita tanpa pertumpahan darah. Untuk menghindari pertumpahan darah, para perwira Belanda harus dibunuh atau dipenjarakan. Dengan cara ini orang Indonesia yang menjadi tentara Belanda dengan mudah dapat dibujuk untuk memihak kita.

Jadi jelaslah bahwa organisasi kita harus dibangun berdasarkan *kualitas* dan bukan *kuantitas*. Pertanyaannya sekarang, bagaimana pengurus pusat, dan selanjutnya pengurus cabang, harus diorganisasi.

Untuk melakukan aksi menurut arahan ini, pengurus pusat harus terdiri atas: (1) ketua, (2) wakil ketua, (3) sekretaris I, (4) sekretaris II, (5) bendahara I, (6) bendahara II, (7) komisioner untuk ekonomi nasional, (8) komisioner untuk pertanian nasional, (9) komisioner untuk pendidikan nasional, (10) komisioner untuk kesehatan umum, (11) komisioner untuk gerakan serikat dagang nasional.

Sistem ini memanfaatkan sepenuhnya pembagian pekerjaan yang pokok, yaitu hanya yang dapat meningkatkan tujuan. Tanpa mengabaikan politik — karena inilah pilar terpenting dari gerakan tersebut — setiap orang dapat melakukan tugasnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Ketua akan menjadi pemimpin umum; wakil ketua mengurus propaganda; kedua sekretaris menangani urusan di dalam organisasi dan mengadakan kontak secara teratur dengan cabang-cabang; kedua bendahara bertugas mengatur keuangan; komisioner mengurus ekonomi nasional, pengembangan koperasi nasional dan industri nasional; garis tugasnya juga meliputi pengembangan ko-

munitas. Komisioner untuk pertanian nasional, yang harus seorang ahli dalam masalah pertanian, pertama-tama dan yang utama harus memperhatikan kepentingan petani dan intensifikasi pertanian, dan dengan cara ini memberi bimbingan kepada petani miskin. Komisioner untuk kesehatan masyarakat bertugas meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena tugasnya, ia haruslah seorang dokter. Jadi, ketiga komisioner itu harus mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi rakyat kita, yang selanjutnya akan meningkatkan kekuatan rakyat yang penting sekali untuk pertahanan diri. Jika pekerjaan ini diarahkan dengan baik, maka komisioner untuk pendidikan nasional dapat berbuat banyak sekali. Ia tidak hanya dapat berbuat banyak dalam pendidikan nasional, tetapi juga dengan mudah dapat membentuk dan mengembangkan dana belajar. Dana ini, yang diperlukan segera, amat tergantung pada kondisi ekonomi rakyat kita. Kepekaan revolusioner rakyat kita amat tergantung pada pendidikan nasional. Setidak-tidaknya, ini dapat memperkuat nasionalisme. Sekarang tinggal fungsi paling penting dari komisioner untuk serikat buruh nasional. Tugasnya lebih luas daripada sekadar mengurus organisasi dan serikat buruh saja. Ia harus berusaha mengembangkan kepanduan nasional, yang kelak menjadi benih tentara nasional. Di bidang ini, dengan sendirinya, ia bekerja sama dengan komisioner untuk kesehatan masyarakat, seakan-akan meningkatkan bidang olahraga, tapi sebenarnya untuk membentuk tentara. Kini tiba gilirannya tugas paling penting dari komisioner serikat buruh dan ini adalah mengorganisasi perhimpunan rahasia. Intinya ada di setiap pengurus cabang. Karenanya ia harus mengepalai staf umum yang secara cermat merencanakan, dengan catatan dan secara sistematis, sebuah revolusi. Dana nasional kita dengan sendirinya secara bertahap dipakai untuk mengirim pemuda nasionalis untuk belajar kemiliteran. Maka orang-orang itu kemudian harus mempunyai kedudukan sebagai anggota staf militer. Sehubungan dengan usaha mengorganisasi perhimpunan rahasia itu, kita boleh belajar dari kaum *Carbonaris* dan *Pemuda Turki* pada tahun 1908. Di setiap kota dibentuk perhimpunan rahasia yang kecil saja. Para anggotanya kenal satu sama lain lewat tanda khusus, seperti yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

141

dilakukan oleh Sarekat Islam. Para anggota itu harus mengangkat sumpah. Mereka tetap berhubungan satu sama lain lewat kurir. Sistem tersebut harus sedemikian rupa sifatnya sehingga jika salah satu perhimpunan terbuka rahasianya, maka yang lainnya dan pemimpin pusat tidak dapat dikhianati.

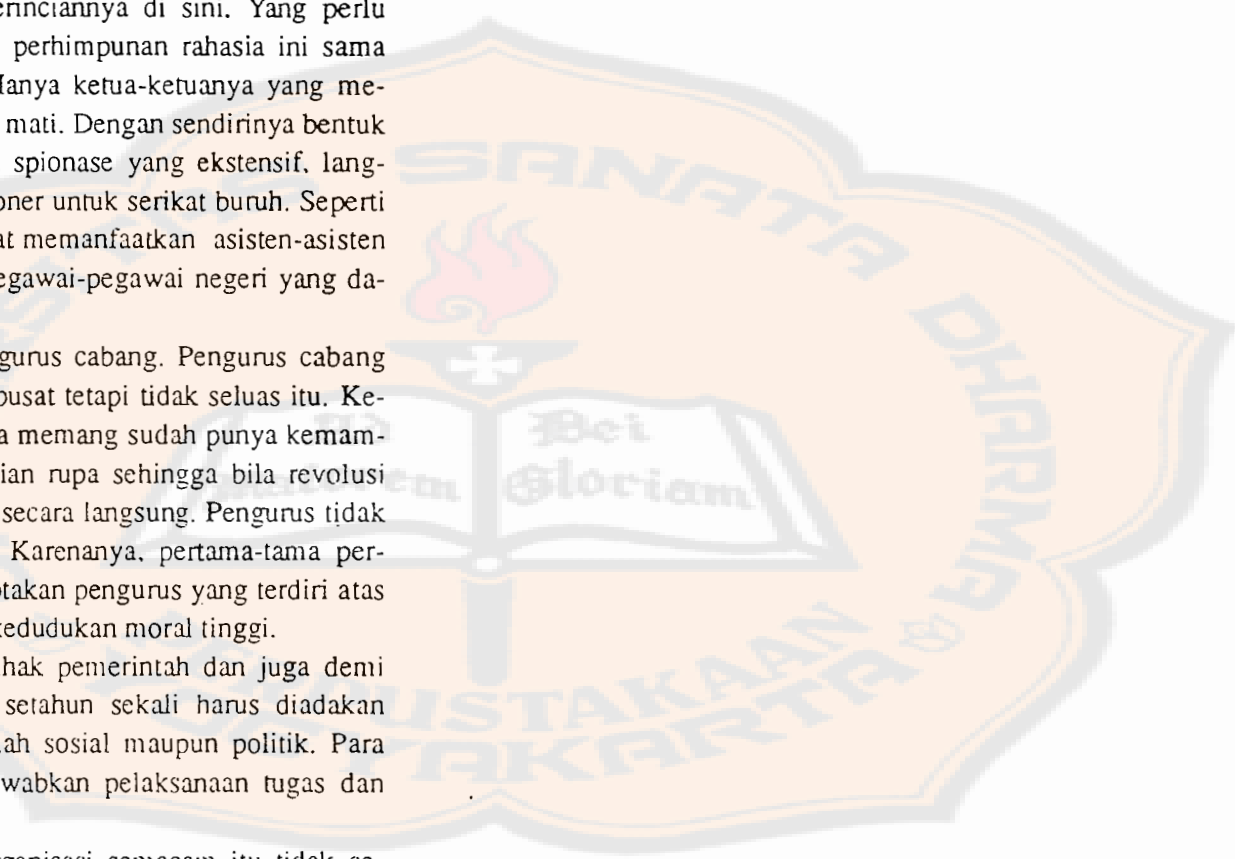
Kami tidak akan menjabarkan perinciannya di sini. Yang perlu dicatat hanyalah bahwa anggota dari perhimpunan rahasia ini sama sekali tidak kenal pimpinan pusat. Hanya ketua-ketuanya yang mengenalnya. Penghianat harus dihukum mati. Dengan sendirinya bentuk aksi ini memerlukan suatu pekerjaan spionase yang ekstensif, langsung di bawah kepemimpinan komisioner untuk serikat buruh. Seperti halnya Pemuda Turki, kita hanya dapat memanfaatkan asisten-asisten di kantor telepon dan telegraf serta pegawai-pegawai negeri yang dapat dipercaya.

Dan sekarang sedikit tentang pengurus cabang. Pengurus cabang harus disusun seperti gaya pengurus pusat tetapi tidak seluas itu. Ketua haruslah seorang yang sebelumnya memang sudah punya kemampuan. Penyusunannya harus sedemikian rupa sehingga bila revolusi pecah, pengurus dapat menanganinya secara langsung. Pengurus tidak boleh diorganisasi secara sembrono. Karenanya, pertama-tama perhatian harus dicurahkan untuk menciptakan pengurus yang terdiri atas orang-orang yang mampu dan punya kedudukan moral tinggi.

Untuk menghadapi kecurangan pihak pemerintah dan juga demi kemajuan organisasi, paling sedikit setahun sekali harus diadakan kongres untuk membicarakan masalah sosial maupun politik. Para komisioner harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tindakannya kepada kongres ini.

Dapat dilihat bahwa meskipun organisasi semacam itu tidak sepenuhnya autokratis, namun juga tidak terlalu demokratis. Tetapi, begitulah seharusnya organisasi dari sebuah gerakan dengan kegiatan bawah tanah yang amat revolusioner.

Di sini hanya digambarkan garis-garis besar pembentukan gerakan nasional. Detailnya dapat dikerjakan kelak dengan mengembangkannya. Tak seorang pun dapat memulai sesuatu dengan cara yang mudah.



Mohammad Hatta

Penjelasan Penutup

DOKUMEN ini, tertanggal 1 Desember 1927, ditulis oleh Hatta ketika berada dalam tahanan di Den Haag selama menunggu diajukan ke depan sidang pengadilan. Hatta telah menjalani serangkaian interogasi sejak ditangkap pada September 1927. kepadanya diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama tentang Perhimpunan Indonesia, prinsipnya, metodenya, hubungannya dengan komunis dan sikapnya terhadap kekerasan, yang diulang dan diulang terus. Sehubungan dengan ini, Hatta memberinya judul, *Slotsverklaring*, penjelasan penutup. Ini ditulis beberapa hari setelah ia diinterogasi untuk terakhir kalinya dan mungkin dijadikan dasar untuk menyusun pidato pembelaannya yang kelak diterbitkan dengan judul *Indonesia Free*. Sementara *Indonesia Free* adalah deskripsi yang paling mendetail oleh Hatta tentang ideologi dan tujuannya sendiri serta ideologi dan tujuan Perhimpunan Indonesia, maka "Penjelasan akhir" merupakan pembicaraan yang paling ringkas. Sebagian besar kepentingan PI di dalamnya memang orisinal.

Terjemahan di bawah ini dibuat berdasarkan salinan naskah asli yang ditulis tangan yang ditandatangani oleh Hatta. Bersama dengan catatan tentang interogasi terhadap Hatta dan para pemimpin PI lainnya yang ditangkan, surat-surat yang bertalian dan keputusan Penga-

dilan Wilayah di Den Haag, naskah ini disimpan rapi dalam sebuah berkas di Kementerian Kehakiman Belanda.

Penjelasan Penutup

a. Karakter Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia adalah organisasi nasionalis yang berten-densi politik. Walaupun tujuannya adalah "menyiapkan kemerdekaan Indonesia", dan sarana untuk tujuan "memajukan kesatuan berpikir Indonesia", tetapi nyatanya, karena dibentuk di negeri Belanda, kerjanya jadi kurang matang. Tentu saja, secara umum PI hanya dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan teori politik saja.

Tujuan PI hanya dapat sungguh berarti melalui sebuah partai nasionalis yang didukung massa di Indonesia sendiri. Dari kenyataan ini, sejak tahun lalu, dengan penuh semangat PI telah berusaha mendirikan sebuah partai rakyat nasional Indonesia.

Sebagai langkah awal, prinsipnya harus diperkenalkan lebih dahulu lewat propaganda.

b. Prinsip-prinsip Program

Dasar Perhimpunan Indonesia adalah penjelasan atas prinsipnya yang disusun pada tahun 1925. Programnya berdasarkan prinsip non-kooperasi dan swadaya. Itulah sebabnya PI berwatak revolusioner.

Cara bertindak ini berakar dari ketidakpuasan terhadap kebijakan politik setelah 1918. Sejak itu, tumbuh ketidakpercayaan kepada kebijakan kolonial yang diambil pemerintah. Sejak dulu Perhimpunan Indonesia beroleh kesan bahwa posisi kebijakan ini terlalu di bawah pengaruh Dewan Pengusaha (Hindia Belanda), yang hanya memperhatikan kepentingan pengusaha Eropa. Kesan ini diperkuat oleh didi-dukutnya Takutis Indologi di Utrecht oleh para pengusaha yang disetujui oleh pemerintah dan kemudian oleh hasil perdebatan di parlemen pada 1925 tentang masalah Konstitusi Hindia Belanda.

Prinsip nonkooperasi dan swadaya, pendek kata tergantung pada diri sendiri atau autoaktivitas, terdiri atas:

1. Di bidang politik: meningkatkan perasaan kesatuan dan solidaritas serta rasa keadilan politik di kalangan rakyat.

Sekarang ini, Perhimpunan Indonesia melihat prinsip-prinsip non-kooperasi sebagai cara terbaik untuk membangkitkan rasa percaya diri dan rasa punya harga diri. Kebangkitan ras dan antitesis kepentingan antara penguasa dan yang dikuasai membuat PI merasa tak dapat tiada harus secepat mungkin membangkitkan kesiagaan rakyat banyak, sehingga menjadi suatu kekuatan yang terorganisasi dan bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri.

2. Di bidang politik: sebuah organisasi, dengan kehidupan ekonominya sendiri yang berdasarkan koperasi, oleh PI dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencegah agar pemilik modal besar jangan memiliki kekuasaan kuat.

3. Di bidang sosial: memperhatikan kepentingan sosial rakyat, seperti pendidikan nasional (oleh dan untuk bangsa Indonesia).

Perhimpunan Indonesia menyadari bahwa prinsip-prinsip tersebut akan berhasil dilaksanakan jika di bawah kepemimpinan yang liberal dan tidak mementingkan diri sendiri, bersedia mengingkari diri sendiri. Membangun pemimpin semacam itu juga sebagian dari tugasnya.

Ini berdasarkan pendapat, bahwa hanya partai yang terorganisasi berdasarkan prinsiplah yang dapat menjadi partai massa yang sebenarnya, yang sebagai satu unit merasa cukup kuat untuk menghadapi masalah kekuasaan itu.

c. Masalah Kekerasan.

Aksi Perhimpunan Indonesia tidak mengandung unsur kekerasan. Tindak kekerasan bukan hanya tidak sah, tetapi juga karena merupakan aksi yang menunjukkan kegelisahan yang hanya akan membawa kehancuran. Saya bicara atas dasar ini dalam pidato saya sebagai pengantar pertimbangan atas laporan dari misi ke Bierville (Oktober 1926).¹

¹ Lihat artikel Hatta "Demokrasi" dalam *Perjuangan Rakyat*, hal. 144-57.

Serangkaian pemberontakan terorganisasi sebagai jalan ke arah kemerdekaan kami anggap berbahaya karena memperpanjang jalan itu sendiri. Karena setiap pemberontakan selalu diikuti oleh tindakan lebih keras dari pemerintah yang memperlemah gerakan kebangsaan.

Karenanya, jalan yang kita ambil haruslah mengorganisasikan berbagai macam kekuatan rakyat ke dalam kesatuan yang besar sekali sehingga pada akhirnya mampu menghadapi masalah kekuasaan.

Perhimpunan Indonesia membiarkan masa depan menentukan apakah perjuangan akhir untuk kemerdekaan Indonesia akan dicapai oleh pertempuran berdarah. Ini relatif bergantung kepada hubungan kekuasaan yang kelak muncul. Sebenarnya, keputusan ini sepenuhnya tergantung pada negeri Belanda. Kalau Indonesia, dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, telah mencapai tahap kematangan berorganisasi, maka negeri Belanda akan harus bersedia atau dipaksa menyerahkan kemerdekaan.

Beberapa dari kami berpendapat, bila propaganda untuk kemerdekaan itu telah menyusup jauh lebih dalam ke hati pegawai negeri dan tentara Indonesia, yang menjadi tulang punggung penguasa kolonial, maka penguasa kolonial akan hancur sendiri. Revolusi tanpa kekerasan kemudian akan mengakhiri pemerintahan Belanda di Indonesia.

Secara pribadi, saya berharap suatu penyelesaian atas masalah kolonial akan tercapai dengan cara damai. Ini akan menguntungkan bagi hubungan ekonomi kedua negara dan bermanfaat bagi situasi internasional.

Namun, menurut pandangan dominan dari sebagian terbesar bangsa Belanda yang mengendalikan kekuasaan negara itu, bahwa Indonesia harus tetap menjadi wilayah menguntungkan bagi Belanda, saya khawatir, kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai lewat kekerasan. Dengan sendirinya, luas dan intensitas kekerasan ini tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Ini sepenuhnya tergantung pada hubungan kekuatan saat itu. Yang terjadi mungkin suatu revolusi berdarah, atau bisa juga suatu revolusi tak berdarah.

Saya hanya berharap bahwa generasi mendatang di negeri Belanda akan memahami semangat dari masa ini.

egois demi kepentingan perdamaian dunia dan persaudaraan antar-bangsa.

d. Hubungan dengan Komunis Indonesia

Kami menganggap komunis Indonesia sebagai kaum nasionalis terselubung yang berjuang di bawah panji-panji komunis dengan tujuan dapat memperoleh dukungan internasional untuk perjuangan mereka. Karenanya kami berupaya menggiring aksi mereka ke arah nasional. Dalam pengertian inilah saya menulis surat kepada Sudjadi pada tanggal 2 Juni 1926.²

Kami ingin mencapai tujuan ini melalui propaganda sistematis lewat pembentukan suatu blok nasional, bukan melalui persaingan antagonistik yang akibatnya akan merugikan pemikiran kami tentang kesatuan Indonesia.

Suatu langkah penting dari Perhimpunan Indonesia dalam memimpin gerakan kebangsaan Indonesia ke arah nasional diungkapkan dalam konvensi dengan Semaun yang ditandatangani pada 5 Desember 1926, ketika saya memanfaatkan situasi hancurnya PKI.³

Konsekuensinya adalah dileburnya PKI ke dalam Partai Rakyat Nasional Indonesia yang akan didirikan. Karena itu ketetapan penting dalam konvensi tersebut adalah PKI harus menyerahkan percetakannya kepada Perhimpunan Indonesia sehingga kehilangan senjata propagandanya yang paling ampuh, yaitu pers.

PKI berjuang untuk mencapai sebuah negara Indonesia yang komunis dan berdiri sendiri, yang menurut politik komunis akan membentuk satu jaringan dalam revolusi dunia.

Dilihat dari pandangan hidup kaum komunis yang tidak mau menerima bantuan, kaum nasionalis Indonesia menganggap suatu negara Indonesia yang komunis akan membuatnya sekali lagi kehilangan kemerdekaannya. Karena dilihat dari situasi geografis-ekonomisnya,

2. Lihat hal. 74.

Indonesia terletak di persimpangan internasional, maka para penguasa imperialis Barat tidak pernah akan toleran kepada suatu komunis Indonesia.

e. Propaganda Luar Negeri

Perhimpunan Indonesia mengarahkan propagandanya di luar negeri untuk menghadapi propaganda Dewan Pengusaha, yaitu anggapan mereka tentang Indonesia sebagai suatu tanah yang subur untuk penanaman modal Barat dan mengukur kesejahteraan rakyat Indonesia dengan kemakmuran golongan pengusaha Eropa. Propaganda Perhimpunan Indonesia menunjukkan kemelaratan yang sangat dan proletarisasi rakyat banyak Indonesia di bawah kekuasaan Belanda, dan sekaligus mengubah opini publik Barat terhadap gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk tujuan ini, Perhimpunan Indonesia mengirim wakil-wakilnya ke kongres internasional di Bierville dan Brussels.⁴

f. Pembentukan suatu Negara dalam Negara

Tentang hal ini saya pertama-pertama menaruh harapan akan dukungan kepada pikiran autoaktivitas yang merupakan pelengkap bagi politik nonkooperasi, sehingga politik ini tidak akan mengalami kegagalan.

Setiap tahun harus diselenggarakan kongres nasional, sama dengan di India jajahan Inggris, sebagai persiapan dan latihan untuk membentuk parlemen nasional yang muni dan kuat. Semua partai Indonesia harus berpartisipasi dalam hal ini dan semua masalah bertalian dengan kesejahteraan rakyat dan politik nasional harus mendapat perhatian.

Konsekuensi dan sistem ini adalah didirikannya gedung pengantunan nasional, seperti yang didirikan di Irlandia untuk menyelesaikan konflik antarorang Indonesia sendiri sejauh bukan perkara pidana. Ini juga salah satu cara yang memungkinkan perasaan nasionalis dapat dikembangkan secepat mungkin.

Yang kedua, "pembentukan negara di dalam negara" dapat dimengerti dalam kaitannya dengan status dominion, yang bagi nasionalis Indonesia hanya dapat diterima sebagai bentuk pemerintah sementara sebelum Indonesia sepenuhnya merdeka. Karena begitu status dominion tercapai, maka terbukalah jalan bagi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan absolut.

Saya juga berpendapat bahwa kedudukan politik ini hanya dapat dicapai dengan suatu penyelesaian masalah kekuasaan oleh gerakan nasionalis yang terorganisasi dengan baik.

Oleh karena itu, yang harus dituntut adalah: kesatuan, solidaritas, dan organisasi yang kuat. Realisasi dari ini adalah tugas selanjutnya dari Partai Rakyat Nasional Indonesia.

1

Pembelaan Mohammad Hatta

Tuan-tuan ketua dan majelis hakim yang terhormat.

Saya sudah mempersiapkan suatu pembelaan panjang lebar yang pembacaannya akan meminta waktu selama 3½ jam. Tetapi saya tidak akan menyita lagi waktu tuan-tuan untuk mendengarkannya. Oleh sebab itu saya menyerahkan naskah pembelaan saya untuk diteliti dan dipertimbangkan.

Saya sepenuhnya menyetujui dan mendukung semua yang telah dikemukakan para penasihat hukum saya, Mr. Mobach dan Mr. Duijs. Mereka telah menguraikannya secara baik dan tepat sekali. Hanya satu hal yang masih ingin saya kemukakan dalam kesempatan ini, yaitu tentang sikap Perhimpunan Indonesia terhadap "kekerasan". Kalau tuan-tuan meneliti anggaran dan peraturan rumah tangga perkumpulan itu, tuan-tuan tidak akan menemukan unsur apa pun yang berbau kekerasan dalamnya. Mereka tidak pernah merencanakan atau menghendaki adanya tindak kekerasan dan tidak ada macam tindakan kekerasan yang mereka setuju dan dukung. Yang benar adalah, mereka berbicara tentang kekerasan.

Analisa tentang hubungan kolonial telah memberi kesimpulan kepada Perhimpunan Indonesia, bahwa seluruh keadaan dikuasai oleh dua elemen yang satu sama lain bertolak-belakang, yaitu: pemerintah Belanda yang ingin mempertahankan kekuasaannya di Indonesia dengan segala cara dan upaya yang dimiliki dan bangsa Indonesia yang menghendaki kemerdekaan yang penuh. Keadaan

itu telah memaksa mereka meyakini, bahwa kemerdekaan hanya dapat diperoleh bangsa Indonesia melalui kekerasan.

Sebenarnya hal itu bukanlah suatu penemuan yang mengejutkan. Para missionaris dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat di negeri ini sudah lama tiba pada kesimpulan itu. Hal itu sudah jelas dalam kutipan-kutipan yang telah diuraikan Mr. Duijs dalam pidato pembelaannya. Rupanya sudah merupakan suatu ketentuan sejarah, bahwa kelahiran suatu bangsa harus selalu disertai darah dan tangis.

Dalam *Indonesia Merdeka* tahun 1924, halaman 1, ditulis demikian:

"Cepat atau lambat setiap bangsa yang ditindas pasti memperoleh kemerdekaannya kembali; itulah hukum sejarah yang tidak dapat dimungkiri. Hanya soal proses dan cara bagaimana mereka memperoleh kembali kemerdekaan itu yang tergantung pada mereka yang pada saat itu memegang kekuasaan. Malah merekalah sebenarnya menjadi faktor yang menentukan, apakah perjuangan kemerdekaan itu harus berlangsung dengan tangis dan darah atau dilaksanakan secara tertib dalam keadaan damai."

Negeri Belanda sepenuhnya berkuasa untuk menentukan dengan cara bagaimana Indonesia akan memperoleh kemerdekaannya: dengan cara kekerasan atau dengan jalan damai. Tetapi melihat sikap bagian terbesar bangsa Belanda, yang jelas nampak pada sikap anggota-anggota Dewan Perwakilan pada tahun 1925, ketika undang-undang tentang Tata Negara Hindia Belanda dibicarakan, saya takut, bahwa yang pertamalah yang akan terjadi.

Bahwa pemerintahan kolonial akan berakhir, untuk saya sudah merupakan suatu hal yang pasti. Hal itu hanya soal waktu saja, dan sama sekali bukan soal ya atau tidak. Kiranya baik, kalau bangsa Belanda dapat menyadari, bahwa kekuasaan mereka tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya.

Satu hal lagi, tuan ketua dan majelis hakim yang terhormat, saya ingin kemukakan di sini, yaitu tentang penahanan sementara yang ditimpakan atas diri kami. Kami berdiri di sini bukan sebagai penjahat, kami adalah orang-orang jujur yang secara jujur membela kepentingan kami. Oleh sebab itu kiranya tuan-tuan dapat menerima yang saya kemukakan ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



Pada waktu terjadi tuntutan terhadap "Indonesia Merdeka", majalah "Perhimpunan Indonesia", Mohammad Hatta dengan kawan-kawan sebenarnya masih berada di Swis. Dan hanya untuk menghadiri tuntutan yang bersifat fitnah itulah mereka kembali ke Negeri Belanda pada bulan September 1927. Segera setelah mereka berada di Den Haag, dengan cara-cara yang sangat spektakuler, rumah sewa mereka dikepung dan mereka ditawan.

Waktu tananan sementara atas diri kami, semesta kami yang selalu didasarkan pada alasan: "takut melarikan diri". Kami melarikan diri, tuan ketua dan majelis hakim yang terhormat? Kami bukan pengecut dan tidak pernah terlintas dalam benak kami untuk melarikan diri. Kami berjuang untuk suatu tujuan yang luhur dan melarikan diri akan merusak seluruh perjuangan kami. Mungkin keyakinan kami bukan keyakinan tuan-tuan, tetapi satu hal yang sama-sama kita miliki, karena kita bukan orang-orang jahat, yaitu, saling menghormati keyakinan masing-masing.

Perasaan hormat seperti itu akan memberi kepastian pada tuan-tuan, bahwa dalam perkara yang kami hadapi, usaha melarikan diri adalah suatu perbuatan yang paling buruk.

Tetapi janganlah saya terus berbicara secara abstrak. Izinkanlah saya mengemukakan hal-hal yang nyata untuk meyakinkan tuan-tuan ketua dan majelis hakim, bahwa motif "takut melarikan diri" sama sekali tidak berdasar.

Jikalau saya pernah berpikir untuk melarikan diri, saya berani jamin, bahwa polisi negeri ini tidak akan mampu menemukan saya. Saya aman di Swiss ketika perkara dimulai terhadap kelompok kami di sini. Saya akan tetap tinggal di negeri itu, jikalau saya takut menghadapi tuntutan atau penahanan.

Tetapi justru sebaliknya, karena mengingat, bahwa persoalan kami akan disidangkan, yang menurut perkiraan saya akan dilakukan pada bulan September tahun lalu saya perpendek masa libur saya dan segera datang ke Negeri Belanda. Pada waktu itu ketiga kawan saya ini juga berada di luar negeri. Maka, sama halnya, jikalau mereka ingin melarikan diri, mereka akan tetap tinggal di sana.

Tidak tuan ketua yang terhormat. Sifat ksatria yang kami miliki memantangkan kami melakukan tindakan pengecut. Dan sifat keksatriaan kami inilah yang dihadaahi 5½ bulan di belakang trali besi tanpa dasar yang jelas.

Alasan "takut melarikan diri" jelas tidak dapat dipertahankan lebih lama. Sebab itu saya sangat mengharapkan, sementara menunggu putusan tuan-tuan yang terhormat, memerintahkan penahanan sementara atas diri kami segera diakhiri. Saya percaya, bahwa dalam hal ini pun tuan akan menegakkan keadilan.

Jikalau sekarang saya tiba pada akhir kata-kata tambahan pada pembelaan saya, saya ingin menggunakan kedudukan saya sebagai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tertuduh untuk mengajukan protes terhadap ketidak-adilan yang masih selalu harus dialami bangsa saya. Kepada tuan-tuan, penegak hukum dan keadilan, saya mengajukan permohonan, supaya tuan-tuan dapat memberikan sanksi-sanksi untuk kami pemuda-pemuda Indonesia yang tidak berdaya menghadapi kekuasaan pemerintah Belanda. Selama bertahun-tahun kami menderita dan hidup tanpa kepastian, karena selalu dikejar-kejar dan dimata-matai. Kami benar-benar mengira, bahwa di negeri Grotius yang sangat menjunjung tinggi hak-hak manusia, kami dapat menikmati perlakuan yang sama dengan orang lain. Tetapi tidak!

Karena orang-orang tidak menemukan alasan untuk menghukum kami, maka mereka menggunakan alasan immoral untuk menjebloskan kami dalam tahanan.

Orang tua kami di Indonesia, yang bekerja di pemerintahan atau instansi lainnya, mendapat ancaman dipecat dari jabatan atau dengan berbagai macam perlakuan yang tidak diinginkan siapa pun, jikalau mereka terus mengirimkan uang kepada anak-anak mereka yang belajar di Eropa.

Cara itu merupakan senjata bermata dua. Pada satu pihak, anak-anak mereka diserahkan pada kekerasan ekonomis di negeri asing serta segala penderitaan yang menjadi akibatnya, dan pada pihak lain, pertentangan ditumbuhkan di antara ayah dan anak, antara generasi tua dan muda.

Sebenarnya, tanpa cara-cara itu sudah terdapat kesenjangan antara orang tua dan orang muda; ayah dan anak sudah hidup dalam dua dunia yang berbeda.

Generasi tua, merasa akhirnya sudah semakin dekat, ingin memelihara apa yang telah dimiliki. Berbeda dengan generasi muda, yang sedang menghadapi terbitnya sinar matahari pagi hari baru. jiwanya masih bergelora dipenuhi cita-cita dan harapan pada masa depannya. Keyakinan mereka, bahwa hari itu pasti akan lebih cerah demikian kuatnya, menyebabkan dada mereka seolah-olah meledak; cinta-kasihnya terlalu kuat, sehingga orang-orang muda itu bertekad, sekalipun dengan rasa berat, menggunakan tangannya mematahkan cengkeraman tangan berdarah demi keselamatan bangsa dan negerinya.

Namun tuan ketua dan majelis hakim yang terhormat, fakta tersebut tidak membenarkan cara-cara yang dilakukan pemerintah. Menjebloskan orang-orang Indonesia tertentu, yang belajar di

negeri ini ke dalam kesengsaraan, merupakan hukuman yang tidak adil, tidak adil dan sangat biadab.

Kepada tuan-tuan hakim yang terhormat, yang melambangkan keadilan dan kebenaran, saya bertanya dalam segala kepercayaan, apakah cara tersebut secara tidak langsung, tidak membatasi gerakan mereka di negeri ini?

Kepada tuan-tuan yang terhormat saya berani bertanya, apakah hal itu tidak melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dasar negeri ini?

Apakah kejadian-kejadian seperti itu tidak menambah kebencian dalam hati orang-orang yang setiap saat dapat saja diganggu, sekalipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum? Apakah kami salah, kalau kami ingin membebaskan diri dari pahit-getirnya kedudukan sebagai bangsa jajahan?

Lebih dari jelas orang-orang menyatakan pada kami, bahwa hak-hak kami, berdasarkan undang-undang negeri ini, sebagai anak-anak bangsa jajahan, tidak ada.

Tetapi orang-orang Perhimpunan Indonesia mampu menderita, sama seperti pemuda-pemuda bangsa jajahan lain.

Masa muda mereka memang tidak begitu cerah seperti masa muda anak-anak bangsa merdeka. Dalam masa mudanya mereka sudah harus menderita dan berkorban. Tetapi semua pengalaman itu telah membajakan semangat dan watak mereka untuk berjuang mencapai cita-cita yang memanggil mereka. Panggilan yang didengar dengan teliga hatinya telah membangkitkan semangatnya untuk berjuang bersama bangsanya.

Kami percaya pada hari kemudian bangsa kami dan kami juga percaya pada kekuatan-kekuatan jiwanya. Kami tahu, bahwa kekuasaan di Indonesia secara perlahan tetapi pasti akan bergerak ke pihak kami. *Indonesia Merdeka* menulis :

"Orang berkata, bahwa bangsa Indonesia yang besar pada masa silam, tidak lagi mampu berbuat sesuatu yang besar untuk hari kemudian, bahwa secara pasti dia terus menurun dan tidak akan mampu memperbaiki keadaannya lagi.

Kita tidak dapat menghakimi bangsa kita. Sejarah yang akan menentukannya. Dan dengan bangsa itulah kita akan dihukum atau dibebaskan, oleh sebab dengan bangsa itulah kita mendapat penghargaan atau penghinaan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hidup pemuda Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup bangsanya yang menderita dan berharap. Itulah nalurnya yang memanggil-manggil, dialah jiwanya yang bernyala-nyala mendobrak pintu hari depannya.

Rona kemerah-merahan hari depan itu telah nampak pada hari ini. Kita menyambutnya sebagai permulaan hari baru.

Anak-anak Indonesia turut mengemudikannya ke arah yang dikehendaki. Mereka mempunyai kewajiban untuk mempercepat datangnya hari baru itu. Mereka harus mengajarkan kembali hidup yang berbahagia kepada bangsanya; dia tidak boleh dibiarkan hanya merasakan pahitnya saja; bangsa Indonesia harus merasa dirinya bebas di bawah langitnya yang biru; dan merasa dirinya tuan dan penguasa dalam negeri yang diberikan Tuhan padanya.”

Tuan-tuan hakim yang terhormat. Jikalau saya sekarang menyatakan siap menanti keputusan tuan-tuan, kata-kata Rene de Clerq yang telah menjadikan "Indonesia Muda" sebagai latar belakang ucapannya, terletak pada bibir saya:

”Hanya satu tanah yang dapat menjadi tanah airku,
Dia tumbuh sesuai upaya dan upaya itulah dayaku.”

2

Pembelaan R.M. Abdul Majid Joyoadiningrat

Tuan-tuan hakim ketua dan anggota majelis yang terhormat. Kemarin, setelah mendengar tuduhan tuan penuntut umum yang sangat memburukkan cita-cita kami yang demikian mulia dan agung, saya hampir tidak dapat menahan gejolak hati untuk memohon waktu pada tuan-tuan hakim yang terhormat untuk mengajukan bantahan terhadap tuduhan itu.

Namun setelah mendengar pidato pembelaan tuan-tuan pembela kami yang demikian sempurna melukiskan adanya suatu pengertian yang mendasar, yang secara tuntas telah membantah segala tuduhan terhadap cita-cita kami yang luhur itu, timbullah keyakinan dalam hati saya, bahwa tidak semua orang di negeri ini menentang gerakan dan tujuan nasionalis kami. Itulah sebabnya, tuan-tuan hakim, ketua dan anggota majelis, saya hanya memohon beberapa saat guna mengutarakan beberapa patah kata sebagai tambahan.

Setelah sidang kemarin, di dalam kesunyian sel penjara, saya merenungkan dan membanding-bandingkan dua pendapat yang bertolak belakang, yang dimiliki tuan penuntut umum dengan tuan-tuan pembela kami. Maka sekarang terpaksa saya mengakui, bahwa di antara bangsa Belanda masih terdapat pemuka-pemuka yang memberi penilaian yang berbeda terhadap gerakan dan tujuan perjuangan bangsa kami dengan penilaian tuan penuntut yang terhormat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

150
T

Sekarang barulah saya benar-benar yakin, bahwa tuan-tuan pembela tidak berdiri sendiri dalam pandangan dan penilaian mereka terhadap perjuangan kami. Masih terdapat beribu-ribu orang di kalangan masyarakat ini yang, sekalipun tidak selalu sependapat tentang cara dan penafsiran kami, pada pokoknya sependapat dengan tujuan yang kami junjung.

Dan saya percaya dan yakin, tuan-tuan ketua dan anggota majelis hakim yang terhormat, bahwa tuan-tuan sendiri pun tergolong dalam bagian masyarakat yang saya sebut, yang walaupun tidak selalu menyetujui rencana dan usaha yang kami lakukan, pada dasarnya, berbeda dengan tuan penuntut umum, dapat menghargai cita-cita dan tujuan gerakan kami itu.

Oleh sebab itu saya percaya dan yakin, bahwa, sekalipun tuan-tuan hakim ketua dan anggota majelis mempunyai pendapat yang berbeda tentang cara-cara perjuangan untuk kemerdekaan bangsa kami, tuan-tuan pasti menghargai tujuan kami dan tidak akan memperlakukan kami sebagai penjahat-penjahat dalam arti umum, seperti yang dilakukan tuan penuntut umum.

Selain pernyataan percaya dan yakin itu tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan pada kata-kata yang telah diutarakan tuan-tuan pembela dan saudara sesama terdakwa Mohammad Hatta.

3

Pembelaan Ali Sastroamijoyo

Tuan-tuan hakim, ketua dan anggota majelis.

Semula saya bermaksud untuk turut mengemukakan bantahan terhadap tuduhan tuan penuntut umum yang terhormat. Tetapi setelah mendengar penjelasan serta uraian tuan pembela yang kami hormati, tuan Duijs, maka saya menganggap apa yang saya ingin utarakan tidak perlu lagi saya kemukakan dalam sidang ini.

Namun demikian, saya masih ingin memohon tuan-tuan hakim yang terhormat sudi mempelajari naskah pembelaan yang saya serahkan dengan harapan dapat membantu tuan-tuan dalam mempertimbangkan keputusan terhadap tuduhan dan tuntutan yang dilakukan tuan penuntut umum.

Di sini saya ingin mengutarakan ucapan terima kasih yang sangat dalam terhadap tuan-tuan pembela kami. Tidak boleh tidak, saya harus menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuan Mobach atas pembelaannya, terlebih lagi kepada Tuan Duijs atas gambaran yang secara sempurna menyatakan kebenaran tentang keadaan bangsa dan negeri kami dan karena sikapnya yang benar-benar menunjukkan pengertian dan dukungan atas tujuan dan cara-cara perjuangan kami. Dia telah mengungkapkan fakta-fakta dalam pidatonya yang terasa sangat menyegarkan hati dan jiwa kami. Dia telah mengungkapkan segala perasaan yang selama ini harus kami pendam. Kata-katanya telah menghidupkan harapan baru dalam hati kami, harapan untuk bangsa kami dan untuk hari kemudian yang lebih cerah. Pidato Tuan Duijs itu telah memungkinkan saya menyadari, bahwa pasti masih terdapat orang-orang lain di negeri ini yang dapat memahami dan mengukur tinggi-rendahnya cita-cita kami seperti dia.

4

Pembelaan Nazir Sutan Pamuncak

Tuan-tuan hakim, ketua dan anggota majelis yang terhormat. Setelah mendengar pidato tuan-tuan pembela kami, yang demikian tuntas dan jelas, masih ingin saya menggunakan kesempatan yang secara royal tuan-tuan berikan.

Namun sebelumnya, izinkanlah saya menambahkan rasa terima kasih saya pada ucapan-ucapan yang sudah disampaikan saudara-saudara terdakwa terdahulu, kepada tuan-tuan pembela atas segala usaha yang mereka telah dan akan lakukan dalam perkara kami ini.

Tentang isi surat tuduhan tuan penuntut umum yang terhormat, saya hanya ingin meminta perhatian tuan-tuan hakim yang terhormat pada dua hal yang tersebut dalamnya, yang sama sekali telah memberi gambaran yang sangat bertentangan dengan keadaan serta kejadian yang sebenarnya.

Yang saya maksudkan adalah, hubungan kami dengan organisasi-organisasi yang terdapat di luar negeri, khususnya keikutsertaan kami dalam kongres demokrasi pasifis di Bierville pada bulan Agustus 1926 dan malam kesenian Timur di Paris, juga pada tahun 1926.

Tuan penuntut umum telah menggambarkan hubungan luar negeri kami tersebut, seolah-olah mempunyai kaitan dengan kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di negeri kami. Bahwa hubungan itu sama sekali tidak mempunyai dasar kebenaran dan dengan sendirinya dibantah oleh dasar dan tujuan kongres Bierville



Sidang inilah yang oleh pemerintah Belanda dituduh sebagai konperensi gerakan komunis Internasional. Hatta duduk di kepala meja (depan) ketika diadakan pertemuan presidium kongres yang menentang imperialisme dan kolonialisme yang memperjuangkan kebebasan bangsa-bangsa jajahan, Pebruari 1927. Turut mengambil bagian dalam sidang itu Chen Kuen dan Liau Hansin (Cina), Roger Baldwin (AS), Jawaharlal Nehru (India) dan lain-lain anggota dari benua Eropa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kongres pasifis, karena dalam kutipan-kutipan yang telah diutarakan dalam surat tuduhannya kemarin dapat ditemukan bukti-bukti yang jelas, bahwa kealpaan-kealpaan seperti itu bukanlah suatu perbuatan yang asing baginya).

Untuk jelasnya, saya dapat menerangkan, bahwa kongres tersebut diadakan dalam sebuah istana dan berada di bawah perlindungan seorang pasifis yang sangat terkenal di Eropa, Marc Sangnier. Dia bukan seorang sosialis dan sama sekali dia tidak dapat disebut sebagai pendukung sistem tentara merah Rusia.

Tentang malam kesenian di Paris, tuan-tuan hakim tentu sependapat dengan saya, bahwa malam itu tidak dapat disebut sebagai malam propaganda kekerasan, jikalau tuan-tuan tahu, bahwa pada malam yang diadakan khusus untuk menyajikan kesenian-kesenian Timur, turut juga hadir – tidak lain dari – tuan duta besar kerajaan Belanda di Perancis, Tuan dr. Loudon.

Yang mulia Tuan Loudon telah menyatakan pujian dan penghargaan terhadap para penyelenggara malam itu serta rasa bangganya terhadap penyajian kesenian Indonesia yang kami adakan. Secara khusus dia mengucapkan terima kasih disertai pengharapan, supaya pada musim rontok tahun 1926 itu juga, kami bersedia datang kembali untuk menyelenggarakan malam musik dan tari Indonesia di Paris. Hanya akibat kesibukan yang sangat berlebihan dan mengada-ada dari pihak penasihat Departemen Daerah Jajahan mengenai masalah para mahasiswa Indonesia saja, undangan itu tidak dapat kami penuhi.

Tidak mustahil, bahwa cara-cara pemikiran Tuan Westenek tersebut sejalan dan seirama dengan cara-cara pemikiran tuan penuntut umum yang terhormat.

